



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 10

TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA MADIUN TAHUN 2017

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2016 dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah guna menjadi bahan pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran dan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 100/2411/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 ;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2016 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 10/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 28/G), diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 Desember 2016

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2016 NOMOR 55/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan salah satu kewajiban daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pelaksanaan rencana; dan
- d. pengendalian dan evaluasi perencanaan.

Perencanaan tersebut terangkum dalam sebuah sistem yang saling berkaitan, mulai dari RPJP/RPJPD, RPJMN/RPJMD sampai dengan RKP/RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun 2014-2019 dengan berpedoman pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional.

RKPD Kota Madiun Tahun 2017 memuat tentang evaluasi dari pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya (RKPD 2016), reviu pelaksanaan RPJMD Tahun 2016, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta perkiraan pagu indikatif dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif Kota Madiun pada Tahun 2016. Disamping itu, penyusunan tersebut mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan yang dimulai secara bertahap dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. RKPD juga merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang merupakan penjabaran dari RKPD. Di sisi lain, RKPD Kota Madiun Tahun 2017 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kota Madiun Tahun 2017 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan yang diantaranya :

- a. Pendekatan Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja);
- b. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif;
- c. Pendekatan Politis;
- d. Pendekatan *Top Down*; dan
- e. Pendekatan *Bottom Up*.

Melalui pendekatan teknokratis, rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif dapat dilihat dari peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Perencanaan yang disusun merupakan amanat RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 dan merupakan wujud penjabaran tahunan dari RPJMD tahun ketiga dan juga arahan umum RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Walikota terpilih, hal tersebut yang dapat dicerminkan dalam pendekatan Politis.

Selanjutnya, pendekatan Pendekatan *Top Down* tercermin ketika perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi dan Kota. Sementara itu, Pendekatan *Bottom Up* terlihat saat perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan secara bertahap, mulai dari Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota.

Selain itu, proses penyusunan RKPD kota Madiun tahun 2017 juga melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD;
- b. Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai tugas dan fungsinya mengacu kepada rancangan awal RKPD;
- c. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan mengakomodir Rencana Kerja PD;
- d. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan;
- f. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD;

- g. Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kota; dan
- h. RKPD ditetapkan dengan peraturan Walikota.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2017 secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

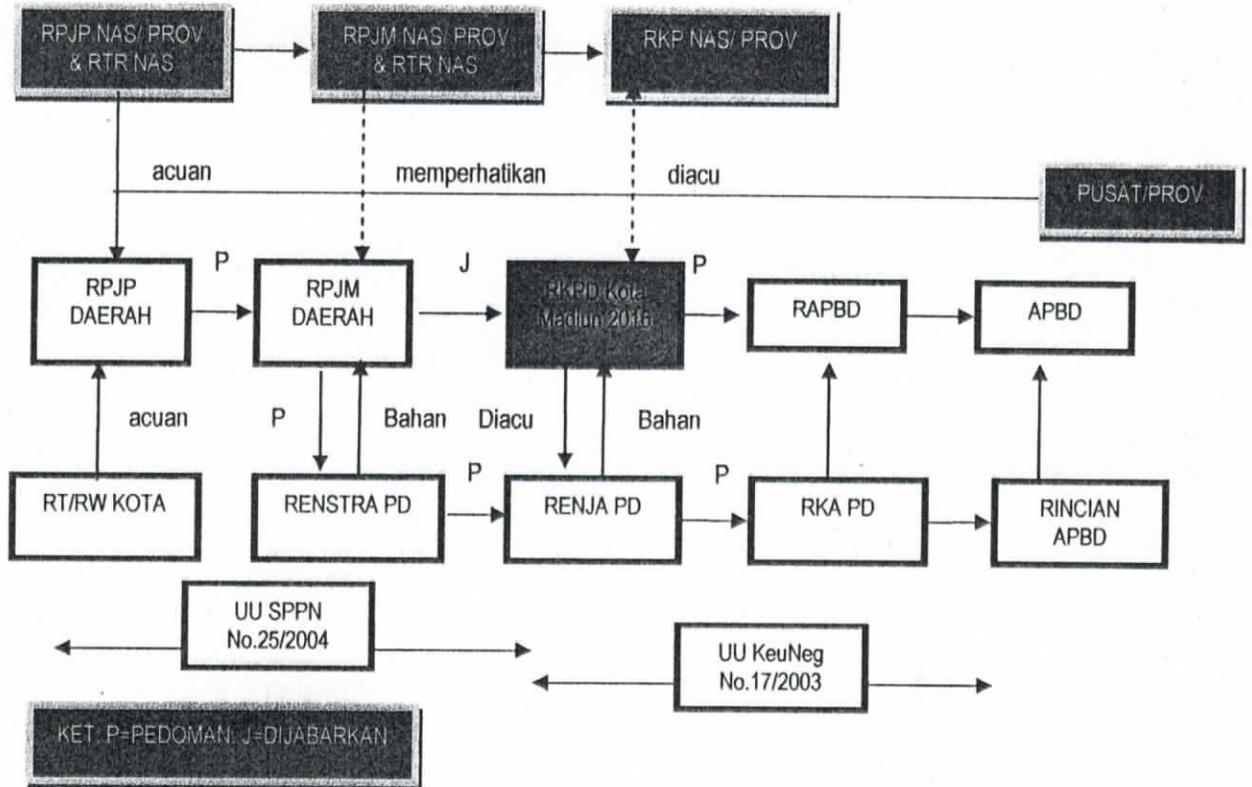
1. Landasan idiil : Pancasila;
2. Landasan konstitusional: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3. Landasan operasional :
 - a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No, 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
 - d. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- s. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2411/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- u. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Madiun Tahun 2014-2019;
- x. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- y. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Madiun memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan di tingkat Pusat/Provinsi maupun di tingkat lokal/Kota Madiun. Di tingkat lokal, RKPD Kota Madiun merupakan penjabaran RPJMD dan pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sedangkan keterkaitan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, RKPD Kota Madiun berpedoman pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, RKPD Kota Madiun juga merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dengan mengacu pada arahan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur serta menjabarkan RPJMD Kota Madiun. Lebih lanjut, RKPD akan diuraikan lebih spesifik dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang pada akhirnya menjadi acuan penyusunan APBD Pemerintah Kota Madiun.



Gambar 1. 1

Keterkaitan RKPD Kota Madiun dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RKPD ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota. Oleh karena itu, substansi RKPD Kota Madiun Tahun 2017 harus selaras antara dokumen perencanaan tingkat Pusat, Provinsi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan antara Nasional, Provinsi dan Kota.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan RKPD Kota Madiun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan RKPD Kota Madiun, landasan hukum penyusunan RKPD, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, maksud dan tujuan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah dan permasalahan pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan (arah dan kebijakan ekonomi daerah), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Ringkasnya, pada bab ini akan diulas mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh PD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini, dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun dimaksudkan untuk menyediakan pedoman perencanaan bagi semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kota Madiun yaitu Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk jangka pendek. Adapun secara rinci maksud dan tujuan RKPD sebagai berikut :

1.5.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017:

- a. menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2014-2019 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2017;
- b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;
- c. menjadi acuan bagi seluruh PD Kota Madiun dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
- d. menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2017;
- e. memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.5.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017:

- a. menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
- b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
- c. menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat arah dan kebijakan pembangunan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

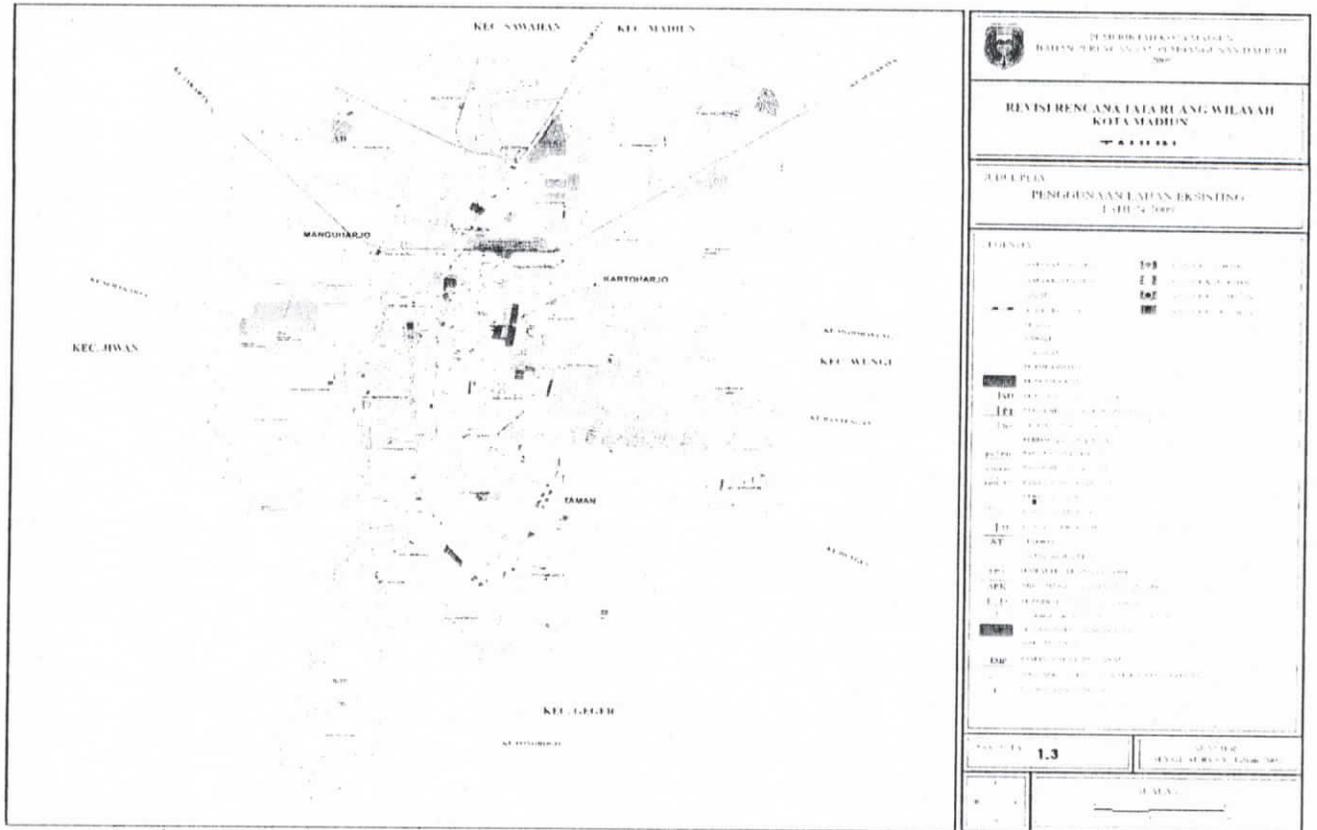
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan. Adapun Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang utama meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum, lebih lanjut analisis dari masing-masing aspek dimaksud sebagaimana uraian berikut.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kota Madiun terletak pada koordinat 111° BT – 112° BT dan 7° LS – 8° LS, berada pada daratan dengan ketinggian 63m s/d 67m dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63m dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67m dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara antara 20°C s/d 35°C . Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun. Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya:

1. perbatasan sebelah utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun,
2. perbatasan sebelah selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,
3. perbatasan sebelah timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan
4. perbatasan sebelah barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.



Sumber: madiunkota.go.id

Gambar 2. 1.
Peta Administratif Kota Madiun

Kota Madiun mempunyai luas wilayah 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km². Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga secara keseluruhan terdapat 27 Kelurahan.

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2015 sebanyak 208.248 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 57.777 jiwa, Kecamatan Manguharjo 62.276 jiwa, dan Kecamatan Taman 88.195 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1.
Jumlah Penduduk Kota Madiun per Kecamatan Tahun 2011 s/d 2015

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kartoharjo	55.332	55.970	57.090	58.125	57.777
2	Manguharjo	60.804	60.712	62.086	63.007	62.276
3	Taman	85.951	86.575	88.205	89.867	88.195
	Total	202.087	203.257	207.381	210.999	208.248

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2016

Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir Tahun 2015 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 69.799 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 440 jiwa; D-III 5.507 jiwa; S-1 18.608 jiwa; S-2 1.205 jiwa, dan S-3 20 jiwa. Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2.
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2011 s/d 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	30.321	29.751	30.586	31.218	30.989
Tidak Tamat SD;	12.503	15.062	16.883	18.383	18.575
Tamat SD;	34.825	33.571	33.704	33.767	32.950
Tamat SLTP;	29.605	29.660	29.932	30.247	30.155
Tamat SLTA;	69.317	69.515	70.414	71.142	69.799
Tamat D-I/II;	434	438	449	448	440
Tamat D-III;	5.359	5.447	5.544	5.624	5.507
Tamat S-1;	18.634	18.731	18.740	18.985	18.608
Tamat S-2;	1.070	1.067	1.112	1.169	1.205
Tamat S-3.	19	15	17	16	20

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2016

Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2015 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3.
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2011 s/d 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
Belum/Tidak PRT	42.231	39.935	39.525	39.214	38.404
Pelajar/Mahasiswa	34.069	34.131	34.560	35.064	34.603
Pensiunan	34.810	37.768	40.077	43.158	43.581
PNS	6.865	6.692	6.655	6.509	6.374
TNI	7.848	7.709	7.708	7.623	7.379
POLRI	1.895	1.901	1.938	1.952	1.850
Jasa	1.040	1.040	1.062	1.060	1.048
Karyawan	7.155	8.918	7.723	5.058	8.608
Buruh	40.100	40.920	41.871	42.745	42.126
Wiraswasta	4.692	4.900	5.054	5.115	5.082
Lain-lain	20.693	18.753	20.039	18.687	18.727
	689	590	562	4.814	466

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2016

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total Produk Domestik Regional Bruto setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada Tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4.
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2011 s/d 2015 (Rp. Milyar)

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2011	6.813,4	6.494,4	6,79
2012	7.533,6	6.937,7	6,83
2013	8.390,4	7.470,7	7,68
2014	9.214,2	7.965,5	6,62
2015*)	10.191,7	8.442,4	6,05

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.

Tabel 2. 5.
Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus Kota Madiun Tahun 2011 – 2015

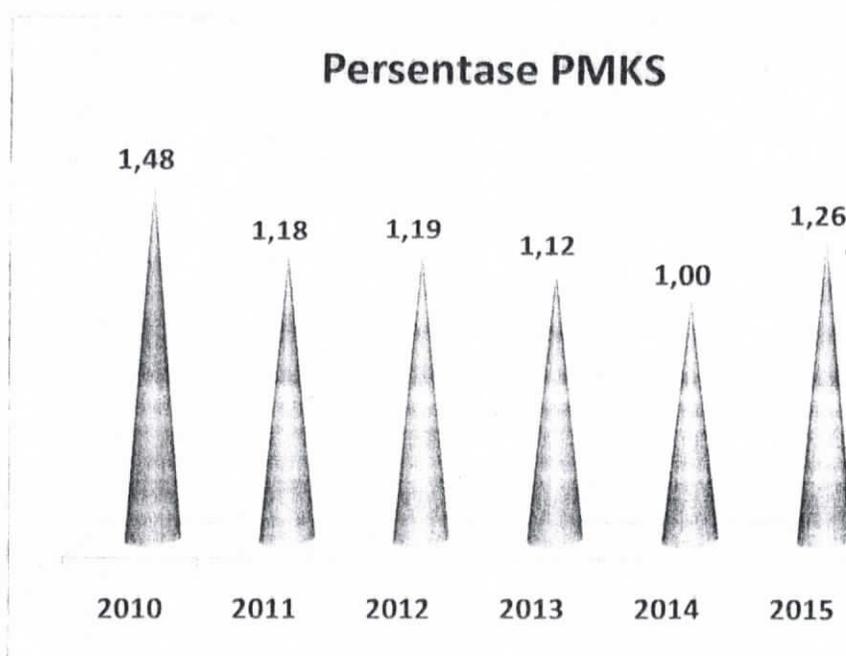
Kategori	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pra KS	673	503	374	497	332
KS-I	7.759	7.805	7.896	7.402	7.643
KS-II	14.996	15.643	13.519	17.168	17.759
KS-III	23.047	24.244	25.724	24.372	23.815
KS-III Plus	2.392	2.662	4.560	2.991	3.096

Sumber : BPM, KB dan KP Kota Madiun Tahun 2016

Persentase Pra KS dan KS-1 ada perubahan Tahun 2014 jumlahnya 7.899 keluarga, sedangkan tahun 2015 jumlahnya 7.975 keluarga penambahan 76 keluarga atau 0,96% karena adanya dampak kondisi perekonomian baik regional, nasional maupun internasional. Presentase Keluarga Sejahtera II , III dan III Plus mengalami kenaikan 0,31% (139 KK) yaitu Tahun 2014 jumlahnya 44.531 menjadi 44.670 pada tahun 2015, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan.

Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keluarga di Kota Madiun secara umum termasuk kategori Keluarga Sejahtera II dan III serta III Plus sebanyak 44.670 keluarga atau 84,85% dari jumlah KK 52.645.

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 2. 2.
Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk Kota Madiun
Tahun 2010 – 2015

Pada tahun 2015, jumlah PMKS di Kota Madiun mencapai 1,26% atau 2.630 orang dari total penduduk yakni 208.248 jiwa. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,259% dibandingkan dengan PMKS di Tahun 2014 yang berjumlah 2.113 orang. Dari jumlah PMKS yang ada pada Tahun 2015, sejumlah 2.630 orang atau 100% telah mendapat penanganan dari pemerintah Kota Madiun. Penanganan PMKS di Tahun 2015 meliputi pembinaan, pengiriman ke panti rehabilitasi sosial, dan pemulangan ke tempat asal/keluarga jika PMKS berasal dari hasil sidak di jalanan. Selain itu, persentase PMKS terhadap jumlah penduduk setiap tahun memiliki tren penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat Kota Madiun yang mengalami masalah kesejahteraan sosial menurun semenjak Tahun 2010 yang lalu sampai Tahun 2014 tapi pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sedikit.

Akan tetapi Angka Kemiskinan Kota Madiun pada dasarnya terus mengalami penurunan dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2015 kecuali pada Tahun 2009 ke Tahun 2010 mengalami kenaikan 0,58 poin, untuk Tahun 2015 angka kemiskinan di kota madiun mengalami penurunan 0,26 poin dari Tahun 2014 yang pada saat itu berada pada titik 4,82%.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 2. 3.
Angka Kemiskinan Kota Madiun
Tahun 2007 s/d 2015 (dalam %)

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan nasional, jumlah event/kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam event Regional dan Nasional Tahun 2015 meningkat dibandingkan Tahun 2014, yaitu 6 prestasi di bidang seni dan budaya sedangkan pada Tahun 2014 prestasinya 5. Beberapa keikutsertaan dalam event regional maupun nasional diantaranya : Festival Pedalangan, Festival Karya Tari, Lomba Bina Kreatifitas SDLB dalam rangka HAN dan Pekan Seni Pelajar (Ada 8 jenis lomba Tingkat SD/MI, 6 jenis lomba tingkat SMP, dan 4 jenis lomba tingkat SMA).

Di sisi lain, dalam mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah kegiatan budaya sebagai pendorong kegiatan pariwisata, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan event seni budaya dalam Tahun 2015 sebanyak 11 event. hal ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yang juga hanya 11 event, diantaranya: Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Madiun, Grebeg Maulud Nabi Muhammad SAW, Geguritan Pitutur Budi Pekerti bagi guru SD dan SMP, Pembinaan Seniman, Pentas Seni Secara Periodik, Lomba Keroncong dan campursari Tingkat Kota, Pentas Dalang Kecil, dan Pagelaran Wayang Kulit. Indikator ini menunjukkan jumlah even seni dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah secara tahunan. Semakin banyak even wisata, seni dan budaya mengindikasikan semakin meningkatnya kehidupan seni budaya dan pariwisata di Kota Madiun, sekaligus menunjukkan kemampuan penyediaan kesempatan berkreatifitas di urusan seni budaya.

Sementara itu, pembinaan generasi muda di Kota Madiun pada Tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan. Perkembangan prestasi olahraga pelajar pada Tahun 2015 di tingkat nasional ada 1 (satu), sedangkan prestasi olahraga pelajar untuk tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Kota Madiun memperoleh sejumlah 6 (enam) medali yang diantaranya berupa 2 (dua) medali perak dan 4 (empat) perunggu.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK).

Pertumbuhan Ekonomi (%)				
6,79	6,83	7,68	6,62	6,05
2011	2012	2013	2014	2015*)

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Gambar 2. 4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2011 s/d 2015 (dalam %)

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2010 s/d 2015 Kota Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 6.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2011 s/d 2015

No	Uraian	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,96	2,93	0,7	0,98	1,58
2	Pertambangan dan Penggalian	8,09	1,99	3,69	1,69	1,98
3	Industri Pengolahan	4,52	5,30	7,57	7,78	6,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,54	8,97	4,13	3,15	3,47
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,58	4,08	4,68	2,15	2,58
6	Konstruksi	8,93	6,59	7,69	4,98	3,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	6,79	7,84	7,91	5,46	4,56
8	Transportasi dan Pergudangan	7,83	6,05	7,18	8,45	6,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,61	6,63	7,77	7,28	7,28
10	Informasi dan Komunikasi	8,37	9,11	9,45	8,13	8,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,92	9,15	11,61	7,81	7,52
12	Real Estate	8,99	6,95	7,28	6,76	6,76
13	Jasa Perusahaan	4,24	5,43	7,48	8,41	8,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,60	1,38	1,00	0,78	3,88
15	Jasa Pendidikan	5,70	6,01	6,08	7,71	6,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,64	9,48	6,50	7,87	9,35
17	Jasa Lainnya	4,47	3,21	4,25	5,35	4,28
PDRB		6,79	6,83	7,68	6,62	6,05

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 s/d 2015 Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s/d 2015
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	70,2	76,1	82,0	86,5	92,2	97,9
2	Pertambangan dan Penggalian	1,7	2,0	2,0	2,2	2,3	2,5
3	Industri Pengolahan	1.068,1	1.156,5	1.252,0	1.369,7	1.490,9	1.636,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,8	5,1	5,4	5,4	5,6	6,7

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	15,5	16,5	18,0	19,8	21,1	22,6
6	Konstruksi	396,1	461,1	516,3	568,7	612,5	664,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.446,2	1.660,7	1.839,1	2.095,3	2.296,9	2.530,3
8	Transportasi dan Pergudangan	171,1	190,3	211,5	242,2	280,8	321,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281,3	316,8	346,6	379,6	415,4	464,8
10	Informasi dan Komunikasi	880,5	967,1	1.060,7	1.165,2	1.264,9	1.393,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	507,6	590,3	708,4	827,9	942,4	1.056,6
12	Real Estate	152,7	176,0	193,4	217,1	237,3	274,0
13	Jasa Perusahaan	44,3	47,5	51,1	56,2	61,8	69,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253,4	273,8	288,1	298,0	306,2	329,4
15	Jasa Pendidikan	458,1	511,6	576,3	643,8	725,3	803,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,2	80,6	90,9	101,1	114,2	131,1
17	Jasa Lainnya	259,3	281,3	291,9	311,5	344,4	387,2
PDRB		6.081,2	6.813,4	7.533,6	8.390,4	9.214,2	10.191,7

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2010 s/d 2015 Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 8.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 s/d 2015
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	70,2	70,9	73,1	73,5	74,2	75,4
2	Pertambangan dan Penggalian	1,7	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0
3	Industri Pengolahan	1.068,1	1.115,9	1.174,3	1.262,6	1.360,4	1.448,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,8	5,2	5,7	6,0	6,1	6,4
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	15,5	16,1	16,8	17,5	17,9	18,4
6	Konstruksi	396,1	431,5	459,9	495,3	520,0	539,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.446,2	1.544,3	1.665,4	1.797,1	1.895,3	1.981,7
8	Transportasi dan Pergudangan	171,1	184,4	195,6	209,6	227,4	242,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281,3	308,4	328,8	354,3	380,1	407,8
10	Informasi dan Komunikasi	880,5	954,2	1.041,2	1.139,6	1.232,3	1.332,5

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	507,6	552,9	603,5	673,6	726,2	780,7
12	Real Estate	152,7	166,5	178,0	191,0	203,9	217,7
13	Jasa Perusahaan	44,3	46,1	48,6	523,0	56,7	61,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253,4	262,5	266,1	268,8	270,9	281,4
15	Jasa Pendidikan	458,1	484,3	513,4	544,6	586,6	623,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,2	784,0	85,8	91,4	98,6	107,8
17	Jasa Lainnya	259,3	270,9	279,6	291,5	307,1	320,2
PDRB		6.081,2	6.494,4	6.937,7	7.470,7	7.965,5	8.447,4

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 9.
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 s/d 2015 (%)

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,15	1,12	1,09	1,03	1,00	0,96
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
3	Industri Pengolahan	17,31	16,73	16,39	16,11	15,97	16,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,07
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,26	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22
6	Konstruksi	6,51	6,77	6,85	6,78	6,65	6,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	23,78	24,37	24,41	24,97	24,93	24,83
8	Transportasi dan Pergudangan	2,81	2,79	2,81	2,89	3,05	3,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,63	4,65	4,60	4,52	4,51	4,56
10	Informasi dan Komunikasi	14,48	14,19	14,08	13,89	13,73	13,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,35	8,66	9,40	9,87	10,23	10,37
12	Real Estate	2,51	2,58	2,57	2,59	2,57	2,69
13	Jasa Perusahaan	0,73	0,70	0,68	0,67	0,67	0,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,17	4,02	3,82	3,55	3,32	3,23
15	Jasa Pendidikan	7,53	7,51	7,65	7,67	7,87	7,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,18	1,21	1,20	1,24	1,29
17	Jasa Lainnya	4,26	4,13	3,87	3,71	3,74	3,80
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

PDRB perkapita menurut lapangan usaha sebagai berikut :

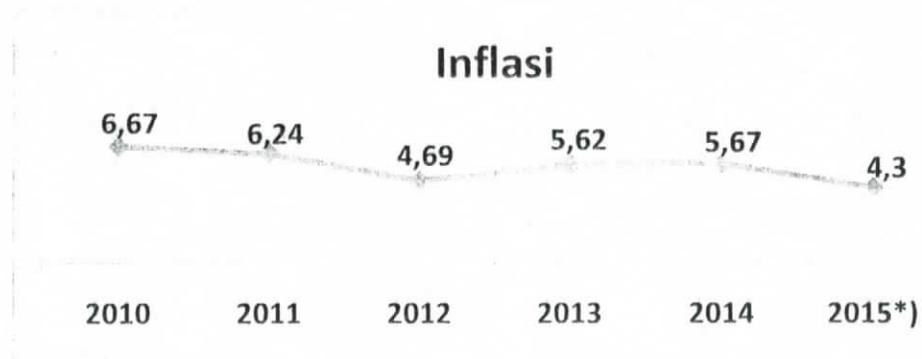
Tabel 2. 10.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.)
Tahun 2010 s/d 2015

No	Uraian	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,41	0,44	0,48	0,50	0,53
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Industri Pengolahan	6,16	6,63	7,17	7,76	8,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12
6	Konstruksi	2,32	2,68	3,00	3,27	3,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	8,46	9,66	10,67	12,03	13,17
8	Transportasi dan Pergudangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,00	1,11	1,23	1,39	1,61
10	Informasi dan Komunikasi	1,65	1,84	2,01	2,18	2,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,15	5,62	6,15	6,69	7,25
12	Real Estate	2,97	3,43	4,11	4,75	5,40
13	Jasa Perusahaan	0,89	1,02	1,12	1,25	1,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,26	0,28	0,30	0,32	0,35
15	Jasa Pendidikan	1,48	1,59	1,67	1,71	1,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,68	2,98	3,34	3,70	4,16
17	Jasa Lainnya	0,41	0,47	0,53	0,58	0,65
PDRB		35,57	39,63	43,71	48,19	52,84

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Lebih detail, inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut.



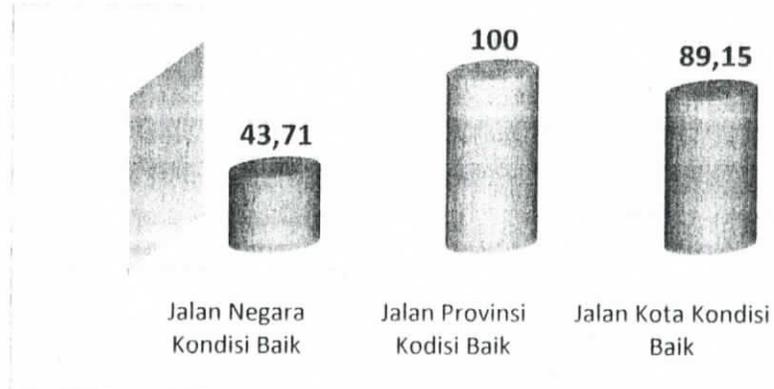
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Gambar 2. 5.
Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2010 s/d 2015 (dalam %)

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun terdiri dari jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota.

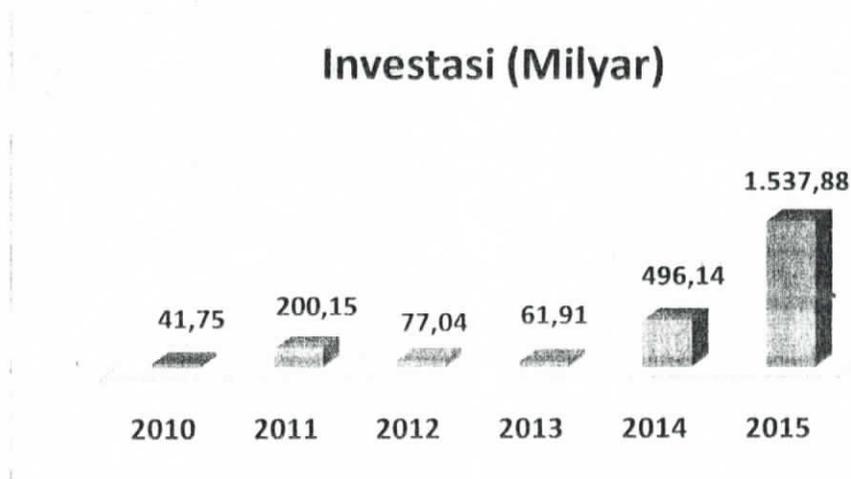


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 2. 6.
Persentase Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kota Madiun Kondisi Baik

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota Madiun saat ini masih berada dalam sub bagian Perangkat Daerah (PD) Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Madiun dan belum memiliki unit kerja tersendiri di Pemerintah Kota Madiun.

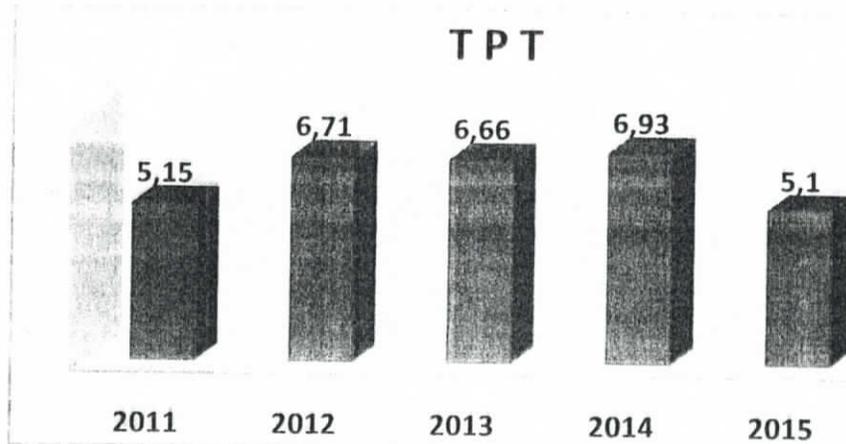


Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 2. 7.
Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2010 – 2015

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 2. 8.
Tren Tingkat pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2011 – 2015

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2. 11.
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2010 s/d 2014

Indeks	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
IPM	75,98	76,48	77,21	78,41	78,81
Indeks Kesehatan	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81
Angka Harapan Hidup	72,23	72,27	72,33	72,38	72,41
Indeks Pendidikan	0,69	0,70	0,70	0,73	0,74
Angka Harapan Lama Sekolah	12,42	12,44	12,56	13,33	13,64
Rata-rata Lama Sekolah	10,32	10,50	10,68	10,86	10,90
Indeks PPP	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82
Daya Beli (Rp)	13.455,16	13.799,03	14.317,08	14.603,96	14.634,42

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

IPM Kota Madiun pada Tahun 2014 mencapai 78,81 atau naik sebesar 0,40 poin dibanding tahun 2013 yang mencapai 78,41. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik.

2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014.

Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan. Tabel 2.12 menampilkan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah Kota Madiun sebagai berikut:

Tabel 2.12.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2015
Kota Madiun

Urusan	Indikator RPJMD Tahun 2014 - 2019	Jenjang/ Jenis	Target Capaian Kinerja RPJMD akhir periode (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			Target Kinerja 2016	Target Kinerja 2017	SKPD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10
PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK)	PAUD	100%	100%	73%	73%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
		TK							
	Angka Partisipasi Murni (APM)	SD/ MI/ Paket A	100%	100%	93,5	93,50%	100%	100%	
		SMP/MTs/ Paket B							
		SMA/SMK	100%	100%	100,01	100%	100%	100%	
	Angka Melek Huruf		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengolahan Data Base Informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional		13271	2171	2025	93%	2221	2221		
KESEHATAN	Prosentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart		100%	100%	99,70%	99,70%	100%	100%	
	Prosentase TTU dan TPM sehat		85%	81%	87,56%	108%	82%	83%	

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10
	Prosentase Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber-sumber air yang berfungsi dengan layak dan Baik		100%	100%	94,46%	94,46%	100%	100%	
	Prosentase Masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan		100%	100%	183,34%	183%	100%	100%	
	Hasil Penilaian memenuhi passing grade yang ditetapkan Tim Penilai Adipura		Ya	YA	YA	100%	YA	Ya	
	Ruang Terbuka Hijau Kondisi Baik		56,10 Ha	52,37 Ha	53,2 Ha	102%	53,3 Ha	54,2 Ha	
	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PEKERJAAN UMUM	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik		90	87,50%	89,15%	102%	88%	88,7	Dinas Pekerjaan Umum
	Jumlah ruas jalan yang diusulkan Pemeliharaannya		200	30	100%	100%	35	40	
	Persentase tersedianya Informasi Data Base Jalan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Rasio Panjang jalan kota dalam kondisi baik		100%	100%	89,15%	89,15%	100%	100%	
	Persentase Kualitas Pelayanan Jasa Konstruksi Berdasarkan SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Rasio Tercukupinya Sarpras Sesuai dengan Kebutuhan		100%	-	20%	20%	20%	20%	
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi		95,50%	93%	99,20%	106%	94%	94,50%	

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya		77	2	5	250%	3	15	
PERUMAHAN	Rasio tempat pemakaman umum yang dikelola		2,56%	1,28%	1,28%	100,00%	1,28%	2,56%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Rasio rumah layak huni		96,50%	95%	99,80%	104,00%	95%	95,50%	Dinas Pekerjaan Umum
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah kegiatan kepemudaan		3 bh	3 bh	3 bh	100%	3 bh	3 bh	Bagian Administrasi Perekonomian Sosial Sekretariat Daerah
	Jumlah Prestasi Olah Raga tingkat Regional dan Nasional		25	5	1	20%	5	5	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah Kegiatan Olahraga		2 bh	2 bh	2 bh	100%	2 bh	2 bh	Bagian Administrasi Perekonomian Sosial Sekretariat Daerah dan Kecamatan
	Jumlah Peserta Olahraga		19.000	18.200	27.000	148%	18.400	18.600	
	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak		100%	50%	100%	200%	60%	70%	Dinas Pekerjaan Umum
PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		361 M	265 M	1.538 M	580%	287 M	310	Bagian Administrasi Perekonomian Sosial Sekretariat Daerah
	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN		100%	100%	77,81%	77,81%	100%	100%	
KOPERASI DAN UKM	Cakupan Bina UKM		3,08%	2,26%	2,64%	116%	2,46%	2,66%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
	Jumlah Koperasi Aktif		317	287	289	100,70%	295	303	
	Jumlah Promosi KUMKM		9 kali	11 kali	12 kali	109%	10 kali	10 kali	
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Regulasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10
	Jumlah Media Elektronik Milik Pemerintah Kota		1	1	1	100%	1	1	Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
STATISTIK	Dokumen Statistik Daerah yang Tersusun		10	2	2	100%	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERTANAHAN	Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah		40 ijin	8	9	113%	8	8	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat		10%	10%	7%	70%	10%	10%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban		868 Orang	868 orang	1238	143%	868 orang	868 orang	3 Kecamatan
	Prosentase parpol yang memahami regulasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Konflik Horizontal di dalam masyarakat		0	0	0	100%	0	0	
	Jumlah Kemitraan dengan elemen masyarakat		9	9	9	100%	9	9	
OTONOMI DAERAH	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bidang Pemerintahan		236 kali	48 kali	51 Kali	106%	47 kali	47 kali	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat daerah
	Persentase entitas yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja dengan baik		84%	80%	74,75%	93%	80%	82%	Inspektorat
	Jumlah pedoman dan prosedur kerja ketatalaksanaan		67 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	64 dokumen	1 dokumen	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10
	Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		6	1,8	1,3	72%	2,4	3,6	
	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota		66	47	40	85%	52	57	
	Cakupan Patroli Petugas SATUAN POLISI PAMONG PRAJA perhari		41 kali	6	6	100%	6	6	
	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan		97%	90%	81,97%	91%	90%	93%	Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Landasan Hukum		100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Kelompok User yang Memanfaatkan Teknologi Informasi		3 (tiga)	3	3	100%	3	3 (tiga)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan		15	13	30,07	231%	13,5	14	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		100%	100%	70%	70%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Rasio Izin yang diterbitkan		95%	91%	97%	107%	92%	93%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	Jumlah Penataan Pegawai yang Terealisasi		100%	100%	82%	82%	100%	100%	Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10
	Persentase Perda yang disahkan tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Prosentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map RB		100%	20%	20%	100%	40%	60%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah LPMK Aktif		31	31	27	87%	31	31	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
	Jumlah LKK Sehat		27	26	26	100%	27	27	
	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	3 Kecamatan
	Jumlah Posyandu Balita		270	270	270	100%	270	270	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	3 Kecamatan
SOSIAL	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		1600	1600	4529	283%	1600	1600	Bagian Administrasi Perekonomian Sosial Sekretariat Daerah dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
	PMKS yang memperoleh bantuan		824	824	2057	249%	824	824	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi		10 panti	10 panti	10 panti	100%	10 panti	10 panti	
BUDAYA	Seni Budaya Lokal yang dikompetisikan		35 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	8 Paket	12 paket	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah Penonton dalam Pentas Seni		4.300	4.300	4.958	115%	3.700	3.900	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah Budaya Lokal yang dilestarikan		25 paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 paket	
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		100%	100%	98,06%	98%	100%	100%	
	Jumlah Group Kesenian		1 group	1 group	1 group	100%	1 group	1 group	Bagian Administrasi Perekonomian Sosial Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah Budaya Lokal yang dipentaskan		60 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	5 paket	
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		100%	100%	98,27%	98,00%	100%	100%	
KEARSIPAN	Prosentase Arsip di Depo yang masuk data base		100%	-	0	0%	100%	-	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
	Prosentase Arsip yang diselamatkan		38% (55 unit)	32% (47 unit)	32 % (47 Unit)	100%	34% (49 unit)	35% (51 unit)	
	Prosentase Pengelola Arsip yang mempunyai Kompetensi		60% 91165 org)	18,6% (365 org)	18,6 % (365 orang)	100%	29% (565 org)	39% (765 org)	
	Prosentase arsip yang terpelihara		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PERPUSTAKAAN	Prosentase Pengunjung Perpustakaan		15% (26.600 org)	14,2% (25.200 org)	14, 59% (26124 org)	103%	14.4% (25.550 org)	14,6% (25.900 org)	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10
	Persentase Pemenuhan Sarpras Perpustakaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PERTANIAN	Jumlah kelompok petani		49 kel. Tani	2 kel.tani	2 kel.tani	100%	3 kel.tani	10 kel. Tani	Dinas Pertanian
	Jumlah Produk Pertanian dan Olahan yang dipasarkan		5	5	9	180%	5	5	
	Produksi Padi per Hektar		7,3 ton/ha	6,82 ton/ha	7,38 ton/ha	108%	6,94 ton/ha	7,06 ton/ha	
	Rata-rata Peningkatan Pendapatan Petani Per Hektar		6.332.228	5.850.000	19.581.000	334%	5.967.000	6.086.340	
	jumlah hewan ternak yang dipotong per tahun		645	625	395	63%	630	635	
	Jumlah SDM Peternakan (Peternak, Pedagang Daging & Susu)		120	60	57	95%	120	120	
	Jumlah daging Ternak		1.900 ton	1.200 ton	1.278,82 ton	106%	1.300 ton	1.500 ton	
	jumlah populasi ternak Kota Madiun yang mendapatkan pengobatan		1.010	575	3,38	587%	700	756	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi perikanan		311 ton	144 ton	229,47 ton	159%	174,6 ton	
Konsumsi Ikan			100%	100%	14,2 kg/kap/th	0%	100%	100%	
Jumlah SDM (Petani Ikan)			200	80 orang	80	100%	160 orang	175	
INDUSTRI	Frekuensi Pemeriksaan Kadar tar dan nikotin dalam satu Tahun		4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
	Jumlah IKM dan IRT		295	271	130	48%	277	283	
PERDAGANGAN	Ekspor Bersih Perdagangan		1 komoditi	1 Komoditi	5%	0%	1 Komoditi	1 komoditi	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10
	Jumlah Barang Kena Cukai ilegal yang dimonitor		1 jenis	1 jenis	4 jenis	400%	1 jenis	1 jenis	Koperasi dan Pariwisata
	Jumlah Komoditi yang dipamerkan		17 jenis	12 Jenis	12 jenis	100%	13 Jenis	13 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
	Cakupan PKL yang dibina		75%	72,50%	72,50%	100,00%	75%	75%	
	Jumlah Pasar tradisional yang dikelola		17 Pasar	17 Pasar	17 Pasar	100%	17 Pasar	17 Pasar	Dinas Pasar
	Cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal		75%	72,50%	82,78%	114%	75%	75%	Bagian Administrasi Perekonomian Sosial Sekretariat Daerah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
PARIWISATA	Jumlah Event Kepariwisataan		3 kali	3 Kali	4 Kali	133%	3 Kali	3 kali	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
	Jumlah Promosi Pariwisata		3 kali	3 Kali	5 Kali	166%	3 Kali	3 kali	
KEHUTANAN	Luas Areal Lahan Penghijauan		31 ha	5 ha	0	0%	6,5 ha	6,5 ha	Dinas Pertanian
	Jumlah Industri yang dibina		20	3	0	0%	10	15	
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang ESDM		2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
TRANSMIGRASI	Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja		5 paket	1 paket	2 paket	200%	1 paket	1 paket	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

1) Lingkungan eksternal (Global)

- a. **Pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia cenderung melemah**
 - ❖ Amerika Serikat melemah dari 2,7% menjadi 2,0%;
 - ❖ Tiongkok melambat dari 7% menjadi 6,9%;
 - ❖ Singapura melemah dari 1,7% menjadi 1,4%;
- b. **Perekonomian global sampai triwulan III Tahun 2015 masih cenderung melambat;**
 - ❖ Negara-negara berkembang terus mengalami perlambatan;
 - ❖ Sedangkan negara-negara maju sedikit mengalami peningkatan;
- c. **Perlambatan ekonomi di negara-negara berkembang utamanya disebabkan oleh;**
 - ❖ Prospek ekonomi yang diperkirakan masih terus melambat;
 - ❖ Harga-harga komoditas yang mengalami penurunan;
 - ❖ Berkurangnya *capital inflow* dan tekanan terhadap matauangnya;
 - ❖ Bergejolaknya pasar keuangan;
 - ❖ Meningkatnya resiko ekonomi ke depan;

Mayoritas negara di dunia saat ini mulai menurunkan suku bunga untuk menggerakkan perekonomiannya

2). Lingkungan Internal (Nasional)

Pertama, Pada Tahun 2015 ini di kuartal terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak akan terlalu bagus. Tentu diharapkan pada kuartal empat pertumbuhannya bisa lebih sedikit, tapi walaupun lebih, tidak akan bisa mencapai 5%, mungkin di angka 4,8% - 4,9%, sehingga sepanjang Tahun 2015 pertumbuhannya mungkin hanya di 4,7% lebih sedikit. Tahun depan APBN menggariskan pertumbuhan 5,3%, hal itu bisa dipakai apabila investasinya berjalan lebih baik di Tahun depan; infrastruktur, industri dan ekspornya juga bisa jalan. Apabila hal tersebut terjadi, maka 5,3% itu bisa dicapai.

Untuk ke depan sebetulnya ekonomi Indonesia memang belum membaik benar, neraca perdagangannya, tapi perdagangannya mulai defisit lagi. Hal ini terjadi Karena tidak cukup menghasilkan bahan baku dan barang modal. Berbicara tentang bahan baku dan barang modal, yang paling besar di dalam impor kita sebetulnya ada di tiga kelompok besar. Yaitu pertama kelompok petrokimia, kedua kelompok besi dan baja dan yang ketiga kelompok kimia dan farmasi. Orang bijak mestinya tahu bahwa hal itu penting, harus dikembangkan. Oleh sebab itu, pemerintah memang mencoba mendorong dengan sungguh-sungguh perkembangan tiga kelompok industri yang besar ini. Terdapat hal yang sebetulnya menarik perhatian, yaitu pengeluaran untuk BPJS khususnya jaminan kesehatan yang cukup besar setiap tahun. Padahal kebutuhan kita akan farmasi, hasil farmasi dan alat kesehatan, obat dan alat kesehatan 90% masih impor. Sebenarnya kalau pengeluaran di bidang itu terbanyak, maka didorong supaya industrinya berkembang dan tidak impor terus.

Kedua, Beberapa indikator makro ekonomi nasional dalam RAPBN Perubahan 2016 menunjukkan hal yang optimis ditengah kondisi global yang masih belum stabil. Beberapa indikator ekonomi Tahun 2016 yang diharapkan sesuai dengan prediksi antara lain pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% - 6,6%, inflasi diperkirakan mencapai 3% - 3,5%, suku bunga acuan (SPN 3 bulan) diperkirakan pada kisaran 4% - 6%, lifting minyak diperkirakan mencapai 830.000 – 850.000 barel per hari, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan pada kisaran Rp 12.700 – Rp. 13.100 per US Dollar.

Ketiga, Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokratisasi, serta penegakkan hukum dan kepastian usaha;
2. Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional;
3. Meningkatkan investasi di sektor properti;

Dari paket kebijakan tersebut dapat diturunkan sepuluh turunan paket kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan pembiayaan ekspor melalui National Interest Account;
- b. Penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri;
- c. Pengembangan kawasan industri;
- d. Memperkuat fungsi ekonomi koperasi;
- e. Simplifikasi perizinan perdagangan;
- f. Simplifikasi Visa Kunjungan dan aturan pariwisata;
- g. Kebijakan elpiji untuk nelayan;
- h. Stabilitas harga komoditi pangan khususnya daging sapi;
- i. Percepatan pencairan dana desa;
- j. Pemberian Raskin atau beras kesejahteraan untuk bulan ke 13 dan ke 14;

3) Lingkungan Internal (Provinsi)

- ❖ Secara makro, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di dorong oleh 3 katagori utama, yaitu :

1. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Kategori Industri Pengolahan
3. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

Disamping itu terbukanya ekonomi terhadap investasi asing, SDA yang besar dan perkembangan perdagangan antar provinsi dan luar negeri ikut mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Selama periode Tahun 2012-2014 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur meningkat rata-rata 6,19% pertahun, yaitu dari 6,64% di Tahun 2012, sedikit melambat di Tahun 2013 menjadi sebesar 6,08%, selanjutnya pada Tahun 2014 tumbuh sebesar 5,86%, dan secara akumulatif triwulan III Tahun 2015 (Januari-September 2015) mencapai 5,30%. Dalam periode yang sama PDRB perkapita meningkat lebih dari 1,22 kali lipat dari Rp.32,77 juta di Tahun 2012 menjadi Rp.36,04 juta di Tahun 2013, dan naik lagi menjadi Rp.39,90 juta pada Tahun 2014.

- ❖ Jawa Timur letaknya sangat strategis, di perlintasan Barat dan Timur Indonesia, dan didukung oleh SDA yang berlimpah, sehingga mampu menjadi pasar untuk melayani permintaan Indonesia Bagian Timur. Jumlah penduduk yang besar (terbesar ke 2 setelah Jawa Barat) juga menjadi salah satu faktor produksi utama di industri padat karya seperti industri rokok, industri tekstil, industri sepatu dan alas kaki, dan industri makanan dan minuman.

Tabel. 2. 13.
Permasalahan Daerah

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
1	Tingginya Suku bunga acuan Bank Indonesia	Tingginya suku bunga bank	Ketidakpastian kenaikan suku bunga the federal
2	Tabungan Menurun, penjualan otomotif dan ritel menurun	Depresiasi Rupiah yang cukup tajam karena adanya sentimen pasar	Pelemahan Nilai Rupiah
3	Porsi yang dibelanjakan baik untuk produksi maupun konsumsi turun	Investasi swasta non bangunan masih melemah didorong oleh ketidakpastian penentuan suku bungan the fed yang berimbas pada terbatasnya capital inflows, serta berakhirnya masa panen serrta fenomena elnino berpengaruh pada perlambatan kinerja sektor pertanian	Penurunan Harga Minyak dunia
4	Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pemberlakuan masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai 2015 maka diperlukan daya saing daerah	Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan
5	Transformasi Struktur Industri		Melepaskan Indonesia dari jerat negara berpendapatan menengah (Middle-income trap)
6	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja		Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community)
7	Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional		
8	Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi		
9	Pembangunan transportasi massal perkotaan		
10	Peningkatan Ketahanan Energi		
11	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		
12	Perkuatan Ketahanan Pangan		

4) **Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Tabel. 2. 14
Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
1.	Pendidikan	<p>a. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) dan SMP (DAK) tahun 2014 belum dilaksanakan semua karena juknis sering mengalami perubahan.</p> <p>b. Dengan diimplementasikan UU no. 23 Tahun 2014, maka pendidikan menengah akan diambil alih oleh Provinsi, berkaitan dengan perencanaan dan penganggarannya apakah kabupaten/kota masih harus menganggarkan untuk program kegiatan di pendidikan menengah</p> <p>c. Penyaluran DAK Non Fisik yaitu tunjangan profesi pendidik, tunjangan fungsional guru Non PNS, subsidi kualifikasi S.1, tunjangan kinerja guru PAUD (dana dekonsentrasi) masih mengalami kendala pada proses pencairan dikarenakan kewenangan proses pencairan ada pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>a. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) dan Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SMP (DAK) tahun 2013 yang belum terserap dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2015 dengan mengacu pada aturan yang berlaku tetap belum bisa dilaksanakan di tahun 2015 dikarenakan regulasi yang belum jelas, telah dikonsultasikan langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk peruntukannya di tahun 2016.</p> <p>b. Mengusulkan pengadaan komputer beserta perlengkapannya pada tahun anggaran 2016 untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer tahun pejararan berikutnya.</p> <p>c. Berkenaan dengan proses pencairan tunjangan profesi guru senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Bank terkait.</p> <p>d. Mengalihkan guru mata pelajaran bahasa Inggris SD dan guru kelas TK menjadi guru kelas SD, mengalihkan guru kelas TK yang mempunyai ijazah S.Pdi atau S.Ag menjadi guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan juga melakukan penataan tugas tambahan bagi guru Pendidikan Agama Kristen mengajar di beberapa sekolah.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>e. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan sekolah, koordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi, dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak pihak terkait lainnya agar dalam persiapan pengalihan kewenangan SMA dan SMK sesuai dengan prosedur dan target waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>f. Meninventarisasi dan menghibau lembaga PAUD dan sekolah swasta untuk segera mengurus SK Kemenkum HAM.</p> <p>g. Perlu segera adanya Penilik Pendidikan Non Formal.</p>
2.	Kesehatan	<p>DINAS KESEHATAN</p> <p>a. Adanya kebutuhan data dan informasi yang semakin tinggi serta indikator capaian kinerja yang semakin detail menuntut validitas dan akurasi yang tinggi, sehingga dibutuhkan sarana prasarana baik berupa software, hardware maupun brainware yang baik.</p> <p>b. Rasio tenaga kesehatan yang belum memenuhi target rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk</p> <p>RSUD</p> <p>a. RSUD Kota Madiun sedang dalam persiapan bangunan fisik Rumah Sakit sesuai standart Rumah Sakit, yang perlu dibarengi dengan persiapan sarana dan prasarana khususnya peralatan medis dan non medis, sarana gedung pelayanan dan perawatan, sarana prasarana kantor serta Sumber Daya Manusia menuju Rumah Sakit type B.</p>	<p>DINAS KESEHATAN</p> <p>a. Pelaksanaan IKM di Puskesmas menyesuaikan dengan indikator dan segera memenuhi indikator baru yang sebelumnya tidak ada yaitu indikator keberadaan maklumat pelayanan, serta dalam pelaksanaan survei melibatkan pihak ketiga.</p> <p>b. Meningkatkan pelayanan status Puskesmas menjadi BLUD serta standart pelayanannya ter akreditasi.</p> <p>RSUD</p> <p>a. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</p> <p>b. Menginventarisir regulasi tentang infrastruktur penerapan BLUD yang belum ada untuk segera dibuat melalui kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan dan ditindak lanjuti dengan membuat SOP sesuai peraturan yang ada.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>b. Angka pemanfaatan Tempat Tidur Rumah Sakit untuk kelas III pada tahun 2013 masih diatas standar yaitu BOR=89,4 % sehingga angka ini tidak ideal serta tidak efisien (BOR ideal = 65 – 80%) dan akan meningkatkan risiko infeksi nosokomial bagi pasien.</p> <p>c. Masih belum idealnya rasio tenaga medis dan paramedis mengakibatkan tingginya beban kerja perawat dan dokter yang akan mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan serta berkurangnya kepuasan pasien.</p> <p>d. Persaingan antar pemberi pelayanan kesehatan semakin tinggi sehingga untuk dapat berkembang dan dapat bersaing dengan pemberi jasa layanan kesehatan yang lain, pihak Manajemen RSUD Kota Madiun harus selalu berinovasi dan melakukan diferensiasi jenis pelayanan agar keunggulan pelayanan dapat menarik minat masyarakat pengguna jasa.</p> <p>e. Sumber Daya di RSUD Kota Madiun dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Type C, masih kurang.</p>	<p>c. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai Standart Pelayanan Rumah Sakit type C melalui program dan kegiatan yang ada.</p> <p>d. Memenuhi kekurangan Sumber Daya Manusia, baik jumlah maupun jenis tenaganya terutama untuk tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum dan tenaga fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedis melalui beberapa cara yaitu melaksanakan rekrutmen pegawai non PNS BLUD, mengusulkan rekrutmen PNS, dan menerima mutasi pegawai dari luar RSUD serta kesempatan ijin belajar bagi Dokter Umum untuk melanjutkan pendidikan Dokter Spesialis sesuai kebutuhan RSUD Kota Madiun.</p> <p>e. Menjadikan nilai dan budaya organisasi sebagaidasar dalam memberikan pelayananserta meningkatkan kedisiplinan, kemampuan dan komitmen seluruh SDM untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga mampu bersaing dalam mengatasi tuntutan pelayanan kesehatan denganmeningkatkan kompetensinya melalui program pendidikan dan pelatihan.</p> <p>f. Mendorong dan menumbuhkan gagasan dan langkah-langkah inovatif di kalangan manajemen maupun operasional agar perspektif bisnis internal rumah sakitsecara berkelanjutan terus mengalami kemajuan melalui program pendidikan dan pelatihan serta kegiatan studi banding.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>g. Melakukan koordinasi antar bidang dan lintas sektor serta evaluasi kinerja secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kota Madiun dengan stake holder melalui kegiatan pertemuan, brainstorming dan audit</p>
3.	Lingkungan Hidup	<p>DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</p> <p>a. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dengan metode 3 R (Reduce, Reuse and Recycle). Hal ini disebabkan karena masyarakat masih berpola pikir bahwa pengelolaan sampah/kebersihan masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Madiun.</p> <p>b. Tidak seimbangnya antara kenaikan volume sampah organik yang diangkut ke TPA Winongo dengan lama waktu proses pengomposan dan jumlah tenaga pemroses kompos.</p> <p>c. Banyaknya warga yang belum mengerti arti pohon lindung sehingga melakukan penebangan pohon secara illegal</p> <p>d. Banyaknya warga yang memasang PJU secara swadaya tanpa melalui ijin ke Pemerintah Kota Madiun sehingga menjadi PJU illegal dan masih adanya warga masyarakat yang secara sengaja merusak lampu taman kota.</p> <p>e. Perlunya penataan PJU melalui jaringan resmi PJU secara bertahap.</p>	<p>DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</p> <p>a. Menambah frekwensi kegiatan sosialisasi UU no. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta UU no.81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga,</p> <p>b. Melaksanakan program rintisan dan pemicuan tentang pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya dengan metode 3R serta mendorong berkembangnya bank sampah- bank sampah di masyarakat,</p> <p>c. Pembuatan papan himbauan</p> <p>d. Penertiban jaringan PJU (penerangan jalan umum) bekerjasama dengan intansi terkait (PLN)</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>a. Masih banyak usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/ atau usaha/ kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan, sehingga menghambat proses pengendalian dan pengelolaan lingkungan;</p> <p>b. Masih banyak usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan B3 dan limbah B3;</p> <p>c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;</p> <p>d. Semakin kompleks dan berkembangnya permasalahan lingkungan yang diakibatkan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor;</p> <p>e. Kurangnya pemahaman anak-anak didik sekolah terhadap pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>a. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk wajib menyusun dokumen lingkungan hidup serta membuat laporan pemantauan secara kontinyu bagi usaha/kegiatan yang dilakukan ;</p> <p>b. Memberikan pemahaman baik lisan maupun tulisan kepada pelaku usaha/kegiatan yang menyimpan B3 dan mengelola limbah B3 untuk membuat dokumen perijinan tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang menyimpan B3 dan mengelola limbah B3 ;</p> <p>c. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan terutama yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan ;</p> <p>d. Perlu adanya data dan informasi tentang lingkungan hidup melalui kegiatan laporan kualitas lingkungan (SLHD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pencegahan pencemaran air, pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dan pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa secara berkelanjutan ;</p> <p>e. Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang lingkungan hidup secara kualitas dan kuantitas kepada anak-anak didik sekolah melalui kegiatan Adiwiyata secara berkelanjutan.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
4.	Pekerjaan Umum	<p>DINAS PEKERJAAN UMUM</p> <p>Secara umum program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun pada saat Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) terdapat Kegiatan baru yang pada waktu proses pengadaan tidak ada penyedia jasa yang menawar, kegiatan tersebut antara Lain : kegiatan DED Pembangunan Pujasera Sumber Umis, Kegiatan Pembangunan Lapangan Olah Raga, Kegiatan DED Pembangunan Kolam Renang Indoor dan Lapangan Bola Volley (Eks. Kantor Kesbangpol) dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong.</p>	<p>DINAS PEKERJAAN UMUM</p> <p>a. Anggaran dikembalikan ke Kas Daerah.</p> <p>b. Dianggarkan kembali pada tahun 2016 sesuai dengan prioritas.</p>
5.	Tata Ruang	<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM</p> <p>a. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun yang belum mencapai kondisi ideal. Saat ini luasan Ruang Terbuka Hijau baru mencapai lebih kurang 12,56% dari persyaratan yang ditetapkan yaitu 30% dari luasan kota. Selain itu sebagian dari ruang terbuka hijau di Kota Madiun kurang terawat serta kurang maksimal dalam hal pemanfaatannya sebagai pembentuk citra kota.</p> <p>b. Masih adanya ketimpangan tingkat perkembangan di wilayah Kota Madiun, dengan konsentrasi yang berada di pusat kota. Karena kepadatan pusat kota yang semakin tinggi sehingga terbentuk pola linier yang memusat di sepanjang jalan utama</p>	<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM</p> <p>a. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian yang dilakukan Dinas terkait kepada masyarakat.</p> <p>b. Menertibkan bangunan di atas fasilitas umum dengan selektif, dan pemberlakuan secara prioritas yaitu bangunan di wilayah jalan protokol dan berada di atas daerah milik jalan</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>dengan berbagai fasilitas dan jenis kegiatan yang lebih beragam antara lain perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, kesehatan, perumahan serta industri yang mengakibatkan pergerakan penduduk cenderung lebih dominan di sepanjang jalan-jalan utama.</p>	
6.	Perencanaan Pembangunan	<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Surat penetapan besarnya dana perimbangan baru diterbitkan pada saat sudah memasuki triwulan terakhir tahun berjalan, sehingga sudah melewati batas waktu penyampaian KUA dan PPAS. Hal ini mengakibatkan kurang akuratnya data dan asumsi yang dipergunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya.</p>	<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Pada Tahun 2015 hampir seratus persen terealisasi untuk penyerapan alokasi anggaran, sehingga tidak perlu adanya solusi yang signifikan mengingat pagu anggaran yang tidak terserap terdapat pada kode rekening tertentu karena menyesuaikan peraturan yang berlaku sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran</p>
7.	Perumahan	<p>DINAS PEKERJAAN UMUM Secara umum pelaksanaan urusan perumahan dapat dilaksanakan dengan baik melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun demikian dari tahun ke tahun sasaran RTLH ini masih terus ada sehingga sampai saat ini belum dapat diselesaikan 100%.</p>	<p>DINAS PEKERJAAN UMUM a. Meningkatkan koordinasi b. Ikut memfasilitasi penerima bantuan agar mematuhi aturan hukum yang berlaku</p>
8.	Kepemudaan dan Olah Raga	<p>DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kurangnya pelatih di masing-masing cabang olahraga.</p>	<p>DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Membuat program pelatihan yang komprehensif bagi para atlet yang berprestasi</p>
9.	Penanaman modal	<p>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL Pelayanan penanaman modal di Kota Madiun belum dapat dilaksanakan secara optimal karena Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</p>	<p>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL Pembentukan lembaga PTSP, sehingga pelayanan lebih efisien</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>belum terealisasi dalam satu unit lembaga penanaman modal. PTSP dilaksanakan untuk menyederhanakan prosedur perijinan, percepatan waktu proses penerbitan perijinan, kesamaan cara penilaian permohonan, kesamaan produk perijinan yang diterbitkan.</p>	
10.	<p>Perkoperasian dan UKM</p>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA</p> <p>Masih adanya koperasi yang belum sesuai jati diri (belum sesuai prinsip koperasi) karena masih dijumpai koperasi yang mengenakan jasa tinggi dan mengenakan denda kepada anggota telat membayar dan sebagian koperasi tidak melakukan Rapat Anggota, baik Rapat Anggota Rencana Kerja maupun Rapat Laporan Pertanggungjawaban Pengurus/ Pengawas kepada Anggota setiap tahun.</p>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA</p> <p>Meningkatkan SDM dan profesionalitas pengurus koperasi sehingga tujuan dari pendirian koperasi bisa tercapai.</p>
11.	<p>Kependudukan dan Catatan Sipil</p>	<p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>a. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan.</p> <p>b. Prosedur yang mahal untuk akte kelahiran terlambat.</p> <p>c. Data Base yang ada sangat dinamis, selalu berubah setiap saat sesuai dengan hasil pelayanan pendaftaran penduduk belum sepenuhnya 100% valid karena masih banyak peristiwa kematian yang belum didaftarkan ke Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Madiun.</p>	<p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP Elektronik, dan Akta-akta Pencatatan Sipil) melalui kegiatan sosialisasi.</p> <p>b. Penduduk yang memiliki KTP telah habis masa berlakunya diharapkan segera mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>c. Setiap data yang diambil/ direkam dari database selalu dicantumkan tanggal data tersebut direkam dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa semua peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>d. Aplikasi program SIAK belum sempurna, SIAK belum bisa Online ke semua daerah di Indonesia karena belum semua daerah menggunakan SIAK dalam pelayanan Administrasi kependudukan.</p> <p>e. Adanya keterlambatan pada program e-KTP yang disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah alat rekam yang semula direncanakan oleh Pemerintah Pusat sejumlah 12 unit untuk 3 Kecamatan di Kota Madiun hanya terealisasi 6 unit. 2. Keterlambatan pengiriman alat dari pusat yang semula direncanakan pada awal bulan Juli sampai dengan Agustus 2011 realisasi penerimaan alat pada akhir bulan September 2011 sehingga pelaksanaan pelayanan perekaman e-KTP baru dimulai pada tanggal 10 Oktober 2011. <p>f. Keterlambatan pengiriman e-KTP yang sudah jadi, jumlah penduduk yang melakukan perekaman e-KTP sampai dengan bulan Desember 2012 sejumlah 115.896 jiwa yang sudah jadi dikirim ke Kota Madiun sejumlah 106.982 keping atau 92,30% dan sampai dengan akhir September 2013 penduduk yang telah melakukan perekaman sejumlah 121.459 jiwa yang sudah jadi dikirim ke Kota madiun sejumlah 118.549 keping atau 97,60%.</p>	<p>d. Diadakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Adminduk Depdagri dan mengusulkan untuk penyempurnaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
12.	Ketenagakerjaan	<p>DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL</p> <p>a. Pelaksanaan UMK belum sepenuhnya dipenuhi perusahaan kepada pekerja sekitar 50%;</p> <p>b. Permasalahan PHK, perusahaan masih berat memberikan pesangon sesuai UU No. 13 Tahun 2003, Perusahaan hanya mampu memberikan kebijakan pesangon sesuai dengan kemampuan perusahaan.</p>	<p>DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL</p> <p>Perlu adanya sosialisasi yang berkaitan UMK, dan pesangon sehingga diharapkan perusahaan bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan regulasi.</p>
13.	Ketahanan Pangan	<p>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN</p> <p>Luas areal lahan pertanian banyak berubah menjadi non pertanian, sehingga produksi pertanian yang dihasilkan tidak mencukupi dengan kebutuhan pangan penduduk kota.</p>	<p>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN</p> <p>a. Pemanfaatan lain pekarangan yang ada dengan program P2KP, KRPL, Mandiri Pangan dan Sosialisasikan perubahan pola makan non beras serta diversifikasi pangan;</p> <p>b. Pemasokan kebutuhan pangan dari daerah sekitar , karena Kota Madiun merupakan pusat perdagangan untuk daerah sekitarnya.</p> <p>c. Pelaksanaan program Raskin dan Raskinda untuk warga miskin.</p> <p>d. Program peningkatan produk tanaman padi per satuan areal (Intensifikasi) dengan model : SRI,SL-PTT, Uji varietas serta pemberian bahan organik</p>
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	<p>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN</p> <p>Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang telah dibentuk di Kota Madiun untuk melayani dan membantu penyelesaian permasalahan perlindungan perempuan dan anak, oleh masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal, dan dalam</p>	<p>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN</p> <p>a. Masih perlunya sosialisasi tentang gender/ kesetaraan gender baik kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan PUG;</p> <p>b. Perlunya pendampingan kepada korban tindak kekerasan</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		pelaksanaan tugas PPT sedikit terkendala operasionalnya dikarenakan pihak-pihak terkait belum menjadi satu lokasi (terpadu) sehingga dalam penanganan kasus korban kekerasan kurang efektif dan efisien.	
15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN a. Sulitnya regenerasi untuk kader Keluarga Berencana/KB. b. Adanya hambatan pelayanan Program Keluarga Berencana karena adanya aturan BPJS	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN a. Biar pelayanan Keluarga Berencana tetap berjalan dengan menggunakan anggaran dari APBD
16.	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Adanya bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang tidak masuk terminal, sehingga menyebabkan PAD dari retribusi terminal menurun; b. Berkurangnya animo masyarakat yang naik Kendaraan Umum ; c. Sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi teknis di bidang perhubungan masih kurang.	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Perhubungan
17.	Komunikasi dan Informatika	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu Media Komunikasi dan massa yang dimiliki dan dimanfaatkan Pemerintah Kota Madiun untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat masih belum terlaksana secara optimal. Pentingnya KIM sebagai	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Perlu penataan kelembagaan khususnya penanganan kewenangan urusan kominfo, yaitu diusulkan untuk menjadi satu SKPD yang menangani

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>wadah masyarakat untuk membantu menginformasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota, belum dipahami dengan baik oleh masyarakat.</p>	
18.	Pertanahan	<p>BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>a. Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pertanahan masih menemui kendala disinkronisasi norma horizontal antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.</p> <p>b. Sampai saat ini pemerintah masih mempertahankan Badan Pertanahan Nasional di daerah sebagai instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan baik nasional, regional maupun sektoral dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.</p>	<p>BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>Kewenangan urusan pertanahan sepenuhnya harus diserahkan ke daerah.</p>
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<p>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p>Kesadaran organisasi kemasyarakatan (Orkesmas), Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) keterkaitan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terkendala Orkesmas/LSM dalam mengumpulkan</p>	<p>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p>Meningkatkan kesadaran dan pemahaman Orkesmas, LSM yang berkaitan dengan SKT.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>dokumen, ada sebagian yang belum disertai NPWP.</p> <p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p>Jumlah kasus pelanggaran Perda yang semakin meningkat.</p>	<p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p>Meningkatkan sosialisasi perda, sehingga tingkat pelanggaran perda bisa dikurangi.</p>
20.	Otonomi Daerah	<p>PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>Masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>PELAYANAN LEGISLATIF</p> <p>Tidak terdapat permasalahan yang berarti</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Obyek Pemeriksaan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI maupun pemeriksaan Inspektorat sering terjadi keterlambatan;</p> <p>b. Pada saat pemeriksaan fisik masih dijumpai SKPD kurang koordinasi dengan Pihak Penyedia Jasa (Rekanan) sehingga pemeriksa sering mengalami hambatan di lapangan.</p> <p>c. Pihak Ketiga kurang merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan fisik.</p> <p>PENYELENGGARAAN KECAMATAN</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya memenuhi persyaratan pelayanan masyarakat.</p> <p>KEPEGAWAIAN</p> <p>Adanya Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor : 800-832 Tahun 2011 Nomor : 141.PMK.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS pada tahun</p>	<p>PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan</p> <p>PELAYANAN LEGISLATIF</p> <p>-</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI</p> <p>b. Peningkatan koordinasi SKPD dengan penyedia jasa</p> <p>PENYELENGGARAAN KECAMATAN</p> <p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemenuhan persyaratan pelayanan</p> <p>KEPEGAWAIAN</p> <p>Meningkatkan kompetensi pegawai dan memaksimalkan pendayagunaan pegawai.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>anggaran 2015 masih tidak dapat dilaksanakan.</p> <p>PELAYANAN PERIJINAN Kurangnya pemahaman pemohon perijinan terhadap prosedur dan mekanisme yang seharusnya, sehingga tidak jarang terjadi perdebatan antara pemohon dengan petugas pelayanan.</p> <p>ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> <p>a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi akan kewajibannya untuk membayar pajak dan Retribusi ;</p> <p>b. Belum terealisasinya pengadaan tanah eks Kantor Dinas Peternakan dan Kantor Disperindag Kabupaten Madiun.</p> <p>PENGELOLAAN BUMD PDAM</p> <p>a. Tingkat pelayanan pada akhir Tahun 2015 mencapai 88,59%, semakin meningkatnya tingkat pelayanan yang akan mendekati 100% dan dengan wilayah yang sangat mudah untuk mengakses air tanah maka penambahan pelanggan baru semakin sulit didapatkan.</p> <p>b. Pada Tahun 2015 kehilangan air sudah menunjukkan kecenderungan menurun yaitu berada jauh dibawah 20%. Walaupun demikian permasalahan tersebut tetap harus dicermati agar selanjutnya dapat lebih ditekan seminimal mungkin.</p> <p>c. Tingginya koefisien jam puncak akan mengakibatkan kurangnya tekanan suplay air pada saat jam puncak hingga mencapai 2,5 kali rata-rata</p>	<p>PELAYANAN PERIJINAN Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman proses dan persyaratan perizinan</p> <p>ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi</p> <p>PENGELOLAAN BUMD PDAM Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik terhadap sumber air dan penyalurannya maupun kualitas pelayanan lainnya</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>pemakaian air. Walaupun kapasitas reservour telah dioptimalkan pada saat jam puncak penurunan tekanan air tidak dapat dihindari terutama pada daerah kritis.</p> <p>Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun</p> <p>a. Perlunya peningkatan kualitas SDM sesuai dengan perkembangan Perbankan.</p> <p>b. Semakin ketat persaingan antar Bank di wilayah kota Madiun baik dengan sesama BPR maupun dengan Bank Umum.</p> <p>PD. ANEKA USAHA</p> <p>a. Secara umum SDM belum memadai.</p> <p>b. Kurangnya tenaga pemasaran;</p> <p>c. Kurangnya tenaga operator SPBU dikarenakan terdapat pegawai yang telah pensiun;</p> <p>d. Kurangnya penyerapan terhadap informasi-informasi dan teknologi yang berkembang dimasyarakat terutama dalam hal pelayanan masyarakat</p> <p>e. Belum dapat memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal.</p> <p>f. Partisipasi Dinas/Badan/Kantor belum maksimal.</p> <p>g. Jalur distribusi dan pemasaran masih bersifat lokal.</p> <p>h. Perkembangan perangkat (alat) pendukung sangat pesat namun di Perusahaan daerah masih belum mampu mengikutinya.</p>	<p>Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun</p> <p>a. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM.</p> <p>b. Meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan kepada nasabah</p> <p>PD. ANEKA USAHA</p> <p>Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dan meningkatkan daya saing perusahaan</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
21.	Pemberdayaan Masyarakat	<p>BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN DAN KECAMATAN</p> <p>Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian dari warga masyarakat semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualis.</p>	<p>BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN DAN KECAMATAN</p> <p>Meningkatkan pemahaman tentang perlunya kepedulian dari masyarakat untuk membendung semangat individualisme</p>
22.	Sosial	<p>DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL DAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL</p> <p>a. Jumlah PMKS berdasarkan data mengalami fluktuasi seiring dinamika waktu dan perkembangan situasional dan kondisional, jadi tidak ada parameter untuk mengukur dengan pasti sebagaimana data fisik lainnya;</p> <p>b. Adapun tingkat permasalahan saat ini adalah masih terdapatnya beberapa PMKS yang secara keseluruhan belum mendapatkan penanganan secara optimal disebabkan pola pikir mereka belum berubah dari kebiasaan yang dilakukan sehari-hari.</p>	<p>DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL DAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL</p> <p>Peningkatan pelayanan PMKS</p>
23.	Budaya	<p>DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p> <p>Belum terealisasinya Kesenian khas Kota Madiun.</p>	<p>DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p> <p>Penggalian kesenian khas Madiun</p>
24.	Statistik	<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Ketersediaan data yang sering tidak sesuai dengan harapan yaitu data yang valid, akurat, continue /berkelanjutan, terbakukan, akuntabel, dan terpadu.</p>	<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Peningkatan kerjasama dengan BPS, sehingga kebutuhan data akan tepat waktu, valid dan akurat</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
25.	Kearsipan	<p>KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum semua staf menguasai pengelolaan kearsipan. b. Unit kearsipan/SKPD belum mempunyai tempat penyimpanan arsip yang representatif. c. Depo Arsip Pemerintah Kota belum sesuai standar kearsipan. d. Gedung Kantor masih menjadi satu dengan SMPN 2. e. Kurangnya tenaga kearsipan. 	<p>KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diadakan Bimbingan Teknis pengelolaan kearsipan secara berkala bagi seluruh staf ; b. Unit kearsipan/SKPD wajib mempunyai ruang/tempat penyimpanan arsip beserta sarana dan prasarananya; c. Pengadaan Depo (penyimpanan arsip) sesuai standar kearsipan beserta sarana dan prasarananya; d. Penambahan tenaga kearsipan untuk pengelolaan arsip
26.	Perpustakaan	<p>KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya tenaga khusus pengelola perpustakaan kelurahan dan sekolah dan insentifnya. b. Banyak kelurahan yang belum ada ruang baca perpustakaan dan sarana yang kurang memadai. c. Gedung perpustakaan belum representatif, karena masih jadi satu lokasi dengan SMPN 2, sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung,serta tempat parkir yang terbatas. d. Koleksi bahan pustaka kurang baik judul maupun jumlah. e. Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai. f. Belum adanya Fungsional Pustakawan. 	<p>KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penunjukan tenaga khusus pengelola perpustakaan kelurahan dan sekolah ; b. Rehab ruang perpustakaan c. Penambahan koleksi perpustakaan secara rutin d. Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan e. Pengusulan Jabatan Fungsional Pustakawan
27.	Pertanian	<p>DINAS PERTANIAN</p> <p>Semakin berkurangnya lahan pertanian karena beralih fungsinya lahan.</p>	<p>DINAS PERTANIAN</p> <p>Meningkatkan Intensifikasi Pertanian</p>
28.	Kelautan dan Perikanan	<p>DINAS PERTANIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Harga pakan setiap saat mengalami kenaikan. b. Harga produksi ikan di pasar yang tidak stabil. 	<p>DINAS PERTANIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan mengenai manajemen pakan dengan mencari pakan alternatif yang mudah dijangkau dan yang ada di lingkungan

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>sekitar. Pemberian pakan alternatif untuk jenis ikan seperti nila dan gurame dengan pakan sayuran/daun-daunan, sedangkan untuk komoditi lele dengan menggunakan sisa pemotongan unggas;</p> <p>b. Memperkuat kelembagaan petani ikan serta memperluas jaringan pemasaran sehingga mempunyai daya jual yang stabil. Selain itu peningkatan nilai jual ikan dapat diupayakan dengan meningkatkan nilai ekonomisnya melalui penjualan produksi hasil olahan perikanan yang bergizi, berkualitas dan menyehatkan, dan guna menambah nilai jual ikan lele dapat melalui peningkatan kualitas daging seperti meningkatkan kadar rasa gurih dari daging lele, hal ini dapat diupayakan melalui pengolahan air limbah dari air kelapa.</p>
29.	Kehutanan	<p>DINAS PERTANIAN Dalam urusan kehutanan, Kota Madiun mengelola hutan kota dan lahan milik kelompok tani. Dikarenakan adanya undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan penerima bantuan harus berbadan hukum maka kelompok tani pada saat ini belum dapat menerima bantuan untuk penghijauan guna menambah luas area penghijauan.</p>	<p>DINAS PERTANIAN Mengupayakan fasilitasi kepada Kelompok Tani dalam pengurusan badan hukum sehingga dapat menerima bantuan. Dengan demikian bantuan tanaman dapat diterimakan kepada masyarakat sehingga penghijauan di lahan masyarakat melalui bantuan pemerintah daerah akan dapat terlaksana.</p>
30.	Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA Persediaan energi dan air semakin berkurang.</p>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA Sosialisasi tentang hemat energi dan air</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
31.	Perindustrian	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA</p> <p>Kurangnya kemampuan teknologi industri yang dimiliki oleh pelaku industri kecil dan menengah, sehingga kurang bersaing dalam hasil produksi dan pemasarannya.</p>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA</p> <p>Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri bagi para pelaku industri.</p>
32.	Perdagangan	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DAN DINAS PASAR</p> <p>Kurangnya kesadaran pedagang untuk mentaati sebagian substansi Perda Nomor 32 tahun 2011, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan; b. Mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum; c. Merawat bangunan kios luar/kios dalam/bedak/los yang dipergunakan sebagai tempat berjualan sehingga tetap dalam kondisi baik dan terpelihara. d. Mentaati peraturan perundang-undangan. 	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DAN DINAS PASAR</p> <p>Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang untuk mentaati dan melaksanakan perda.</p>
33.	Pariwisata	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA</p> <p>Kurangnya upaya-upaya untuk mempromosikan potensi-potensi wisata yang ada di Kota Madiun, disebabkan masih kurangnya peran serta aktif dari pelaku usaha/stakeholder bidang pariwisata untuk ikut serta mempromosikan potensi Kota Madiun.</p>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA</p> <p>Pembuatan obyek wisata buatan untuk menarik wisatawan diupayakan melaksanakan kegiatan yang senada dan seirama sehingga menarik perhatian kunjungan wisata dari luar.</p>

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat uraian dan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (2015) dan perkiraan tahun berjalan (2016), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2016, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi dunia:

Ketidakpastian ekonomi global

Rencana kenaikan *Federal Funds Rate* menyebabkan ketidakpastian perekonomian *Emerging Market*.

Kondisi di Amerika :

- Ekonomi Amerika Serikat membaik didukung perbaikan konsumsi.
- Perbaikan Tingkat Konsumsi berlanjut, sektor manufaktur ekspansif meski ekspor turun.
- Ekspektasi timing kenaikan *Federal Funds Rate* oleh pelaku pasar bergeser ke Desember 2015.

Kondisi di Tiongkok

Indikasi pelemahan ekonomi Tiongkok berasal dari sektor permintaan.

- Cadev turun akibat *outflow*;
- Kebijakan devaluasi *Yuan* menambah ketidakpastian disisi domestik dan global

Kondisi di Eropa

Pemulihan ekonomi Eropa ditopang permintaan domestik dan keyakinan konsumen kedepan

- Manufaktur ekspansif meski ekspor turun
- Perbaikan permintaan domestik belum cukup kuat meningkatkan inflasi

Kondisi di Jepang

Ekonomi Jepang tumbuh terbatas, dipengaruhi domestic demand yg masih lemah

- Depresiasi Yen belum berdampak pada perbaikan ekspor;

WTV (World Trade Volume) dalam tren menurun, sejalan dengan ekonomi global Harga Minyak dipengaruhi kekhawatiran lemahnya Ekonomi Tiongkok di tengah kondisi pasar yang oversupply. IHEX (Indeks Harga Komoditas Ekspor) sejalan dengan harga minyak yang lebih rendah serta prospek permintaan global yg lemah. Pasar Keuangan, ketidakpastian pasar keuangan meningkat

Sebagai tahun ketiga dalam periode RPJMN 2015-2019, kebijakan fiskal 2017 diarahkan untuk menyeimbangkan peningkatan alokasi anggaran dan upaya pemantapan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara berbasis pemberian stimulus fiskal yang terukur.

Secara umum kebijakan di bidang keuangan negara melingkupi sejumlah tujuan :

- a. Optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan secara komprehensif serta menyempurnakan sistem penerimaan uang negara bukan pajak (PNBP).
- b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara terutama untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (*leverage*) atau pengaruh mengganda (*multiplier effects*) yang lebih besar semisal melalui penyempurnaan perencanaan penganggaran negara, pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran negara, dan peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah.
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban/pelaporan aset.
- d. Peningkatan pengelolaan pembiayaan negara, pemanfaatan hutang secara selektif serta memprioritaskan sumber-sumber pembiayaan hutang dalam negeri. Hal itu dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat (*financial inclusion*) sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik (*financial deepening*).

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah Pusat setiap tahun wajib membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKP Nasional Tahun 2017 merupakan dokumen yang menjabarkan RPJP Nasional Tahap ketiga dan RPJMN II (2015-2019).

Penyusunan tema RKP Nasional didasarkan pada tantangan, keberlanjutan, mandat RPJP Tahun 2005-2025 dengan penekanan pada tahapan pembangunan periode RPJM Tahun 2015-2019. Dengan mempertimbangkan dasar tersebut, maka arah pembangunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional Tahun 2017 adalah dalam rangka menjawab tantangan pembangunan sbb: "Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas:

- (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;
- (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;
- (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan ."

Pemerintah menetapkan sasaran inflasi untuk periode Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93.PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi. Jenis sasaran inflasi yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan (year on year). Untuk Tahun 2016, sasaran inflasi ditetapkan pada tingkat 4% . Untuk Tahun 2017 sebesar 4%, dan 2018 sebesar 3,5% Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar 1%.

a. Jawa Timur

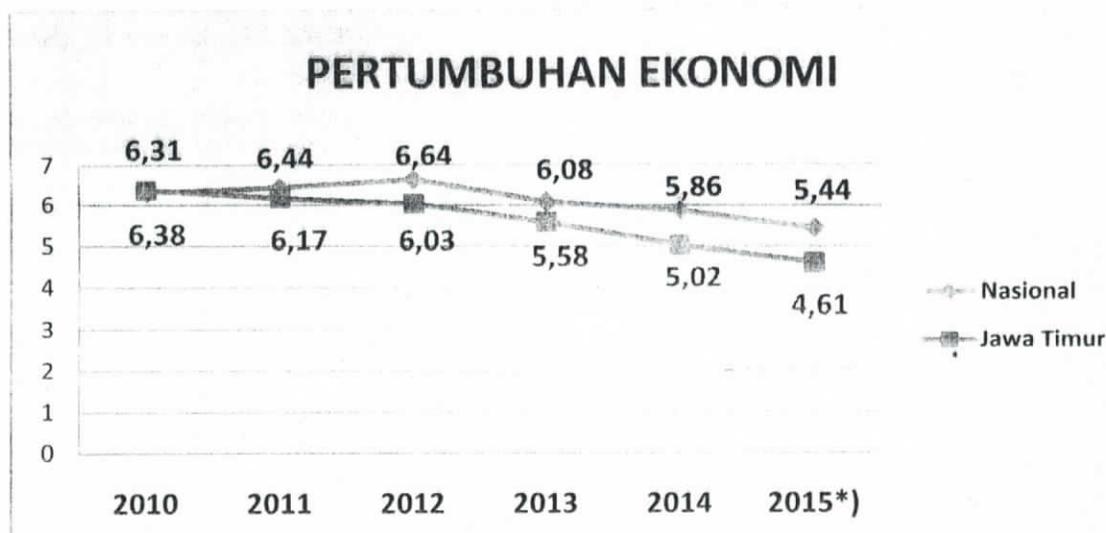
Badan Pusat Statistik Jawa Timur menyebutkan, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III/2015 tumbuh 5,44%. Kendati melambat ketimbang pertumbuhan di kuartal yang sama tahun lalu 5,89%, presentase tersebut masih di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,67%. Dari sisi produksi hampir semua lapangan usaha tumbuh positif kecuali kategori Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es yang mengalami kontraksi 3,47%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,85%. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,97%.

Melambatnya ekonomi Jawa Timur hanya sementara karena lebih kepada faktor eksternal. Pasalnya, pada periode yang sama di tahun-tahun lalu ekonomi Jawa Timur sudah bisa tembus 5,5% hingga 6%. Ini artinya memang karena pengaruh melemahnya ekonomi global yang berimbas ke turunnya daya beli masyarakat luar negeri. Ditambah dengan pelaku usaha luar dan dalam negeri yang menahan ekspansi. Pada kuartal kedua tahun ini terdapat penurunan ekspor Malaysia ke Jawa Timur sebesar 15%, khususnya di sektor bahan makanan halal. Perusahaan asal Malaysia sudah minat untuk investasi di sektor tertentu, tapi gimana lagi nilai Ringgit mereka sedang jatuh hingga RM 3,9 per dolar Amerika. Ekonomi Jawa Timur mampu bangkit di kuartal ketiga dan keempat tahun ini, ada beberapa hal yang harus menjadi koreksi Pemerintah Daerah diantaranya sektor yang harus digenjot untuk menggalakan ekonomi yaitu logistik dan bahan konsumsi rumah tangga. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang menyumbang angka inflasi di setiap kuartalnya. Oleh karena itu biaya logistik harus dibuat seminim mungkin

Di samping itu, harga barang konsumsi di pasar harus dikontrol dengan mekanisme digital. Harga barang konsumsi di pasar harus disamakan dengan skema digital sehingga tidak bisa menaikkan harga, dengan serta merta inflasi bisa dicegah. Selain itu beroperasinya tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) dan Mojokerto-Krian pada Tahun 2016 turut berperan pada kenaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di akhir tahun.

Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Tahun 2015 (triwulan 3) mencapai 5,44%, sedangkan pada Tahun 2014 tumbuh sebesar 5,86 persen. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2015 dimaksud lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa (kecuali Jakarta) maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,61%.



Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2010 – 2015

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2015
 *) triwulan 3

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali kategori Penyediaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi sebesar 3,47%. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,85%, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,34%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,73%, Informasi dan Komunikasi 6,62% dan Jasa Pendidikan 6,39%. Dari sisi produksi, laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum sebesar 8,88%.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2012-2015 (%)

No	Uraian	TAHUN			
		2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,14	3,06	3,63	3,06
2	Pertambangan dan Penggalian	0,25	1,31	3,65	3,64
3	Industri Pengolahan	6,73	5,85	7,66	6,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	(3,31)	2,89	2,45	(3,47)
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah	0,91	4,15	0,25	5,39
6	Konstruksi	7,45	8,05	5,44	2,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	8,21	6,18	4,61	6,56
8	Transportasi dan Pergudangan	7,24	8,60	6,40	6,23

No	Uraian	TAHUN			
		2012	2013	2014	2015*)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	5,65	8,88	7,85
10	Informasi dan Komuniasi	12,37	12,03	6,34	6,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,71	14,16	6,95	6,73
12	Real Estate	7,98	7,37	6,97	4,21
13	Jasa Perusahaan	3,19	7,45	8,52	5,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,39	1,26	0,58	5,26
15	Jasa Pendidikan	8,66	8,60	6,48	6,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,70	7,96	8,17	7,34
17	Jasa Lainnya	2,81	5,11	5,46	4,91
PDRB		6,64	6,08	5,86	5,44

Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur 2015
*) Triwulan 3

Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,87%.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010
Tahun 2012 - 2015 (%)

No	Komponen	2012	2013	2014	2015*)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,48	6,57	5,92	3,04
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,6	10,85	13,39	3,16
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,4	6,43	2,88	8,97
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,73	4,88	4,37	5,20
5	Perubahan Inventori	-286,81	-181,92	83,54	-5,90
6	Ekspor Luar Negeri	-4,17	1,17	0,69	1,58
7	Dikurangi Impor Luar Negeri	11,77	10,48	-1,31	-10,78
8	Net Ekspor Antar Daerah	138,61	-15,74	-11,2	-6,05
PDRB		6,64	6,08	5,86	5,44

Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur 2015
*) Triwulan 3

Kontribusi 17 (tujuh belas) lapangan usaha pembentuk struktur PDRB Jawa Timur disajikan dalam Tabel 3.3. Selama 4 (empat) tahun terakhir struktur ekonomi Jawa Timur yang tercermin dari PDRB menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Tiga lapangan usaha dominan yang berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur adalah Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Keuangan dan Asuransi. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2014 masing-masing sebesar 7,85%, 7,34% dan 6,73%. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,85%, sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran konsumsi sebesar 8,97%.

Tabel 3.3
Struktur PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012 - 2015 (%)

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,48	13,46	13,73	14,72
2	Pertambangan dan Penggalian	5,30	5,34	5,19	3,82
3	Industri Pengolahan	29,31	28,79	28,90	29,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,40	0,37	0,36	0,35
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah	0,10	0,10	0,09	0,09
6	Konstruksi	9,19	9,22	9,47	9,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	17,68	17,70	17,24	17,50
8	Transportasi dan Pergudangan	2,88	3,07	3,20	3,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,82	4,91	5,19	5,28
10	Informasi dan Komunikasi	4,73	4,78	4,54	4,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,45	2,64	2,69	2,71
12	Real Estate	1,61	1,63	1,57	1,64
13	Jasa Perusahaan	0,77	0,79	0,79	0,79
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,66	2,51	2,31	2,22
15	Jasa Pendidikan	2,64	2,73	2,72	2,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,60	0,61	0,63	0,62
17	Jasa Lainnya	1,39	1,36	1,38	1,41
PDRB		100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2015

*) Triwulan 3

Tumbuhnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) dan pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, ketika ekonomi global yang menjadi pendorong kinerja ekspor luar negeri mengalami perlambatan. Kondisi ini terindikasi di dalam PDRB menurut pengeluaran yang disajikan pada Tabel 3.3.

Kinerja Perdagangan

Data Produk Domestik Regional bruto Pemerintah Provinsi Jawa Timur, nilai ekspor Jatim pada Triwulan III/2015 mencapai Rp 185,783,88 milyar. Sedangkan impornya Rp 238.337,85 milyar sehingga nilai *net* ekspor perdagangan luar negeri defisit Rp 52.553,97 milyar.

Kendati demikian, perdagangan dalam negeri antar Provinsi Jawa Timur pada Triwulan III/2015 net ekspor perdagangan antar daerah antar provinsi Jawa Timur surplus Rp 87.591,30 milyar. Secara garis besar, neraca perdagangan Jawa Timur pada Triwulan III/2015 surplus Rp 35,037,33 milyar,".

Kondisi di atas tercermin dari data PDRB menurut penggunaan Tahun 2015 yang disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
PDRB Jawa Timur Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2013-2015 (Miliar Rupiah)

No.	URAIAN	2013	2014	2015*)
1	2	3	4	5
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	892.514,73	983.426,30	759.093,83
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	16.870,93	18.710,65	14.770,98
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	104.357,76	97.679,53	67.841,14
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	380.459,84	419.388,13	340.973,42
5	Perubahan Inventori	-37.964,37	28.333,62	42.302,48
6	Ekspor Luar Negeri	191.653,93	189.705,94	185.783,88
7	Impor Luar Negeri	237.310,17	296.717,51	238.337,85
8	Net Ekspor Antar Daerah	71.852,21	100.169,88	87.591,30
Produk Domestik Regional Bruto		1.382.434,85	1.540.696,53	1.260.019,19

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2015

*) Triwulan 3

Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serangkaian kebijakan di bidang makro dan mikro akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:

1. Kebijakan Makro Ekonomi, diarahkan untuk:
 - a) Mendorong otoritas moneter bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Menteri Keuangan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dalam rangka kondusivitas iklim berusaha.

- b) Mendorong otoritas moneter untuk mengevaluasi suku bunga bank pelaksana agar lebih kompetitif dalam rangka mendukung pembiayaan sektor riil.
 - c) Ikut serta dalam menjaga stabilitas makro ekonomi di daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi melalui optimalisasi kinerja TPID maupun fasilitas bantuan ongkos angkut untuk komoditi tertentu yang pada waktu-waktu tertentu mengalami inflasi yang tinggi.
2. Mikro Ekonomi, dalam rangka menumbuhkan sektor riil diarahkan untuk:
- a) Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian dalam rangka peningkatan pencapaian swasembada pangan, khususnya padi, jagung, daging dan gula maupun peningkatan produksi signifikan komoditi kedele.
 - b) Peningkatan produksi dan daya saing sektor industri, termasuk industri kreatif dengan menciptakan penataan struktur industri yang mampu membangun jaringan /hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.
3. Kebijakan Pendukung Kinerja Ekonomi
- a) Reformasi Birokrasi melalui optimalisasi Pelayanan Publik, khususnya perijinan satu pintu (PTSP), memberikan jaminan kepastian terhadap penyediaan lahan untuk kawasan industri, ketersediaan energi maupun dukungan iklim perburuhan yang kondusif.
 - b) Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia, baik melalui Jalur Pendidikan Formal maupun program khusus yaitu :
 - (a) Meningkatkan rasio SMK terhadap SMU;
 - (b) lanjutan pengembangan SMK Mini;
 - (c) Mengoptimalkan fungsi BLK untuk meningkatkan pelatihan tenaga kerja berstandar internasional.
 - c) Penguatan kelembagaan 3 aspek aktifitas utama ekonomi Jawa Timur, melalui:
 - 1) Aspek Produksi dari segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan segmen Usaha Besar (UB) serta stimulus peningkatan produksi sektor primer dan sekunder. Untuk UMKM ada beberapa langkah yang harus dilakukan :
 - ❖ Penyiapan Data;
 - ❖ Pengembangan SDM UMKM;

- ❖ Inkubator bisnis;
- ❖ Standarisasi ketrampilan SDM;

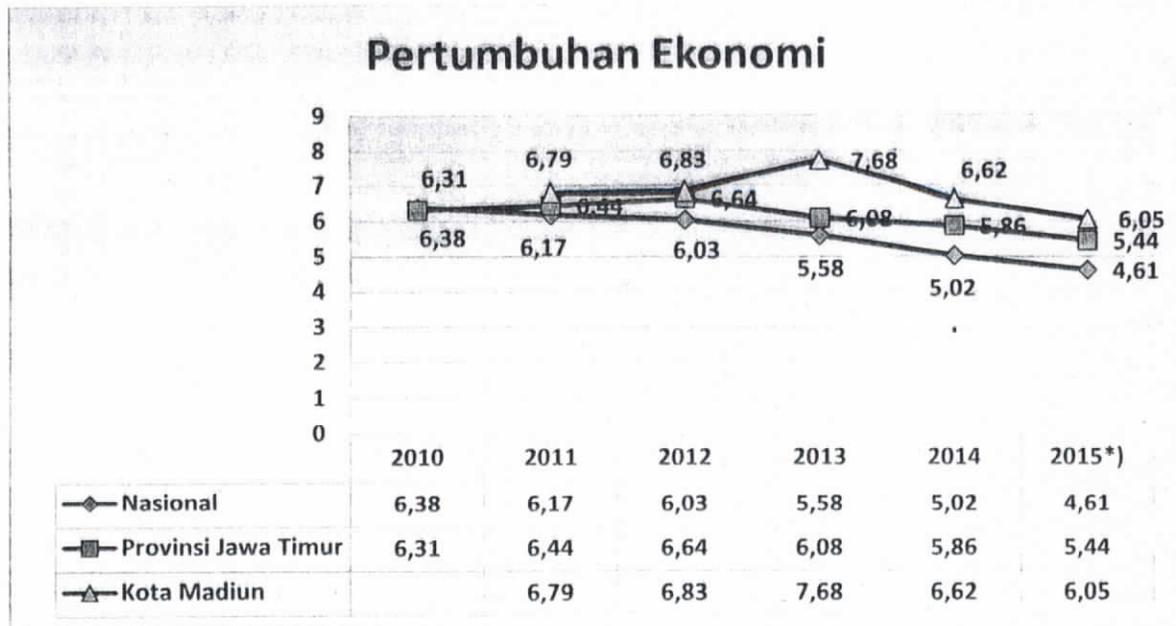
Untuk fasilitasi segmen usaha besar (UB) adalah sebagai berikut :

- ❖ Kemudahan perizinan melalui P2T;
 - ❖ Percepatan Pengadaan Lahan;
 - ❖ Jaminan ketersediaan Pasokan Energi/Listrik;
 - ❖ Iklim perburuhan yang demokratis;
- 2) Aspek pembiayaan yang kompetitif dengan menerapkan strategi sebagai berikut :
- ❖ Digulir;
 - ❖ Apex PT. Bank Jatim – Bank BPR;
 - ❖ Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA);
 - ❖ Kredit Linkage Program;
- 3) Aspek Pemasaran dengan beberapa strategi sebagai berikut :
- ❖ Pembangunan Kantor Perwakilan Dagang
 - ❖ Peningkatan kinerja bongkar muat
 - ❖ Peningkatan nilai muat
 - ❖ Perluasan pasar dari Kantor Perwakilan Dagang (KPD) ke Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan penerapan strategi segitiga emas, yaitu hubungan manado yang akan menghubungkan dengan Filipina (Mindanao), Hubungan NTT yang akan menghubungkan Australia dan Papua New Gini serta Hubungan Batam yang akan menghubungkan Singapura dan Malaysia.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD Tahun 2014-2019, maka perlu dirumuskan arah kebijakan ekonomi Kota Madiun. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah.



Sumber : BPS, Tahun 2016
*) Angka Sementara

Gambar 3.2:
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun

Dari kondisi tersebut, prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2015 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.

Tabel 3.5.
Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2015

Indikator	Realisasi				Proyeksi 2016*)
	2012	2013	2014	2015	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,83	7,68	6,62	6,05	6,11
PDRB ADHB (milyar rupiah)	7.533,6	8.390,4	9.214,2	10.191,66	10.974,91
PDRB ADHK (juta rupiah)	6.937,7	7.470,7	7.965,5	8.447,42	8.918,50
PDRB per Kapita (juta rupiah)	43,71	48,19	52,84	57,24	60,55
TPT (%)	6,71	6,66	6,93	5,10	4,46
IPM	77,50	77,82	78,81	79,15	79,66
Inflasi	4,69	5,62	5,67	4,30	4,5 ± 1

Sumber : Bappeda Kota Madiun, Tahun 2016
*) Target/Proyeksi

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Prospek Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara, semakin menjanjikan dengan melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang kondusif. Namun ke depan masih terdapat tantangan besar untuk meningkatkan daya saing (*competitiveness*) yang saat ini berada pada peringkat 50 dari 144 negara.

khususnya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, efisiensi pasar tenaga kerja, penguasaan teknologi dan inovasi, serta kelembagaan. *Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)* pada akhir 2015 diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perekonomian Jawa Timur termasuk Kota Madiun. Pasar tunggal ASEAN akan mengakibatkan terjadinya persaingan antar anggota MEA dalam merebut pasar

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di Tahun 2015 diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan yang tinggi untuk Tahun 2016 dan Tahun 2017. Faktor-faktor eksternal dan domestik yang lebih kondusif akan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi eksternal, semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh di atas 4,0% dan disertai peningkatan volume perdagangan berdampak pada membaiknya neraca perdagangan Jawa Timur.

Dari sisi domestik, berbagai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang antara lain terfokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, pelabuhan dan prasarana transportasi, dan infrastruktur ekonomi lainnya akan mendorong peningkatan kegiatan investasi. Langkah-langkah tersebut juga akan mendorong perbaikan iklim usaha dan aktivitas investasi oleh pihak swasta dan pada gilirannya kapasitas produksi nasional. Dari sisi konsumsi, struktur demografi masih menjadi modal dasar kuatnya konsumsi domestik. Pada saat yang sama, semakin terjaga dan menurunnya laju inflasi juga turut memberikan dampak positif bagi peningkatan permintaan agregat.

Dengan membaiknya kondisi global, kinerja perdagangan Jawa Timur akan mendapatkan imbas positif dengan naiknya permintaan. Ekspor luar negeri ke negara-negara konvensional diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di negara-negara tersebut. Nilai importasi juga diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan adanya pemenuhan terhadap barang yang sebelumnya diimpor (substitusi impor).

Kinerja investasi juga diperkirakan mengalami peningkatan. Ketersediaan kawasan industri, listrik, energi untuk industri, selesainya proyek-proyek infrastruktur, insentif penanaman modal baik fiskal maupun nonfiskal menjadi daya tarik bagi investor. Pelayanan perijinan yang akuntabel, profesional dan transparan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, kepastian hukum dan fasilitasi potensi permasalahan antara investor dengan tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan investasi pada Tahun 2016 dan 2017.

Laju inflasi diproyeksikan mengalami penurunan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017. Upaya-upaya pengendalian inflasi secara terbatas melalui TPID, penyediaan informasi suplai dan demand yang lebih luas, perbaikan infrastruktur dan kapasitas produksi, serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian Jawa Timur diharapkan mampu berperan signifikan dalam menekan laju inflasi pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Dengan tantangan dan prospek perekonomian tersebut, maka diharapkan Kota Madiun dapat menjaga stabilitas perekonomian daerah. Untuk menjaga stabilitas perekonomian tersebut, maka salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan selalu meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong perkembangan ekonomi daerah yang berbasis pada penguatan ekonomi lokal dan perdagangan yang kuat serta peningkatan peranan UMKM di Kota Madiun.

Dengan berbagai hal diatas, maka prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.

Tabel 3.6.
Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2017

	Proyeksi		
	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,05	6,11	6,16
PDRB ADHB (milyar rupiah)	10.191,70	10.974,91	11.758,16
PDRB ADHK (milyar rupiah)	8.447,40	8.918,50	9.389,57
PDRB per Kapita (juta rupiah)	57,24	60,55	63,85
TPT (%)	5,10	4,46	3,81
IPM	79,15	79,66	80,16
Inflasi	4,3	4,5 ± 1	4,5 ± 1

Sumber: Proyeksi Bappeda Kota Madiun, 2016

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah memuat tentang kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Madiun berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD Kota Madiun terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam memproyeksikan pendapatan daerah pada Tahun 2016 diperlukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dengan tingkat yang moderat pada Tahun 2016 diperkirakan 7,45%;
2. Tingkat inflasi Daerah pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar 4,5 ± 1%.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut.

Tabel 3. 7.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2013 s/d Tahun 2015, Anggaran Tahun 2016 dan
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 dan Tahun 2018

KODE	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	ANGGARAN 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
1.1	Pendapatan Asli Daerah	96.011.481.199,59	134.584.344.293,39	164.881.298.106,71	132.435.377.000,00	151.274.698.390,00	173.154.632.144,30
1.1.1	Pajak daerah	34.432.024.109,00	54.173.502.033,17	59.074.030.772,61	50.000.000.000,00	55.000.000.000,00	60.500.000.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	17.116.760.622,00	19.450.075.983,00	16.537.857.463,00	13.969.711.000,00	15.366.682.100,00	16.903.350.310,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.440.747.580,93	9.422.703.367,89	11.143.325.514,46	9.621.407.000,00	10.294.905.490,00	11.015.548.874,30
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	35.021.948.887,66	51.538.062.909,33	78.126.084.356,64	58.844.259.000,00	70.613.110.800,00	84.735.732.960,00
1.2	Dana Perimbangan	556.621.076.555,00	605.215.256.742,00	597.215.788.294,00	671.272.066.000,00	671.272.066.000,00	671.272.066.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak	30.559.371.461,00	30.832.580.786,00	16.728.617.650,00	24.768.358.000,00	24.768.358.000,00	24.768.358.000,00
	Dana bagi hasil bukan pajak	15.247.050.379,00	21.419.313.519,00	23.946.332.783,00	27.751.042.000,00	27.751.042.000,00	27.751.042.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	474.093.362.000,00	511.089.913.000,00	509.817.165.000,00	511.357.289.000,00	511.357.289.000,00	511.357.289.000,00
1.2.3	Dana Alokasi khusus	27.544.290.000,00	31.922.300.000,00	39.864.456.000,00	95.640.600.000,00	95.640.600.000,00	95.640.600.000,00
1.2.4	Dana Bagi hasil cukai	9.177.002.715,00	9.951.149.437,00	6.859.216.861,00	11.754.777.000,00	11.754.777.000,00	11.754.777.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	156.445.824.163,00	198.717.740.004,00	212.022.423.820,00	234.097.330.000,00	234.097.330.000,00	234.097.330.000,00
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Danadaturat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	37.301.512.163,00	62.882.287.004,00	58.907.047.820,00	58.807.406.000,00	58.807.406.000,00	58.807.406.000,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	117.120.867.000,00	111.629.826.000,00	151.367.873.000,00	173.438.474.000,00	173.438.474.000,00	173.438.474.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	2.023.445.000,00	24.205.627.000,00	1.747.503.000,00	1.851.450.000,00	1.851.450.000,00	1.851.450.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	809.078.381.917,59	938.517.341.039,39	974.119.510.220,71	1.037.804.773.000,00	1.056.644.094.390,00	1.078.524.028.144,30

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sub bab ini menjelaskan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis dan prediksi perekonomian dan kerangka pendanaannya.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya

Bahwa peranan sektor Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan, tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan baik ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kota Madiun. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana kota yang ada seperti saat ini.

Untuk itu, kedepan, prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di kota Madiun.

Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD ini, arahan kebijakan pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama dua tahun terakhir, serta potensi dari sumber-sumber pendapatan daerah;
2. meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. optimaliasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
4. meningkatkan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
6. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
7. melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah dan diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan untuk Tahun 2016 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2017 berpedoman pada RPJMD 2014-2019 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja.

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014 – 2019.

Adapun arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.

a. Belanja Langsung

1. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun.
2. Kebijakan belanja dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2016 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing SKPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja SKPD.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
5. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) dan kewenangan masing-masing SKPD.
6. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.

b. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan publik.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*.
5. Seluruh belanja tidak langsung harus dianggarkan dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. 8.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2013 s/d Tahun 2015, Anggaran Tahun 2016 dan
Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2017 dan Tahun 2018

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	ANGGARAN 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
2.1	Belanja Tidak Langsung	419.457.362.719,00	438.415.869.719,51	444.312.518.614,03	622.593.244.000,00	610.249.633.900,00	624.698.057.302,00
2.1.1	Belanja Pegawai	377.924.830.928,00	413.686.359.144,00	425.635.638.491,60	563.894.055.000,00	575.171.936.100,00	586.675.374.822,00
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.4	Belanja Hibah	19.145.410.060,00	17.392.000.507,51	12.526.419.422,43	19.076.688.000,00	20.984.356.800,00	23.082.792.480,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.844.516.419,00	6.798.292.500,00	5.522.614.000,00	7.695.900.000,00	8.465.490.000,00	9.312.039.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemeritahan Desa	494.903.000,00	539.217.568,00	627.846.700,00	627.851.000,00	627.851.000,00	627.851.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	47.702.312,00	0.00	0.00	31.298.750.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	355.677.541.407,47	415.057.448.454,17	412.462.415.110,45	682.625.503.000,00	930.466.766.565,00	954.131.885.052,00
2.2.1	Belanja Pegawai	40.926.987.003,00	44.328.666.318,17	35.318.941.609,81	59.197.127.000,00	80.689.864.512,00	83.110.560.447,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.639.233.409,00	169.194.840.387,00	196.573.344.060,37	286.578.211.000,00	390.626.339.311,00	400.391.997.794,00
2.2.3	Belanja Modal	180.111.320.995,47	201.533.941.749,00	180.570.129.440,27	336.850.165.000,00	459.150.562.742,00	470.629.326.811,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	775.134.904.126,47	853.473.318.173,68	856.774.933.724,48	1.305.218.747.000,00	1.540.716.400.465,00	1.578.827.942.354,00
	SURPLUS/DEFISIT	33.943.477.791,12	85.044.022.865,71	117.344.576.496,23	-267.413.974.000,00	-484.072.306.075,00	-500.305.914.209,70

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran pokok pengeluaran pihak ketiga.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta satu tahun setelah rencana Tahun 2016 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 9.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s/d Tahun 2015, Anggaran Tahun 2016 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 dan Tahun 2018

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	ANGGARAN 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
3.1	Penerimaan Pembiayaan	135.488.087.324,14	169.485.451.427,30	254.542.687.292,97	267.413.974.000,00	484.072.306.075,00	500.305.914.209,70
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	135.478.893.523,14	169.479.267.000,00	254.529.474.292,97	267.413.974.000,00	484.072.306.075,00	500.305.914.209,70
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	9.693.801,00	6.184.000,00	13.213.000,00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	12.106.967.705,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0.00	0.00	12.106.967.705,00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	135.488.087.324,14	169.485.451.427,30	242.435.719.587,97	267.413.974.000,00	484.072.306.075,00	500.305.914.209,70
	SILPA	169.479.267.000,00	254.529.474.292,97	359.780.296.084,20	0,00	0,00	0,00

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2017

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional Tahun 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama dengan mengagendakan Sembilan Agenda Prioritas pembangunan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Tema RKP 2017 adalah “**Memacu Pertumbuhan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah**”.

Arahan Pembangunan RKP nasional Tahun 2017 adalah dijabarkan sebagai berikut.

- ❖ Salah satu program yaitu program revolusi mental, itu akan di-*embed*, akan dikaitkan semua aktivitas pemerintah. Misalnya penegakan disiplin. Kita percaya misalnya penegakan hukum dan disiplin itu salah satu hal yang paling penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan industri yang baik.
- ❖ Program-program yang akan mendapatkan pembiayaan adalah yang jelas sekali manfaatnya. Sebelum program diusulkan oleh kementerian, mereka harus menjawab sejumlah pertanyaan diantaranya : Apakah diperlukan, Mengapa diperlukan, Kapan diperlukan. Sehingga dengan demikian diketahui Bappenas jelas atau tidaknya manfaat yang dihasilkan. Terutama dalam mendukung tujuan yang telah ditetapkan yang merupakan tujuan nasional
- ❖ Kemudian masalah yang lain lagi adalah sinergi antar Kementerian dan Lembaga, pusat dengan daerah, sinergi, atau *system integrator* dikerjakan oleh Bappenas, dengan demikian diharapkan RKP 2017, mulai dari Tahun 2016 tidak ada lagi nomenklatur-nomenklatur tidak jelas: peningkatan, pemberdayaan, istilah-istilah yang tidak jelas.
- ❖ ada lima hal yang penting sebagai pendorong dalam proses industrialisasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yaitu :
 - a) menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak di masyarakat;
 - b) menurunkan kemiskinan;
 - c) mempersempit kesenjangan;
 - d) mengurangi inflasi; dan
 - e) pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.Terkait hal tersebut, hal penting kenapa *roadmap* industrialisasi menjadi suatu agregasi, suatu *resultante* dari seluruh *roadmap* yang sudah ada di Kementerian/Lembaga.
- ❖ Terkait dengan aspek deregulasi yang dilakukan di sektor Ekonomi, paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sampai saat ini dalam rangka melakukan sebuah proses transformasi modernisasi perekonomian Indonesia agar bangsa Indonesia memiliki daya saing yang tinggi
- ❖ Selain itu para menteri harus betul-betul mengendalikan arah penggunaan anggaran, dan tidak memberikan (kendali tersebut) kepada bawahan, Arah itu dipegang penuh oleh menteri, sehingga di dirjen, direktur, dan ke bawah itu hanya memberikan rincian. Kebijakan (*policy*) yang berkaitan itu dipegang menteri

Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2017 yang sejalan dengan NAWACITA Presiden adalah sebagai berikut :

1. Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Kemaritiman dan Kelautan;
4. Revolusi Mental;
5. Daerah Perbatasan;
6. Daerah Tertinggal;
7. Pelayanan Kesehatan;
8. Pelayanan Pendidikan;
9. Antar Kelompok Pendapatan;
10. Desa dan Kawasan Pedesaan;
11. Perumahan dan Permukiman;
12. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban;
13. Kepastian dan Penegakan Hukum;
14. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi;
15. Reformasi Birokrasi;
16. Perkotaan;
17. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK);
18. Pembangunan Pariwisata.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2017

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 disusun sebagai penjabaran tahun kedua RPJMD Tahun 2014-2019 yang memuat Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019: "***Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak***"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur Tahun 2014-2019 tersebut, maka didukung dengan misi pembangunan Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah: "***Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik***". Dua belas misi utama "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik" untuk mewujudkan visi "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak," adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: Perluasan Lapangan Kerja .

Prioritas pada misi ini adalah pengembangan dan pemberdayaan agroindustri yang berbasis industri kerakyatan. Yakni dengan memanfaatkan hasil pertanian dan tenaga kerja lokal. Karena potensinya sangat bagus, pasarnya luas dan sebagian besar UMKM kita adalah di agro.

Misi Kedua : peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM/koperasi.

Prioritas pada misi ini dilaksanakan dengan cara penguatan skill (keterampilan) SDM, akses permodalan, dan manajemen keuangan dan pemasaran. UMKM sangat kuat dan menjadi penentu ekonomi di Jawa Timur. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan UMKM sebaik mungkin untuk menghadapi AFTA. Pelatihan keterampilan dan manajemen pemasaran bagi UMKM sangat diperlukan. Sebab sejumlah UMKM di pedesaan hanya mampu menjual produknya di pasar setempat. Padahal pada era AFTA Tahun 2015, produk-produk asing akan menyerbu Indonesia

Misi Ketiga: penguatan ekonomi perempuan.

Prioritas pada misi ini dilaksanakan dengan cara meningkatkan dan memperluas jaringan usaha dan akses permodalan melalui pengembangan dan penguatan koperasi wanita (kopwan). Tahun 2017 menargetkan pengembangan dan penguatan kopwan di 8.506 desa dengan hibah awal Rp. 25.000.000,- dan tambahan modal usaha bagi 4.000 Koperasi Wanita berprestasi.

Pembangunan Koperasi Wanita bertujuan untuk membangun perempuan agar semakin produktif sehingga dapat meningkatkan derajat dan taraf hidup perempuan. Selain itu, hal ini untuk mencegah feminisasi kemiskinan yang biasanya terjadi pada wanita *single parent*. Berdasarkan data PPLS Tahun 2011, dari 1.230.042 Rumah Tangga, sebanyak 152.343 atau 12,4% kepala Rumah Tangganya adalah perempuan.

Misi Keempat: percepatan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan dan penyempurnaan berbagai program penanggulangan kemiskinan, terutama program Jalinkesra. Serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan Rumah Tangga Miskin melalui kemudahan akses modal.

Misi Kelima: mengembangkan wajib belajar 12 Tahun.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan rasio jumlah SMK : SMA sebanyak 70 : 30.

Misi Keenam: aksesibilitas kesehatan

Misi ini untuk mewujudkan Jawa Timur bebas pasung, meningkatkan perluasan pelayanan Polindes menjadi Ponkesdes, dan penguatan dan pengembangan Taman Posyandu, dalam satu desa/kelurahan harus ada minimal satu Taman Posyandu.

Misi Ketujuh: perdagangan, pariwisata dan investasi

Misi ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas kantor perwakilan dagang. Tujuannya untuk meningkatkan akses dan penetrasi ke pasar domestik, ditargetkan pada Tahun 2017, Jawa Timur bisa menguasai 50% pasar dalam negeri. Oleh sebab itu, kita perlu mendorong ekspor barang .olahan, baik setengah jadi maupun jadi. Di bidang pariwisata akan mengembangkan *pro poor tourism*, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan kolektif bagi masyarakat di daerah tujuan wisata. "Sebagai contoh, di Gunung Penanggungan terdapat 122 candi baru yang diketemukan. Selain itu, situs Trowulan juga terus diperbaiki, disekitarnya akan dibangun 250 rumah ala Mojopahit. Ini akan jadi destinasi wisata baru di Jatim.

Misi Kedelapan: pembangunan infrastruktur

Misi Kesembilan: lingkungan hidup

Misi Kesepuluh: reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Misi Kesebelas: kesalehan sosial

Misi Keduabelas: keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM

Kedua belas misi tersebut terangkum dalam Tiga Strategi Pokok Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat, inklusif & partisipatoris, *pro-poor growth*, dan pengarusutamaan gender. Muaranya adalah mampu mewujudkan Visi "Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri & Berdaya Saing" serta Misi "Makin Mandiri Sejahtera bersawa Wong Cilik".

URUSAN WAJIB

1. Bidang Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c. Program Pendidikan Menengah;
- d. Program Pendidikan Non Formal;
- e. Program Pendidikan Luar Biasa;
- f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- h. Program Pendidikan Tinggi.

2. Bidang Kesehatan

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- d. Program Upaya Kesehatan Perorangan;
- e. Program Lingkungan Sehat;
- f. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

3. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- b. Program Perlindungan dan Konservasi SDA;
- c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA;
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA LH;
- e. Program Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA LH;
- f. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
- g. Program rehabilitasi dan rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
- h. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

4. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah;
- d. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase;
- e. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;
- f. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;
- g. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.

5. Bidang Penataan Ruang

- a. Program Perencanaan Tata Ruang;
- b. Program Pemanfaatan Ruang;
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

6. Bidang Perencanaan Pembangunan

- a. Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pembangunan;
- b. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
- c. Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah;
- d. Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan;
- e. Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah;
- f. Program Perencanaan Tata Ruang.

7. Bidang Perumahan

- a. Program Pengembangan Perumahan;

8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
- b. Program Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan;
- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

9. Bidang Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Program Kependudukan.

12. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- c. Program Pengawasan dan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
- d. Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja.

13. Bidang Ketahanan Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan;
- c. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan , dan Kehutanan.

14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Program Keluarga Berencana.

16. Bidang Perhubungan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- d. Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas;
- e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
- f. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian;
- g. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- h. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut;
- i. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara.

17. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
- b. Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika;
- c. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Program Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama;
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

19. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
- c. Program Peningkatan Kerjasama;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
- h. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- i. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- j. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
- k. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
- l. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;

- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

21. Bidang Sosial

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- c. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial;
- d. Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial;
- e. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.

22. Bidang Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

23. Bidang Kearsipan

- a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
- b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan);
- c. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

24. Bidang Perpustakaan

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

URUSAN PILIHAN

1. Bidang Perikanan dan Kelautan

- a. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan;
- b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- d. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan;
- e. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.

2. Bidang Pertanian

- a. Program peningkatan Produksi Pertanian;
- b. Program peningkatan Produksi Perkebunan;
- c. Program peningkatan Produksi Peternakan;
- d. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian;
- e. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan;
- f. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;
- g. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian;
- h. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan;
- i. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan.

3. Bidang Kehutanan

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan;
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Hutan;
- c. Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan.

4. Bidang Perindustrian

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;
- c. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. Program Peningkatan Standarisasi Industri;
- e. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam;
- f. Program Penataan Struktur Industri.

5. Bidang Perdagangan

- a. Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor;
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

6. Bidang Pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata.

7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi;
- b. Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik;
- c. Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas;
- d. Program Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi;
- e. Program Pembinaan usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah.

8. Bidang Ketransmigrasian

- a. Program Mobilitas Penduduk.

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2017

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Madiun merupakan integrasi kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan capaian kinerja program daerah serta permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan memperhatikan dan mengacu pada tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur dan arahan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 serta mempertimbangkan eksistensi kondisi dan potensi daerah Kota Madiun, maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2017 adalah **"Peningkatan Kemandirian ekonomi dan daya saing daerah melalui optimalisasi Potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik yang prima"**.

Pengambilan tema ini didasarkan pada kondisi eksisting Kota Madiun dimana semakin pentingnya kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang ditopang sumberdaya manusia atau tenaga kerja yang handal, pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah dalam rangka untuk menghadapi AFTA. Selain itu, Penyiapan sumberdaya manusia yang handal melalui pelayanan prima di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota merupakan fokus dari tahun ketiga RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2017 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan;
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan;
- c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
- d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peningkatan Pelayanan Publik;
- f. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

4.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2017

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan harus mengacu pada RPJP Tahun 2005-2025. Hal ini akan memberikan arahan yang jelas mengenai kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun pada saat pemilihan kepala daerah. Hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran dalam RPJMD Tahun 2014-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1.
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun

Visi : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat	Mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam pembangunan	a. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
		b. Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
		c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional	a. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah; b. Meningkatnya penegakan hukum menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, aspiratif dan berwibawa.
	Meningkatkan efektifitas kelembagaan pemerintahan dan manajemen aparatur yang efektif dan profesional	a. Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan manajemen aparatur yang efektif dan profesional b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program	a. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program b. Tersedianya data base dan dokumen statistik daerah
	Meningkatkan Pengelolaan arsip Pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal	a. Meningkatnya Pengelolaan arsip Pemerintah Daerah yang tertib, rapi dan handal
	Meningkatkan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terintegrasi	a. Meningkatnya administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terintegrasi
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar Masyarakat		a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat;
		b. meningkatnya kuantitas dan kualitas perhubungan, telekomunikasi dan informasi
		c. Meningkatnya infrastruktur ekonomi masyarakat
	d. Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	
Meningkatkan dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat	a. Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif dan pemerataan kesejahteraan rakyat
	Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan	a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan
		b. Meningkatnya minat membaca masyarakat

Visi : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kesehatan masyarakat	a. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memperluas cakupan keluarga berencanaan	a. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memperluas cakupan keluarga berencana
	Meningkatkan Daya Saing TenagaKerja	a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Daya Saing TenagaKerja
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebudayaan dan peningkatan peran pemuda serta olah raga	a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kebudayaan dan peningkatan peran pemuda serta olah raga
	Meningkatkan kontribusi koperasi, UMKM, Perdagangan, Pariwisata dan perindustrian secara berkelanjutan	a. Meningkatnya kontribusi koperasi, UMKM, perdagangan, pariwisata dan perindustrian
	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	a. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Tabel di atas sudah sangat jelas menghubungkan antara visi Kepala Daerah **"Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera"** yang dijabarkan dalam empat misi utama yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan public;
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Guna mengoperasionalkan misi-misi tersebut di atas dibutuhkan arah misi atau orientasi pembangunan, sehingga setiap langkah pembangunan menjadi jelas tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan umum pembangunan Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Rumusan kebijakan umum urusan Wajib, terdiri dari :

1. Pendidikan:

- a. Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Percepatan Pencapaian SPM dan Standar Nasional;
- b. Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan, diseluruh jejang pendidikan;
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal lainnya;

- d. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan serta mengoptimalkan kualitas dan jaringan kerjasama;
- e. Mengoptimalkan program-program rutin dalam menunjang pencapaian target program prioritas pembangunan jangka menengah.

2. Kesehatan:

- a. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan jenis sarana dan prasarana kesehatan;
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu;
- d. Meningkatkan upaya pencarian (*case finding*) anak balita dengan gizi buruk dan gizi kurang;
- e. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder dan pencegahan tersier penyakit-penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, *demam dengue*, TBC, diare, dan penyakit menular lainnya;
- f. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan;
- g. Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan;
- h. Peningkatan kuantitas, kualitas dan jenis obat-obatan.

3. Lingkungan Hidup :

- a. Mengoptimalkan potensi, keselarasan/pelestarian tatanan lingkungan hidup;
- b. Pengembangan berbagai sarana dan prasarana lingkungan dan peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup;
- c. Pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- d. Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
- e. Peningkatan Pengelolaan Limbah/Sampah Padat dan Cair.

4. Pekerjaan Umum:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur publik yang memadai seperti jalan dan jembatan Kota dan Kelurahan untuk menunjang distribusi barang/jasa ke dan dari pusat pertumbuhan ekonomi (sentra-sentra ekonomi);
- b. Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air dalam memenuhi hajat hidup masyarakat;
- c. Mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyarakat;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Penataan ruang :

- a. Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan tata ruang agar sesuai dengan peruntukannya;
- b. Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan peraturan/ peraturan daerah tata ruang dan peruntukannya.
- c. Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, guna memayungi kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

6. Perencanaan Pembangunan :

- a. Peningkatan kualitas data dan informasi serta melakukan kajian untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang berkualitas;
- b. Pengembangan data dan informasi;
- c. Penguatan data dan informasi bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka proyeksi pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

7. Perumahan :

Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah Kota Madiun serta tetap mengacu keselarasan dengan daya dukung lingkungan.

8. Pemuda dan Olah Raga:

- a. Meningkatkan pembinaan olahraga di kalangan masyarakat dan pemuda;
- b. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kepemudaan; dan
- c. Mengoptimalkan program-program rutin dalam menunjang pencapaian target program prioritas pembangunan jangka menengah.

9. Urusan Penanaman Modal :

Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik para investor.

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

- a. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif;
- b. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul.

11. Kependudukan dan Catatan Sipil :

Penataan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang handal.

12. Ketenagakerjaan :

- a. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.
- b. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.

13. Ketahanan Pangan :

Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan di Kota Madiun.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Melaksanakan upaya-upaya advokasi untuk mengurangi diskriminasi dan penguatan kelembagaan;
- b. Meningkatkan perlindungan dan kualitas perempuan agar dapat lebih mandiri dalam melakukan aktivitasnya; dan
- c. Meningkatkan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai tindak kekerasan.

15. Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta Keluarga Berencana dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
- b. Meningkatkan *current use* (prevalensi) dan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (IUD, tubektomi dan vasektomi).
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan KB di seluruh kecamatan se Kota Madiun.

16. Perhubungan :

- a. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasaranan transportasi masyarakat;
- b. Peningkatan dan pengembangan rambu-rambu jalan untuk keselamatan pengguna kendaraan dan pejalan dalam rangka menekan korban kecelakaan lalu lintas;
- c. Revitalisasi dan penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan;
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dalam mendukung pembangunan di Kota Madiun serta menjaga konektivitas wilayah.

17. Komunikasi dan Informatika

- a. Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerja sama dengan media massa dalam rangka menginformasi berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

18. Pertanahan :

Peningkatan dan pengembangan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:

- a. Meningkatkan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta kerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, media massa dan partai politik.
- b. Mengurangi semaksimal mungkin terjadinya friksi dan konflik baik antar agama, antar golongan, dan antar ras/suku;
- c. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti : Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan Negeri dalam rangka menciptakan Kondisi Masyarakat tertib hukum.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian:

- a. Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Mendorong tercipta partisipasi masyarakat untuk taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- d. Pengembangan sistem informasi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan;
- e. Peningkatan dan pengembangan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah;
- f. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- g. Pengembangan sistem pertanggungjawaban keuangan dan kinerja daerah;
- h. Peningkatan dan pengembangan kerjasama antar kabupaten/kota se Provinsi Jawa Timur;
- i. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;

- j. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah bagi penyelenggara pemerintah daerah di Kota Madiun.

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat diseluruh kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang.

22. Sosial :

- a. Penggalan dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas untuk umum; dan
- c. Melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan penyandang masalah sosial.

23. Kebudayaan :

Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

24. Statistik :

Meningkatkan kualitas data dan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

25. Kearsipan:

Meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas tenaga dan sarana serta prasarana kearsipan modern yang berbasis Informasi Tehnologi (IT);

26. Perpustakaan:

Peningkatkan budaya gemar membaca dikalangan masyarakat, khususnya dikalangan pelajar/mahasiswa.

Rumusan kebijakan umum urusan pilihan, terdiri dari :

1. Pertanian :

- a. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani;
- b. Peningkatan peran sektor pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan;
- c. Mengembangkan pertanian dalam arti luas yang tangguh menuju kemandirian, kesejahteraan dan keadilan;
- d. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi.

2. Kehutanan :

Peningkatan kualitas perencanaan Kehutanan yang berkelanjutan.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral :

Peningkatan pembinaan dan pengawasan di bidang Energi dan Sumber daya Mineral;

4. Pariwisata :

Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

5. Perindustrian :

- a. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing;
- b. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri.

6. Perdagangan :

- a. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal;
- b. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

7. Ketrasmigrasian

Peningkatan dan pengembangan kualitas layanan bidang ketrasmigrasian.

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya.

4.3.2. Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2017

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2017 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan;

TUJUAN		INDIKATOR	
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan		Indekas Pendidikan	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	10,84 Tahun	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Angka Melek Huruf	100%	

2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan;

TUJUAN		INDIKATOR	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Indekas Kesehatan	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,8 Tahun	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI)	51,35%	
	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,57%	

TUJUAN		INDIKATOR	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Indekas Kesehatan	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
			Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
			Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD
			Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Minuman
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
			Program Upaya Pencegahan Masalah Kesehatan
			Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
			Program Pengendalian Penyakit
			Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Kesehatan
			Program Kesehatan Ibu
			Program Kesehatan Bayi dan Balita
			Program Upaya Penyehatan Lingkungan
			Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya

3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;

TUJUAN		INDIKATOR	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	
		PDRB Per Kapita	
		Angka Kemiskinan	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Nilai realisasi investasi	310 M	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,95%	
			Program perlindungan dan pengembangan kelembagaan ketenagakerjaan

TUJUAN		INDIKATOR	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	
		PDRB Per Kapita	
		Angka Kemiskinan	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
			Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
			Program Terselenggaranya Pengiriman Tenaga Kerja Dengan Tertib
			Program Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
			Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
			Program Ketransmigrasian
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya kontribusi koperasi, UMKM, perdagangan, pariwisata dan perindustrian terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB	50,1%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	15,67%	Program Peningkatan dan Pengembangan Export
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
			Program Pembinaan PKL dan Asongan
			Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
			Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi KUMKM
			Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program pengembangan pemasaran pariwisata
			Program pengembangan destinasi pariwisata
			Program pengembangan Industri
			Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

TUJUAN		INDIKATOR	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	
		PDRB Per Kapita	
		Angka Kemiskinan	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Rasio ketersediaan pangan		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya
	PDRB per kapita	50,87	
	Indeks Gini	0,33	Program Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			Program Pelayanan PMKS
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			Program Pelayanan PMKS
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
			Program Peningkatan produksi pertanian/Perkebunan
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan
			Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	

5. Peningkatan Pelayanan Publik;

TUJUAN	INDIKATOR
Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	108	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kecil Kelurahan
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
			Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
			Program Keluarga Berencana
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Genre)
			Program Pelayanan Kontrasepsi
			Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
			Program Pengembangan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak dan Remaja
			Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KS dengan mandiri
			Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	84,23%	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	77,5%	

TUJUAN		INDIKATOR	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Program Pengembangan data dan Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Program Pengembangan Kajian dan Penelitian Program Penerapan Akuntabilitas Kinerja Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	BB	
	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	
	Indeks Kepuasan Masyarakat		

TUJUAN		INDIKATOR	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
			Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa
			Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
			Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan
			Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Peningkatan Kapasitas DPRD
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru
			Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
			Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah
			Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
			Program peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
			Program Peningkatan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

TUJUAN		INDIKATOR	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
			Program Penyusunan Analisis, Kompetensi dan Evaluasi Jabatan
			Program Peningkatan Kualitas Pendayagunaan Aparatur Negara
			Program Penataan kelembagaan Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			Program peningkatan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
			Program Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja Daerah
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
			Program Penyelenggaraan Kelurahan
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Persandian

TUJUAN		INDIKATOR	
Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif		Prosentase gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang tertangani	
		Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Rasio konflik bermotif SARA yang terselesaikan	100%	Program Pengembangan Nilai Budaya
			Pengelolaan Kekayaan Budaya
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
			Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
			Program pembinaan dan pemasyarakatan olah

TUJUAN		INDIKATOR	
Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif		Prosentase gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang tertangani	
		Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
			raga
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
			Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban
			Program Pendidikan Politik Masyarakat
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka Kriminalitas tertangani	100%	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
		100%	Program Pemberdayaan Satpol dalam Pelaksanaan Tugas
	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat		
	Program Pemeliharaan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		
	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		

6. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

TUJUAN		INDIKATOR	
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan		Penghargaan dalam penyelenggaraan transportasi publik dengan baik	
		Penghargaan dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM

TUJUAN		INDIKATOR	
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan		Penghargaan dalam penyelenggaraan transportasi publik dengan baik	
		Penghargaan dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik	88,7%	Program pembangunan jalan dan jembatan
	Rasio rumah layak huni	95,5%	Program pembangunan saluran/drainase/ gorong-gorong
			Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
			Program Inspeksi Jalan dan Jembatan
			Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
			Program pengendalian banjir
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi
			Program lingkungan sehat perumahan
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas			
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Prosentase penanganan sampah	95,35%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	17	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

TUJUAN		INDIKATOR	
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan		Penghargaan dalam penyelenggaraan transportasi publik dengan baik	
		Penghargaan dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau
			Program Perencanaan Tata Ruang
			Program Pemanfaatan Ruang
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
			Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah di atas dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas sebagai berikut ini.

Tabel 4. 2
Matriks Program Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
0				Urusan Pendukung Pemerintahan		
0	1	xx		Perencanaan Pembangunan		
0	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	1	1	2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	1	1	3	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	1	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	1	1	15	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengakomodir Kepentingan Masyarakat Kota Madiun	11 dokumen
0	1	1	16	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 dokumen
0	1	1	17	Program perencanaan pembangunan sosial budaya;	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	2 dokumen
0	1	1	18	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	2 dokumen

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
0	1	1	19	Program Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Persentase PD dengan Nilai Akuntabilitas Baik	60%
0	2	xx		Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)		
0	2	1	15	Program pengembangan data dan informasi;	Dokumen data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersedia	2 dokumen
0	2	1	16	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Jumlah Kajian dan Penelitian	2 dokumen
0	3	xx		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
0	3	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	3	2	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	3	2	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	3	2	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	3	2	15	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat	10%
0	3	2	16	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	0
0	3	2	17	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kemitraan dengan elemen masyarakat	9
0	3	2	18	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase parpol yang memahami regulasi	100%
0	4	xx		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
0	4	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	4	3	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	4	3	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	4	3	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	4	3	15	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi	100%
0	4	3	16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Realisasi Penataan Pegawai	100%
0	4	3	17	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan	93%
0	5	xx		Keuangan		
0	5	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	5	4	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	5	4	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	5	4	4	Program Pemeliharaan Barang	Persentase Barang Inventarisasi dalam	100%

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
0	5	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	5	5	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	5	5	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	5	5	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	5	4	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak daerah	1,96%
0	5	4	16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah	100%
0	5	5	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak daerah	100%
0	6	xx		Inspektorat		
0	6	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	6	6	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	6	6	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	6	6	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	6	6	15	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan Kinerja dengan baik	82%
0	6	6	16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparatur pengawas yang mengikuti bimtek dan bersertifikat	90 orang/kali
0	6	6	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	Jumlah aparatur pemerintah yang hadir dan mampu menjawab pertanyaan	100 orang
0	6	6	18	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase dokumen kebijakan dan prosedur pengawasan yang telah dipenuhi dan ditetapkan	75%
0	6	6	19	Program peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai rata-rata pada komponen yang dinilai	70 poin
0	6	6	20	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase PD yang telah melakukan SAKIP	100%
0	6	6	21	Program Peningkatan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	Persentase PD yang telah melaksanakan SPI	100%
0	7	xx		Sekretariat Daerah		
0	7	7	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	7	7	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	7	7	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
0	7	7	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	7	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	7	8	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	7	8	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	7	8	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	7	9	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	7	9	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	7	9	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	7	9	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	7	10	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	7	10	2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	7	10	3	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	7	10	4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	7	11	15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Didang Pemerintahan	47 kali
0	7	11	16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan daerah Lain	4 kali
0	7	11	17	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Otda	5 kali/1.285 buah/1.355 orang
0	7	11	18	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi	100%
0	7	8	19	Program peningkatan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah	Jumlah pedoman dan prosedur kerja ketatalaksanaan	1 dokumen
0	7	8	20	Program Penyusunan Analisis, Kompetensi dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen	13 dokumen
0	7	8	21	Program Peningkatan Kualitas Pendayagunaan Aparatur Negara	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map RB	60%
0	7	8	22	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Kelompok User yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	3 (tiga)
0	7	8	23	Program Penataan kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Kelembagaan yang sesuai dengan Perundang-Undangan	100%
0	7	8	24	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%
					Persentase Capaian SPM	81%
0	7	10	25	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	100%
0	7		26	Program Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja Daerah	Jumlah Dokumen	4 dokumen

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
0	8	xx		Sekretariat DPRD		
0	8	12	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	8	12	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	8	12	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	8	12	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	8	12	15	Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat Waktu	100%
0	9	xx		Kecamatan		
0	9	13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	9	13	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	9	13	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	9	13	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	9	14	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	9	14	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	9	14	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	9	14	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	9	15	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
0	9	15	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
0	9	15	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
0	9	15	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
0	9		15	Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	100%
0	9		16	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100%
0	9		17	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban	500 Orang
0	9		19	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Jumlah Peserta Olah Raga	400 orang
0	9		20	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penonton dalam pentas seni	18.400 peserta
			21	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan	3.900 penonton
Jumlah Urusan Pendukung Pemerintahan					9	17.750 rekomendasi

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
1				Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
1	1	xx		Pendidikan		
1	1	16	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
1	1	16	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
1	1	16	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
1	1	16	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
1	1	16	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	100%
1	1	16	16	Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	100%
1	1	16	17	Program Pendidikan Menengah	Aangka Partisipasi Murni SMA/SMK	100%
1	1	16	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	100%
1	1	16	19	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Profesional	2221
1	1	16	20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100%
1	2	xx		Kesehatan		
1	2	17	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
1	2	17	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
1	2	17	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
1	2	18	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
1	2	18	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
1	2	18	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
1	2	18	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
1	2	18	15	Program Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100%
1	2	18	16	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	82,19%
1	2		17	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	89,55%
1	2	18	18	Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Minuman	Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	100%
1	2	18	19	Program Upaya Pencegahan Masalah Kesehatan	Persentase Penduduk yang diskriming Faktor Resiko PTM	60%
1	2	18	20	Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI	68%
1	2	18	21	Program Pengendalian Penyakit	Jumlah Kasus pada KLB	16 kasus
1	2	18	22	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Kesehatan	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	155
1	2	18	23	Program Kesehatan Ibu	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart	100%

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
1	2	18	24	Program Kesehatan Bayi dan Balita	Persentase Balita Gizi Kurang	12,22%
1	2	18	25	Program Upaya Penyehatan Lingkungan	Persentase TTU dan TPM sehat	83%
1	2	18	26	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Kecukupan alat kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	96%
1	2	17	27	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standart	89,55
1	3	xx		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	19	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
1	3	19	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
1	3	19	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
1	3	19	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
1	3	19	15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik	89,5
1	3	19	16	Program pembangunan saluran/drainase/ gorong-gorong	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	73
1	3	19	17	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	372.000 km
1	3	19	18	Program Inspeksi Jalan dan Jembatan	Jumlah ruas jalan yang diusulkan Pemeliharaannya	40 ruas jalan
1	3	19	19	Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase tersedianya Informasi Data Base Jalan	100%
1	3	19	20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rasio Tercukupinya Sarpras Sesuai dengan Kebutuhan	20%
1	3	19	21	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Rumah Tinggal yang terlayani instalasi air limbah RT	30%
1	3	19	22	Program pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Banjir	100%
1	3	19	23	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase kualitas pelayanan jasa konstruksi	100%
1	3		25	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen
					Tersedianya Pedoman Perencanaan Teknis Tata Ruang	3 dokumen
1	3	19	26	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	100%
1	3	19	27	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%
1	4	xx		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1	4	19	15	Program lingkungan sehat perumahan	Rasio rumah layak huni	98,45%
1	4	20	16	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum yang dikelola	1,28%

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
1	5	xx		Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	5	21	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
1	5	21	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
1	5	21	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
1	5	21	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
1	5	22	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
1	5	22	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
1	5	22	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
1	5	22	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
1	5	22	15	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota	100%
1	5	22	16	Program Pemberdayaan Satpol dalam Pelaksanaan Tugas	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3,6
1	5	22	17	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	57
1	5	22	18	Program Pemeliharaan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP perhari	6 kali
1	5	22	19	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan	14
1	5	21	20	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;	Persentase Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%
1	5	21	21	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%
1	6	xx		sosial		
1	6	23	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
1	6	23	2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
1	6	23	3	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
1	6	23	4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-
1	6	24	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	Jumlah penerima bantuan	700
1	6	24	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	10 panti

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
1	6	24	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan	83%
1	6		18	Program Pelayanan PMKS	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1600
Jumlah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					6	
2						
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar						
2	1	xx		Tenaga Kerja		
2	1	24	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
2	1	24	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
2	1	24	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
2	1	24	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
2	1	24	15	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	82
					Pencari kerja yang ditempatkan	73%
2	1	24	16	Program peningkatan kesempatan kerja	Rasio ketergantungan	43,99
2	1	24	17	Program perlindungan dan pengembangan kelembagaan ketenagakerjaan	Jumlah Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1.500
					Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	90
					Prosentase Pekerja yang mendapat jaminan sosial	86%
2	1	24	18	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,95
2	1	24	19	Program Terselenggaranya Pengiriman Tenaga Kerja Dengan Tertib	Jumlah kegiatan	1 kegiatan
2	1	24	20	Program Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah kegiatan	4 kegiatan
2	2	xx		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	2	25	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
2	2	25	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
2	2	25	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
2	2	25	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
2	2	25	15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	78,12
2	2	25	16	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	partisipasi perempuan di lembaga swasta	80,55

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
2	2	25	17	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	11,29
2	2	25	18	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%
2	3	xx		Pangan		
2	3	25	15	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Regulasi ketahanan pangan	ada
2	4	xx		Pertanahan		
2	4	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
2	4	11	2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
2	4	11	3	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
2	4	11	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-
2	4	11	15	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan	Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	8
2	5	xx		Lingkungan Hidup		
2	5	26	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
2	5	26	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
2	5	26	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
2	5	26	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
2	5	27	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
2	5	27	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
2	5	27	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
2	5	27	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
2	5		15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah yang Tertangani	103.015,7 M ³
					Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Madiun	100%
2	5		16	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Hasil Penilaian memenuhi passing grade yang ditetapkan Tim Penilai Adipura	Ya
					Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	100%
2	5	26	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber-sumber air yang berfungsi dengan layak dan Baik	100%
2	5	26	18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan	100%
2	5	27	19	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Ruang Terbuka Hijau Kondisi Baik	19,4 Ha

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
2	6	xx		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	6	27	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
2	6	27	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
2	6	27	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
2	6	27	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
2	6	27	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%
					Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%
					Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	90%
					Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	50%
2	6	27	16	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersesuaian database kependudukan skala nasional	99%
					IKM	79%
2	7	xx		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2	7	25	15	Program peningkatan keberdayaan masyarakat	Jumlah Alat yang dipromosikan	1
2	7	25	16	Program pengembangan lembaga ekonomi kecil kelurahan	Jumlah LKK Sehat	27
2	7	25	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	Jumlah LPMK Aktif	27
2	7	25	18	Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Posyandu Balita	270
2	8	xx		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	8	25	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Baru	3.705
2	8	25	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Genre)	Jumlah kelompok	8 kelompok
2	8	25	17	Program pelayanan kontrasepsi	Rasio akseptor KB	11,6
2	8	25	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah pembinaan	18
2	8	25	19	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja	Jumlah kegiatan	4 kegiatan
2	8	25	20	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS dengan mandiri	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	16
2	8	25	21	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,95
2	9	xx		Perhubungan		
2	9	28	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
2	9	28	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
2	9	28	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
2	9	28	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
2	9	28	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rasio Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	0,85
2	9	28	16	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	78
2	9	28	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	IKM	80
1	9	28	18	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas.	Cakupan Tingkat Keselamatan	70
1	9	28	19	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang melakukan Uji Kendaraan	6.249
2	10	xx		Komunikasi dan Informatika		
2	10	29	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
2	10	29	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
2	10	29	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
2	10	29	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
2	10		15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	Jumlah Media Elektronik Milik Pemerintah Kota	1
					Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi	2079 kali
2	10	28	16	Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah Menara Telekomunikasi	66
2	10	28	17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM Penyiaran	3 Jenis
2	10	29	18	Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa	Web site PPID Kota Madiun	ada
2	11	xx		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
2	11	30	15	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Cakupan Bina UKM	2,66%
2	11	30	16	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	303 unit
2	11	30	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi KUMKM	Jumlah Promosi KUMKM	10 kali
2	12	xx		Penanaman Modal		
2	12	31	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
2	12	31	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
2	12	31	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
2	12	31	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
2	12	31	15	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rasio Izin yang diterbitkan	94%

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
2	12	23	16	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah Nilai Investasi di Kota Madiun (PMDN/PMA)	310 M
2	12	23	17	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	100%
2	13	xx		Kepemudaan dan Olahraga		
2	13	23	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;	Jumlah kegiatan kepemudaan	3 bh kegiatan
2	13	16	16	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Prestasi Olah Raga tingkat Regional dan Nasional	5
2	13	23	17	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Jumlah Kegiatan Olahraga	2 bh
2	13	19	18	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	70%
2	14	xx		Statistik		
2	14	1	15	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dokumen Statistik Daerah yang Tersusun	2 dokumen
2	15	xx		Persandian		
2	15	7	15	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Persandian	Jumlah SDM Persandian	2
2	16	xx		Kebudayaan		
2	16	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Seni Budaya Lokal yang dikompetisikan	7 Paket
2	16		16	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Budaya Lokal yang dipentaskan	12 paket
					Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	100%
2	16		17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Budaya Lokal yang dilestarikan	5 paket
					Jumlah Group Kesenian	1 group
					Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100%
2	17	xx		Perpustakaan		
2	17	32	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
2	17	32	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
2	17	32	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
2	17	32	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
2	17	16	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemenuhan Sarpras Perpustakaan	100%
2	17	32	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan	14,6% (25.900 org)
					Jumlah Pengunjung Perpustakaan	25.900 org
2	18	xx		Kearsipan		
2	18	32	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Arsip di Depo yang masuk data base	-
2	18	32	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase Arsip yang diselamatkan	35% (51 unit)
2	18	32	17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Pengelola Arsip yang mempunyai Kompetensi	39% (765 org)

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
2	18	32	18	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase arsip yang terpelihara	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar				18		
3				Urusan Pemerintahan Pilihan		
3	1	xx		Kelautan Dan Perikanan		
3	1	33	15	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi ikan Konsumsi hasil Budidaya	211,68 ton
					Benih ikan yang dihasilkan RTP & BBI	1.750.000 ekor
3	1	33	16	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Ragam Produk Olahan yang bernilai tambah	2 jenis
3	2	xx		Pariwisata		
3	2	30	15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Promosi Pariwisata	3 kali
3	2	30	16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Event Kepariwisata	5 kali
3	3	xx		Pertanian		
3	3	33	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
3	3	33	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	3	33	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
3	3	33	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
3	3	33	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rata-rata Pendapatan Petani Per Hektar	6.075.000
3	3	33	16	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Olahan Pangan Komoditi Pertanian	7 komoditi
3	3	33	17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Teknologi Pertanian	2 unit
3	3	33	18	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah Kasus Penyakit Hewan	60 kasus
3	3	33	19	Program Peningkatan produksi pertanian/Perkebunan	Produksi Tanaman Pangan (Pajale/Padi, Jagung dan Kedelai)	18.500 ton
3	3	33	20	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Daging	1.500 ton
3	3	33	21	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Produk Olahan ternak	3 jenis
3	3	33	22	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Hewan Ternak di Kota Madiun	74.000 ekor
3	4	xx		Kehutanan		
3	4	33	15	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Areal Lahan Penghijauan	2 ha
3	4	33	16	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Jumlah Pembinaan Penataan Hasil Hutan	1 kali
3	5	xx		Energi dan Sumber Daya Mineral		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017
1				2	3	4
3	5	30	15	Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Laporan Pengawasan di Bidang ESDM	2 laporan
3	6	xx		Perdagangan		
3	6	34	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
3	6	34	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	6	34	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
3	6	34	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
3	6		15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal	75%
					Omset Pasar Tradisional	158.335,86 juta
					Jumlah Pasar Tradisional yang dikelola Dinas Pasar Kota Madiun	17 pasar
3	6	30	16	Program Peningkatan dan Pengembangan Export	Persentase Peningkatan Ekspor perdagangan	15%
3	6	30	17	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah Promosi Produk yang dilaksanakan	7 kali
3	6	30	18	Program Pembinaan PKL dan Asongan	Cakupan PKL yang dibina	75%
3	6	30	19	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah Pemantauan yang dilaksanakan	4 kali
3	7	xx		Perindustrian		
3	7	30	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%
3	7	30	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	7	30	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%
3	7	30	4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%
3	7	30	15	Program pengembangan Industri	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kadar tar & nikotin hasil tembakau	4 kali/tahun
3	7	30	16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM dan IRT	283 unit
3	8	xx		Transmigrasi		
3	8	24	15	Program Ketransmigrasian	Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja	1 pkt
Urusan Pemerintahan Pilihan					8	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014-2019 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan dalam hasil Musrenbang Tahun 2017, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah untuk Tahun 2017 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Kota Madiun Tahun 2017. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pembangunan Kota Madiun pada Tahun 2017 diarahkan pada pencapaian prioritas sbb:

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan;
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan;
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Pelayanan Publik;
6. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaannya, enam prioritas pembangunan daerah Kota Madiun dijabarkan ke dalam program dan kegiatan serta pagu indikatifnya per SKPD seperti dalam tabel berikut :

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014-2019 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan dalam hasil Musrenbang Tahun 2017, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah untuk Tahun 2017 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Kota Madiun Tahun 2017. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pembangunan Kota Madiun pada Tahun 2017 diarahkan pada pencapaian prioritas sbb:

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan;
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan;
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Pelayanan Publik;
6. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaannya, enam prioritas pembangunan daerah Kota Madiun dijabarkan ke dalam program dan kegiatan serta pagu indikatifnya per PD seperti dalam tabel berikut :

Tabel 5. 1
Prioritas 1 : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1 1	Pendidikan				71.182.331.000					
1 1 1 1 0 5 1 1 0 1 1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database Informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK		100%	813.000.000	APBD Kota : 813.000.000				
	1 Kegiatan Entri Data Peserta Didik, PTK dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	141 lembaga	115.000.000	APBD Kota : 115.000.000	-	141 lembaga	121.551.000	Dinas Pendidikan
	2 Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN)	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	49 lembaga	45.000.000	APBD Kota : 45.000.000	-	49 lembaga	40.517.000	Dinas Pendidikan
	3 Kegiatan Asistensi Pelatihan Web/updating data pendidikan	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	5 Dokumen	130.000.000	APBD Kota : 130.000.000	-	5 Doku men	98.398.000	Dinas Pendidikan
	4 Kegiatan Operasional BOS Tingkat Kota	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	142 lembaga	180.000.000	APBD Kota : 180.000.000	-	142 lembaga	115.763.000	Dinas Pendidikan
	5 Kegiatan Pembinaan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan	Jumlah Orang	Kota Ma diun	316 orang	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000	-	316 orang	92.610.000	Dinas Pendidikan
	6 Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Informasi Pendidikan Berbasis IT	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	142 lembaga	123.000.000	APBD Kota : 123.000.000	-	142 lembaga	109.974.000	Dinas Pendidikan
	7 Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	49 lembaga	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	-	49 lembaga	110.000.000	Dinas Pendidikan
1 1 1 1 0 6 1 1 0 1 1	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		100%	26.533.558.000	APBD Kota : 26.533.558.000				
	1 Kegiatan Olimpiade Sain	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	400 Siswa	175.919.000	APBD Kota : 175.919.000	-	400 Siswa	155.631.000	Dinas Pendidikan
	2 Kegiatan Lomba Karya Ilmiah	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	270 Siswa	68.154.000	APBD Kota : 68.154.000	-	270 Siswa	68.300.000	Dinas Pendidikan
	3 Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	12 lembaga	63.135.000	APBD Kota : 63.135.000	-	12 lembaga	49.199.000	Dinas Pendidikan
	4 Kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	42 lembaga	86.186.000	APBD Kota : 86.186.000	-	42 lembaga	83.349.000	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	Kegiatan Operasional Wajar Dikmen 12 Tahun	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	10414 Siswa	36.646.000	APBD Kota : 36.646.000	-	10414 Siswa	36.698.000	Dinas Pendidikan
	6	Kegiatan Lomba Kopetensi Siswa SMK	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	30 lembaga	332.267.000	APBD Kota : 332.267.000	-	30 lembaga	269.148.000	Dinas Pendidikan
	7	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dunia Usaha Dunia Industri	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	30 lembaga	440.145.000	APBD Kota : 440.145.000	-	30 lembaga	124.387.000	Dinas Pendidikan
	8	Kegiatan Try Out Unas SMA/SMK	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	42 lembaga	401.913.000	APBD Kota : 401.913.000	-	42 lembaga	453.442.000	Dinas Pendidikan
	9	Kegiatan Festival Lomba Seni Nasional	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	12 lembaga	77.029.000	APBD Kota : 77.029.000	-	12 lembaga	73.075.000	Dinas Pendidikan
	10	Kegiatan Lomba Cerdas Cermat PKN, Pancasila, UUD 45, Tap MPR, Bhineka Tunggal Ika SMA/SMK	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	42 lembaga	74.220.000	APBD Kota : 74.220.000	-	42 lembaga	71.344.000	Dinas Pendidikan
	11	Kegiatan Jawara SMK	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	30 lembaga	82.700.000	APBD Kota : 82.700.000	-	30 lembaga	82.886.000	Dinas Pendidikan
	12	Kegiatan Lomba Siswa Teladan Tingkat SMA	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	12 lembaga	53.572.000	APBD Kota : 53.572.000	-	12 lembaga	42.832.000	Dinas Pendidikan
	13	Kegiatan Pembinaan KKG MGMP Mapel UN SMA dan SMK	Jumlah Guru	Kota Ma diun	401 Guru	206.164.000	APBD Kota : 206.164.000	-	401 Guru	150.000.000	Dinas Pendidikan
	14	Kegiatan Sosialisasi dan Seleksi Bantuan Beasiswa Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa	Kota Ma diun	100 mahasiswa	26.600.000	APBD Kota : 26.600.000	-	100 mahasiswa	30.793.000	Dinas Pendidikan
	15	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 1	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	2.237.845.000	APBD Kota : 2.237.845.000	-	1 lembaga	1.390.354.000	Dinas Pendidikan
	16	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 2	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	2.505.007.000	APBD Kota : 2.505.007.000	-	1 lembaga	1.372.295.000	Dinas Pendidikan
	17	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 3	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	2.220.000.000	APBD Kota : 2.220.000.000	-	1 lembaga	1.097.520.000	Dinas Pendidikan
	18	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 4	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	1.638.231.000	APBD Kota : 1.638.231.000	-	1 lembaga	1.162.813.000	Dinas Pendidikan
	19	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 5	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	2.934.436.000	APBD Kota : 2.934.436.000	-	1 lembaga	1.328.954.000	Dinas Pendidikan
	20	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 6	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	2.017.840.000	APBD Kota : 2.017.840.000	-	1 lembaga	1.123.084.000	Dinas Pendidikan
	21	Kegiatan Penyelenggaraan SMKN 1	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	2.288.520.000	APBD Kota : 2.288.520.000	-	1 lembaga	2.594.887.000	Dinas Pendidikan
	22	Kegiatan Penyelenggaraan SMKN 2	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	2.143.035.000	APBD Kota : 2.143.035.000	-	1 lembaga	1.081.080.000	Dinas Pendidikan
	23	Kegiatan Penyelenggaraan SMKN 3	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	2.032.540.000	APBD Kota : 2.032.540.000	-	1 lembaga	1.082.640.000	Dinas Pendidikan
	24	Kegiatan Penyelenggaraan SMKN 4	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	2.258.441.000	APBD Kota : 2.258.441.000	-	1 lembaga	393.640.000	Dinas Pendidikan
	25	Kegiatan Penyelenggaraan SMKN 5	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	1.667.638.000	APBD Kota : 1.667.638.000	-	1 lembaga	380.640.000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				2 6	Kegiatan Workshop Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum SMA/SMK	Jumlah Guru	Kota Ma diun	300 Guru	165.375.000	APBD Kota : 165.375.000	-	300 Guru	173.640.000	Dinas Pendidikan
				2 7	Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa dan Jawara SMK (BK.Provinsi)	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	30 lembaga	300.000.000	APBD Kota : 300.000.000	-	30 lembaga	320.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	1		Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf		100%	978.000.000	APBD Kota : 978.000.000				
				1	Kegiatan Gebyar PNF dalam Rangka Hari Aksara Internasional (HAI)	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	80 lembaga	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000	-	80 lembaga	40.517.000	Dinas Pendidikan
				2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C	Jumlah Wajib Belajar	Kota Ma diun	120 Wajib Belajar	83.000.000	APBD Kota : 83.000.000	-	120 Wajib Belajar	86.822.000	Dinas Pendidikan
				3	Kegiatan Gebyar PNF dalam Rangka Hari Aksara Internasional (HAI) BK Prov	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	80 lembaga	10.000.000	APBD Kota : 10.000.000	-	80 lembaga	11.000.000	Dinas Pendidikan
				4	Kegiatan Akreditasi Pendidikan Non Formal dan PAUD	Jumlah lembaga	Kota Ma diun	177 lembaga	135.000.000	APBD Kota : 135.000.000	BARU	177 lembaga	140.000.000	Dinas Pendidikan
				5	Kegiatan Workshop Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Orang	Kota Ma diun	90 orang	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	90 orang	115.763.000	Dinas Pendidikan
				6	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Perpustakaan Sekolah Secara Periodik	Jumlah Paket	Kota Ma diun	1 paket	45.000.000	APBD Kota : 45.000.000	-	1 paket	23.153.000	Dinas Pendidikan
				7	Kegiatan Bimbingan Teknis Ekstra Kurikuler Pembina Pramuka	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	135 Lembaga	500.000.000	APBD Kota : 500.000.000	-	135 lembaga	289.406.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	1		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Profesional		2.221 Orang	2.160.960.000	APBD Kota : 2.160.960.000				
				1	Kegiatan Sertifikasi Guru	Jumlah Guru	Kota Ma diun	125 orang	158.900.000	APBD Kota : 158.900.000	-	300 orang	86.822.000	Dinas Pendidikan
				2	Kegiatan Pelatihan SDM Guru PAUD di Kota Madiun	Jumlah Guru	Kota Ma diun	11650000 0 orang	116.500.000	APBD Kota : 116.500.000	-	100 orang	115.763.000	Dinas Pendidikan
				3	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru Kelas	Jumlah Guru	Kota Ma diun	100 orang	205.000.000	APBD Kota : 205.000.000	-	100 orang	115.763.000	Dinas Pendidikan
				4	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	Jumlah Guru	Kota Ma diun	500 orang	129.000.000	APBD Kota : 129.000.000	-	500 orang	115.763.000	Dinas Pendidikan
				5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	253 lembaga	145.000.000	APBD Kota : 145.000.000	-	253 lembaga	115.763.000	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	6	Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan OSN	Jumlah Orang	Kota Ma diun	125 peserta	379.000.000	APBD Kota : 379.000.000	-	125 peserta	202.584.000	Dinas Pendidikan	
	7	Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah	Kota Ma diun	156 orang	71.260.000	APBD Kota : 71.260.000	-	156 orang	57.881.000	Dinas Pendidikan	
	8	Kegiatan Bantuan Pendidikan S1/S2/S3 PGSD	Jumlah Guru	Kota Ma diun	24 orang	128.100.000	APBD Kota : 128.100.000	-	65 orang	300.983.000	Dinas Pendidikan	
	9	Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik	Jumlah Guru	Kota Ma diun	1000 orang	420.000.000	APBD Kota : 420.000.000	-	1000 orang	104.186.000	Dinas Pendidikan	
	10	Kegiatan Workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Jumlah Guru	Kota Ma diun	100 orang	300.000.000	APBD Kota : 300.000.000	-	255 orang	86.822.000	Dinas Pendidikan	
	11	Kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Agama Islam (SMP,SMA,SMK)	Jumlah Guru	Kota Ma diun	50 orang	88.200.000	APBD Kota : 88.200.000	-	80 orang	92.610.000	Dinas Pendidikan	
	12	Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi Tingkat Kecamatan (BK Prov)	Jumlah Guru	Kota Ma diun	36 orang	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000	-	40 orang	25.000.000	Dinas Pendidikan	
1	1	1	1	1	0	9	Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	100%	39.074.355.000	APBD Kota : 39.074.355.000	
	1	Gerakan Disiplin Siswa	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	262 lembaga	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	262 lembaga	115.763.000	Dinas Pendidikan	
	2	Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS)	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	260 lembaga	260.000.000	APBD Kota : 260.000.000	-	260 lembaga	173.644.000	Dinas Pendidikan	
	3	Kegiatan Pelaksanaan USBN Pendidikan Agama	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	168 lembaga	105.000.000	APBD Kota : 105.000.000	-	168 lembaga	115.763.000	Dinas Pendidikan	
	4	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus TK, SD	Jumlah Gugus	Kota Ma diun	34 Gugus Sekolah	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	18 Gugus Sekolah	75.000.000	Dinas Pendidikan	
1	5	Kegiatan Lomba Cerdas Cermat SD dan SMP	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	90 Siswa	198.651.000	APBD Kota : 198.651.000	-	90 Siswa	145.604.000	Dinas Pendidikan	
	6	Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Sekolah	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	40 lembaga	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000	-	40 lembaga	58.263.000	Dinas Pendidikan	
	7	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kantin Kejujuran SD dan SMP	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	5 lembaga	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	-	5 lembaga	29.543.000	Dinas Pendidikan	
	8	Kegiatan Best Practise Pendidikan Karakter	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	92 lembaga	476.000.000	APBD Kota : 476.000.000	-	92 lembaga	335.711.000	Dinas Pendidikan	
	9	Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	192 Siswa	355.000.000	APBD Kota : 355.000.000	-	192 Siswa	350.356.000	Dinas Pendidikan	
	10	Komunitas Pembelajaran	Jumlah Peserta	Kota Ma diun	240 orang	215.000.000	APBD Kota : 215.000.000	-	240 orang	133.127.000	Dinas Pendidikan	
	11	Kegiatan Penjaminan Mutu	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	92 lembaga	215.000.000	APBD Kota : 215.000.000	-	92 lembaga	133.127.000	Dinas Pendidikan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1 2	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Taman	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	19 lembaga	6.285.610.000	APBD Kota : 6.285.610.000	-	19 lembaga	2.402.318.000	Dinas Pendidikan
	1 3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Kartoharjo	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	18 lembaga	4.820.650.000	APBD Kota : 4.820.650.000	-	18 lembaga	1.851.340.000	Dinas Pendidikan
	1 4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Manguharjo	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	20 lembaga	6.133.472.000	APBD Kota : 6.133.472.000	-	20 lembaga	2.366.743.000	Dinas Pendidikan
	1 5	Kegiatan Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa TK, SD, SMP, SMA.	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	260 lembaga	84.830.000	APBD Kota : 84.830.000	-	260 lembaga	84.830.000	Dinas Pendidikan
	1 6	Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Bidang Kesenian	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	2 Dokumen	115.000.000	APBD Kota : 115.000.000	-	2 Dokumen	115.763.000	Dinas Pendidikan
	1 7	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	142 lembaga	275.000.000	APBD Kota : 275.000.000	-	142 lembaga	289.406.000	Dinas Pendidikan
	1 8	Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	162 lembaga	380.000.000	APBD Kota : 380.000.000	-	162 lembaga	243.493.000	Dinas Pendidikan
	1 9	Kegiatan Uji Coba Ujian Nasional SD dan SMP	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	7500 Siswa	275.000.000	APBD Kota : 275.000.000	-	7500 Siswa	269.026.000	Dinas Pendidikan
	2 0	Kegiatan Olimpiade Sains SD, SMP	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	248 Siswa	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	-	248 Siswa	93.970.000	Dinas Pendidikan
	2 1	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP SMA/SMK Tahap I	Jumlah Orang	Kota Ma diun	200 orang	430.000.000	APBD Kota : 430.000.000	-	200 orang	0	Dinas Pendidikan
	2 2	Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Pendidikan MGMP dan KKG	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	97 lembaga	275.000.000	APBD Kota : 275.000.000	-	97 lembaga	175.000.000	Dinas Pendidikan
	2 3	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	117 Siswa	455.000.000	APBD Kota : 455.000.000	-	117 Siswa	286.881.000	Dinas Pendidikan
	2 4	Kegiatan Penyelenggaraan SMP Terbuka	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	42.000.000	APBD Kota : 42.000.000	-	1 lembaga	46.305.000	Dinas Pendidikan
	2 5	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	1.030.826.000	APBD Kota : 1.030.826.000	-	1 lembaga	615.801.000	Dinas Pendidikan
	2 6	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	789.772.000	APBD Kota : 789.772.000	-	1 lembaga	546.972.000	Dinas Pendidikan
	2 7	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	652.063.000	APBD Kota : 652.063.000	-	1 lembaga	360.143.000	Dinas Pendidikan
	2 8	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	1.003.166.000	APBD Kota : 1.003.166.000	-	1 lembaga	541.971.000	Dinas Pendidikan
	2 9	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	401.443.000	APBD Kota : 401.443.000	-	1 lembaga	285.904.000	Dinas Pendidikan
	3 0	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	556.995.000	APBD Kota : 556.995.000	-	1 lembaga	377.513.000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	712.490.000	APBD Kota : 712.490.000	-	1 lembaga	458.437.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	1.074.353.000	APBD Kota : 1.074.353.000	-	1 lembaga	280.451.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	574.982.000	APBD Kota : 574.982.000	-	1 lembaga	413.081.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	499.391.000	APBD Kota : 499.391.000	-	1 lembaga	289.134.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	565.200.000	APBD Kota : 565.200.000	-	1 lembaga	386.031.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	602.225.000	APBD Kota : 602.225.000	-	1 lembaga	432.749.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	545.860.000	APBD Kota : 545.860.000	-	1 lembaga	413.776.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	416.837.000	APBD Kota : 416.837.000	-	1 lembaga	312.795.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Lomba Siswa Teladan Tingkat SD dan SMP	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	184 Siswa	175.000.000	APBD Kota : 175.000.000	-	184 Siswa	167.996.000	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SLB	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 paket	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	-	1 paket	100.000.000	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK)	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	9 lembaga	2.631.220.000	APBD Kota : 2.631.220.000	-	1 lembaga	16.718.660.000	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK).	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	8 lembaga	4.766.319.000	APBD Kota : 4.766.319.000	-	8 lembaga	4.766.319.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD		100%	1.622.458.000	APBD Kota : 1.622.458.000				
			1	Pagelaran HAN Tingkat Kota	Jumlah Paket	Kota Ma diun	1 paket	160.000.000	APBD Kota : 160.000.000	-	1 paket	115.763.000	Dinas Pendidikan
			2	Pagelaran Tari Masal	Jumlah Paket	Kota Ma diun	1 paket	60.250.000	APBD Kota : 60.250.000	-	1 paket	57.881.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Pendampingan Psikolog Siswa Jenjang PAUD, SD, SMP, SM	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	7943 Siswa	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	-	7943 Siswa	150.491.000	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Hari Anak Nasional	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	65 Siswa	185.000.000	APBD Kota : 185.000.000	-	65 Siswa	115.763.000	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan APE PAUD Swasta (APE Luar ruangan)	Jumlah lembaga	Kota Ma diun	172 lembaga	435.935.000	APBD Kota : 435.935.000	-	75 lembaga	247.732.000	Dinas Pendidikan
			6	Kegiatan Bantuan BOP PAUD	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	75 lembaga	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	-	75 lembaga	69.458.000	Dinas Pendidikan
			7	Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Jumlah Paket	Kota Ma diun	1 paket	135.000.000	APBD Kota : 135.000.000	-	1 paket	17.364.000	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8	Kegiatan Pusat Kegiatan Gugus PAUD Terpadu Kota Madiun	Jumlah Gugus	Kota Madiun	20 Gugus Sekolah	135.000.000	APBD Kota : 135.000.000	-	20 Gugus	34.729.000	Dinas Pendidikan
	9	Kegiatan Workshop Kurikulum TK	Jumlah Lembaga	Kota Madiun	97 lembaga	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	97 lembaga	57.881.000	Dinas Pendidikan
	10	Kegiatan Penyelenggaraan TK pembina	Jumlah Lembaga	Kota Madiun	1 lembaga	81.273.000	APBD Kota : 81.273.000	-	1 lembaga	85.337.000	Dinas Pendidikan
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2	17	Perpustakaan				870.000.000					
2	17	1052	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	25.900 org	870.000.000	APBD Kota : 870.000.000				
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Frekwensi (Kali)	Kota Madiun	1 kali	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Studi banding Penge lolaan Perpustakaan Kel/Desa di Lumajang Juara Nasional Tk 1 Tahun 2014	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Pustaka yg di kelola	Kota Madiun	1500 ek semplar	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000	Pengolahan Bahan Pustaka pasca pengadaan bahan pustaka	1500 ek semplar	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Frekwensi (Kali)	Kota Madiun	10 kali	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Publikasi di Radio, Koran, dan Event	10 kali	120.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	4	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka dan Perbaikan Buku Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan Pustaka	Kota Madiun	1500 ek semplar	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Penambahan jumlah Bahan Pustaka perpustakaan Umum	1500 exemplar	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	5	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	Jumlah Paket	Kota Madiun	36 paket	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	Bantuan dan Insentif Pengelola Perpustakaan Kelurahan, Kecamatan dan Taman Bacaan	36 paket	75.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	6	Pemeliharaan Rutin Berkala Bahan Pustaka	Jumlah Frekwensi (Kali)	Kota Madiun	2 kali	35.000.000	APBD Kota : 35.000.000	Pemeliharaan/ Fumigasi secara Berkala Ruang Bahan Pustaka	2 kali	35.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	7	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar	Jumlah Frekwensi (Kali)	Kota Madiun	60 kali	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Jumlah kunjungan TK-Playgroup ke Rumah Pintar, Ketrampilan dan Lomba	60 kali	160.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelola Perpustakaan	Jumlah Peserta Sosialisasi pengelola Perpustakaan	Kota Ma diun	75 orang	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	SDM Pengelola Perpustakaan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi	75 orang	160.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	9	Kegiatan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Kota Ma diun	71 perpustakaan	110.000.000	APBD Kota : 110.000.000	Perpustakaan Kelurahan, dan Sekolah	71 perpustakaan	110.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	10	Sosialisasi, Bimtek SDM Pengelola Perpustakaan Keluar Daerah	Jumlah Pengelola Perpustakaan yg Ditugaskan	Kota Ma diun	15 orang	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	SDM pengelola Perpustakaan Umum dan Arda; kelurahan, Kecamatan dan taman Bacaan	15 orang	80.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PAGU PRIORITAS PERTAMA PEMBANGUNAN DAERAH						72.052.331.000					

Tabel 5. 2
Prioritas 2 : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR												
1	2	Kesehatan			139.437.123.160								
1	2	1	1	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar		86,74%	4.670.559.000	APBD Kota : 4.670.559.000				
		1		Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	Kota Ma diun	15 Jenis	4.670.559.000	APBD Kota : 4.670.559.000	DAK	30 Jenis	5.822.697.882	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penurunan Kasus KLB		54%	2.523.506.000	APBD Kota : 2.523.506.000				
		1		Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)	Angka Kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)	Kota Ma diun	60 Penduduk	951.597.000	APBD Kota : 951.597.000	target IR DBD 60/100.0 00 penduduk	60 Pen duduk	693.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		2		Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)	Persentase Case Notification Rate pada TB	Kota Ma diun	3%	160.281.000	APBD Kota : 160.281.000	-	3%	168.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		3		Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia	Persentase RFT Rate	Kota Ma diun	100%	48.242.000	APBD Kota : 48.242.000	-	100%	31.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		4		Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	Persentase penemuan kasus HIV	Kota Ma diun	4%	357.294.000	APBD Kota : 357.294.000	-	3.8 %	324.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		5		Kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P2ML)	Persentase cakupan penyakit menular langsung yang ditemukan dan ditangani	Kota Ma diun	100%	55.101.000	APBD Kota : 55.101.000	-	100%	53.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		6		Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Persentase respon sistem kewas padaan dini dan respon (SKDR) kurang dari 24 jam	Kota Ma diun	100%	111.156.000	APBD Kota : 111.156.000	-	100%	150.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		7		Kegiatan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Persentase cakupan penyakit bersumber binatang yang ditemukan dan ditangani	Kota Ma diun	100%	51.924.000	APBD Kota : 51.924.000	-	100%	49.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)	Persentase Imunisasi TT pada WUS	Kota Ma diun	70%	39.085.000	APBD Kota : 39.085.000	-	36%	45.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	9	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita	Persentase Kelurahan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Kota Ma diun	100%	487.488.000	APBD Kota : 487.488.000	-	100%	142.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	10	Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Persentase jumlah penduduk usia > 15 th di skrining PTM	Kota Ma diun	80%	261.338.000	APBD Kota : 261.338.000	-	27%	75.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	1	2	0	1	2	0	1	1	1	1
		Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Angka Kontak pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Persentase Rumah Sakit terakreditasi		≥5/1.000, 25%	38.310.329.000	APBD Kota : 38.310.329.000				
	1	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase keter sediaan obat dan perbekalan kesehatan berdasar kan formula rium puskesmas	Kota Ma diun	100%	1.751.520.000	APBD Kota : 1.751.520.000	-	100%	1.764.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase keter sediaan obat dan perbekalan kesehatan berdasar kan formula rium puskesmas	Kota Ma diun	100%	1.115.900.000	APBD Kota : 1.115.900.000	-	100%	1.015.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	3	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pengelolaan obat sesuai standar	Kota Ma diun	100%	75.690.000	APBD Kota : 75.690.000	-	100%	172.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	4	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan data bidang kesehatan	Kota Ma diun	100%	83.468.000	APBD Kota : 83.468.000	-	100%	224.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	5	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah jenis dokumen kepegawai an yang tersusun sesuai ketentuan	Kota Ma diun	3 Dokumen	331.081.000	APBD Kota : 331.081.000	-	3 Dokumen	97.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	6	Pengelolaan Alat Kesehatan	Persentase Alat kesehatan yang terkalibrasi	Kota Ma diun	100%	86.717.000	APBD Kota : 86.717.000	-	100%	84.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	7	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan.	Persentase Jenis alat kesehatan yang diadakan	Kota Ma diun	20%	611.595.000	APBD Kota : 611.595.000	-	100%	255.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	8	Kegiatan Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan profesional/ ber kompeten	Kota Ma diun	440 orang	261.056.000	APBD Kota : 261.056.000	-	484 orang	146.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9 Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Tenaga Kesehatan	Persentase kepatuhan tenaga kesehatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kota Madiun	100%	239.374.000	APBD Kota : 239.374.000	-	550 orang	82.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	10 Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan	Persentase Kepatuhan sarana pelayanan kesehatan terhadap peraturan perundang-undangan	Kota Madiun	8 RS	361.422.000	APBD Kota : 361.422.000	-	8 RS	270.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	11 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kelun	Jumlah paket rehab puskesmas yang di laksanakan	Kota Madiun	1 paket	246.389.000	APBD Kota : 246.389.000		1 paket	246.389.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	12 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pilangbango	Jumlah paket rehab puskesmas yang di laksanakan	Kota Madiun	1 paket	246.389.000	APBD Kota : 246.389.000		1 paket	246.389.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	13 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Rejomulyo	Jumlah paket rehab puskesmas yang di laksanakan	Kota Madiun	1 paket	246.389.000	APBD Kota : 246.389.000		1 paket	246.389.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	14 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Klegen	Jumlah paket rehab puskesmas yang di laksanakan	Kota Madiun	1 paket	246.389.000	APBD Kota : 246.389.000		1 paket	246.389.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	15 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Demangan	Jumlah paket rehab puskesmas yang di laksanakan	Kota Madiun	1 paket	246.389.000	APBD Kota : 246.389.000		1 paket	246.389.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	16 Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Persentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar	Kota Madiun	82%	31.169.805.000	APBD Kota : 31.169.805.000	-	91%	23.013.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	17 Kegiatan Upaya Penanggulangan Masalah Kesehatan	Persentase penyediaan tenaga P3K sesuai kebutuhan	Kota Madiun	100%	390.724.000	APBD Kota : 390.724.000	-	100%	177.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	18 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan pada Gudang Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan pada Gudang perbekalan kesehatan	Kota Madiun	100%	126.733.000	APBD Kota : 126.733.000	-	100%	98.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	19 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)	Tersedianya Tenaga Medis di Puskesmas	Kota Madiun	1 Org	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	Tersedianya tenaga medis di Puskesmas Tawangrejo	0	0	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	20 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	Persentase puskesmas dan klinik terakreditasi	Kota Madiun	40%	429.043.000	APBD Kota : 429.043.000	-	60%	270.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	21 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan rujukan yang dibina	Kota Madiun	8 RS	14.256.000	APBD Kota : 14.256.000	-	8 RS	28.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	1	2	3										
		0	2	0	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah tangga sehat	68%	20.528.015.160	APBD Kota : 20.528.015.160				
				1		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	452.125.000	APBD Kota : 452.125.000	-	100%	329.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				2		Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi pada Ibu Hamil	Persentase ibu Hamil KEK tertangani	100%	654.771.000	APBD Kota : 654.771.000	-	100%	448.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				3		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	130.182.000	APBD Kota : 130.182.000	-	100%	146.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				4		Kegiatan Penanggulangan masalah gizi pada balita.	Persentase Balita Gizi Kurang	12%	915.565.000	APBD Kota : 915.565.000		10.52 %	639.100.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				5		Kegiatan Upaya Kesehatan Reproduksi	Persentase WUS yang diskriming	30%	716.926.000	APBD Kota : 716.926.000	-	100%	251.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				6		Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia	Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan	55%	1.748.553.000	APBD Kota : 1.748.553.000	-	60%	477.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				7		Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Persentase TTU dan TPM sehat	83%	690.105.000	APBD Kota : 690.105.000	-	84%	699.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				8		Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	Jumlah tatanan Kota Sehat yang di laksanakan	67%	1.414.013.000	APBD Kota : 1.414.013.000	-	85.19 %	1.339.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				9		Kegiatan Peningkatan Mutu Makanan dan Minuman	Persentase produk makanan olahan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat 2 kali setahun	82%	177.459.000	APBD Kota : 177.459.000	-	84%	81.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				10		Kegiatan Pengembangan media Kesehatan dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah jenis media promosi yang diadakan	12 Jenis	511.163.000	APBD Kota : 511.163.000	-	14 Jenis	574.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				11		Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah yang mendapat promosi kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun	100%	1.009.922.000	APBD Kota : 1.009.922.000	-	100%	369.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				12		Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelurahan yang mendapatkan promosi kesehatan minimal 18 kelurahan	75%	3.315.878.000	APBD Kota : 3.315.878.000	-	100%	1.304.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1 3	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Persentase kelurahan siaga aktif PURI	Kota Ma diun	67%	621.323.000	APBD Kota : 621.323.000	-	71%	807.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 4	Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (BK.PROV)	Persentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	Kota Ma diun	100%	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	-	100%	0	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 5	Kegiatan Revitalisasi Posyandu Balita	Jumlah posyandu yang di revitalisasi	Kota Ma diun	270 Posyandu	750.000.000	APBD Kota : 750.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	270 Posyandu	750.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 6	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo	Persentase capaian Indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Kota Ma diun	82%	951.133.000	APBD Kota : 951.133.000	-	83%	587.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 7	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan	Persentase capaian Indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Kota Ma diun	81%	805.590.000	APBD Kota : 805.590.000	-	81%	497.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 8	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan	Persentase capaian Indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Kota Ma diun	81%	794.347.000	APBD Kota : 794.347.000	-	81.48 %	483.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 9	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo	Persentase capaian Indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Kota Ma diun	81%	762.204.000	APBD Kota : 762.204.000	-	80.75 %	391.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 0	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo	Persentase capaian Indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Kota Ma diun	84%	797.188.000	APBD Kota : 797.188.000	-	85%	366.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 1	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo	Persentase capaian Indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Kota Ma diun	83%	677.480.000	APBD Kota : 677.480.000	-	84%	273.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 2	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Manguharjo (DAK)	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	Kota Ma diun	85%	176.185.000	APBD Kota : 176.185.000	-	0	176.185.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 3	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patihan(DAK)	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	Kota Ma diun	89%	211.546.000	APBD Kota : 211.546.000	-	0	211.546.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 4	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Demangan (DAK)	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	Kota Ma diun	84%	181.650.000	APBD Kota : 181.650.000	-	0	181.650.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 5	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banjarejo (DAK)	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	Kota Ma diun	72%	189.915.000	APBD Kota : 189.915.000	-	0	189.915.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2 6	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Oro-Oro Ombo (DAK)	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	Kota Ma diun	75%	174.525.000	APBD Kota : 174.525.000	-	0	174.525.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 7	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tawangrejo (DAK)	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	Kota Ma diun	89%	171.949.000	APBD Kota : 171.949.000	-	0	171.949.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 8	Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK)	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	Kota Ma diun	100%	1.040.454.160	APBD Kota : 1.040.454.160	-	0	1.040.454.160	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 9	Kegiatan Upaya Kesehatan Olah Raga	Persentase SD/MI yang melakukan test kebugaran pada siswa kelas IV	Kota Ma diun	100%	367.634.000	APBD Kota : 367.634.000	-	100%	76.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	3 0	Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	Terlaksananya Manajemen Operasional Kesehatan	Kota Ma diun	100%	58.230.000	APBD Kota : 58.230.000	-	0	58.230.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	1	3	1							
					80%	73.404.714.000	APBD Kota : 73.404.714.000				
		1									
					80%	1.014.923.000	APBD Kota : 1.014.923.000	-	100%	1.001.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		2									
					80%	1.287.982.000	APBD Kota : 1.287.982.000	-	100%	1.513.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		3									
					80%	1.316.081.000	APBD Kota : 1.316.081.000	-	100%	1.160.783.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		4									
					80%	1.574.957.000	APBD Kota : 1.574.957.000	-	100%	1.471.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		5									
					80%	1.511.911.000	APBD Kota : 1.511.911.000	-	100%	1.362.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		6									
					80%	1.698.860.000	APBD Kota : 1.698.860.000		100%	1.622.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		7									
					43 Jenis	65.000.000.000	APBD Kota : 65.000.000.000		52 Jenis	71.500.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
PAGU PRIORITAS PERTAMA PEMBANGUNAN DAERAH						139.437.123.160					

Tabel 5. 3
Prioritas 3 : Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR												
2	1	Tenaga Kerja			3.326.000.000								
2	1	1	2	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Pencari Kerja yang ditempat kan	73	2.196.000.000	APBD Kota : 2.196.000.000					
		1		Kegiatan Pameran Bursa Kerja (Job Market Fair)	Jumlah pemeran bursa kerja	Kota Ma diun	1 paket	477.000.000	APBD Kota : 477.000.000	pelaksana an job market fair	1 paket	0	Dinas Tenaga Kerja
		2		Kegiatan Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)	Tersedia nya dokumen IPK sesuai dengan kebutuhan kerja	Kota Ma diun	1 Dokumen	95.000.000	APBD Kota : 95.000.000	dokumen IPK	1 Do kumen	0	Dinas Tenaga Kerja
		3		Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah penyuluhan motivasi kerja	Kota Ma diun	10 lokasi	87.000.000	APBD Kota : 87.000.000	penyuluhan motivasi kerja ke sekolah me nengah atas dan kejuruan serta ke camatan	10 lokasi	0	Dinas Tenaga Kerja
		4		Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan.	Jumlah Wirausaha Yang Produktif	Kota Ma diun	40 orang	151.000.000	APBD Kota : 151.000.000	Tahunan	50 orang	200.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		5		Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah pengiriman tenaga kerja siap pakai	Kota Ma diun	140 orang	110.000.000	APBD Kota : 110.000.000	sosialisasi	140 orang	0	Dinas Tenaga Kerja
		6		Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampil an	Kota Ma diun	180 orang	500.000.000	APBD Kota : 500.000.000	nama keg. Berubah sesuai regulasi	170 orang	0	Dinas Tenaga Kerja
		7		Kegiatan Updating Data Pengangguran Tenaga Kerja	Tersedia nya data ketenaga kerjaan dan penganggur an	Kota Ma diun	1 Dokumen	220.000.000	APBD Kota : 220.000.000	Mengup date data pengangg uran	1 Do kumen	0	Dinas Tenaga Kerja
		8		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja.	Jumlah pendidikan dan pelatihan keteram pilan	Kota Ma diun	32 orang	36.000.000	APBD Kota : 36.000.000	Tahunan	35 orang	40.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		9		Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Bagi masyarakat	Jumlah pelatihan ketrampilan yang mendapat bantuan	Kota Ma diun	8 paket	215.000.000	APBD Kota : 215.000.000	bantuan sarana prasarana produksi	4	0	Dinas Tenaga Kerja

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10	Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Tingkat Nasional	Jumlah Kegiatan	Kota Ma diun	2 kegiatan	305.000.000	APBD Kota : 305.000.000	Tahunan	2 kegiatan	340.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	1	1	19401	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Persentase Pekerja yang mendapatkan jaminan sosial		86	1.130.000.000	APBD Kota : 1.130.000.000				
			1	Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah pembinaan hubungan industrial dan jamsostek	Kota Ma diun	1 paket	130.000.000	APBD Kota : 130.000.000	pelaksanaan sosialisasi	1 paket	0	Dinas Tenaga Kerja
			2	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Penyelesaian perselisihan perusahaan dengan pekerja	Kota Ma diun	90 Perusahaan	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Penyelesaian perselisihan perusahaan	90 Perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja
			3	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pembahasan UMK	Jumlah sosialisasi peraturan ketenagakerjaan dan pembahasan UMK	Kota Ma diun	1 paket	136.000.000	APBD Kota : 136.000.000	sosialisasi ketenagakerjaan dan pembahasan UMK	1 paket	0	Dinas Tenaga Kerja
			4	Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah pembahasan masalah ketenagakerjaan	Kota Ma diun	1 paket	220.000.000	APBD Kota : 220.000.000	Penyelesaian sengketa perusahaan	1 paket	0	Dinas Tenaga Kerja
			5	Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Jumlah kepatuhan terhadap penyalur tenaga kerja	Kota Ma diun	5 Perusahaan	82.000.000	APBD Kota : 82.000.000	sosialisasi kepatuhan terhadap penyalur tenaga kerja	5 Perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja
			6	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja	Kota Ma diun	40 Perusahaan	234.000.000	APBD Kota : 234.000.000	Pembinaan norma K3	40 Perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja
			7	Kegiatan Pendataan Wajib Laporan Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma Kerja	Jumlah pendataan wajib laporan ketenagakerjaan dan kepatuhan pengusaha terhadap pekerja	Kota Ma diun	100 Perusahaan	248.000.000	APBD Kota : 248.000.000	Pendataan wajib laporan	100 Perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja
			8	Kegiatan sosialisasi Upah Minimum Kota (UMK)	Jumlah perusahaan yang melaksanakan upah minimum	Kota Ma diun	1 paket	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	pelaksanaan sosialisasi UMK	1 paket	0	Dinas Tenaga Kerja
2	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				5.223.400.000					
2	2	1	12701	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan		100%	895.800.000	APBD Kota : 895.800.000				

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				1	Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Upaya perlindungan Perempuan dan anak	Kota Ma diun	1 paket	180.000.000	APBD Kota : 180.000.000	9 Relawan, 5 Kegiatan	1 paket	180.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Kota Ma diun	250 orang	282.000.000	APBD Kota : 282.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan	250 orang	282.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				3	Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, dan KOnvensi Hak Anak	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi Kesetaraan Gender, dan Konvensi Hak Anak	Kota Ma diun	500 orang	138.800.000	APBD Kota : 138.800.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan	500 orang	138.800.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				4	Kegiatan Penyusunan Laporan Standart (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	45.000.000	APBD Kota : 45.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan	1 Dokumen	45.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Kota Ma diun	6 kali	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan	6 kali	110.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2	1	1	2	8	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	11,29	4.327.600.000	APBD Kota : 4.327.600.000				
				1	Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Kelurahan Kota dan Provinsi kegiatan Evaluasi	Kota Ma diun	7 kelurahan	380.000.000	APBD Kota : 380.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan	7 kelurahan	380.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2	Kegiatan Evaluasi Program Terpadu P2WKSS	Jumlah Kelurahan kegiatan Evaluasi	Kota Ma diun	1 kelurahan	380.000.000	APBD Kota : 380.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan	1 kelurahan	380.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				3	Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	Jumlah peserta kegiatan Hari Kesatuan gerak PKK dan Hari Ibu	Kota Ma diun	600 peserta	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan	600 peserta	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				4	Kegiatan Pelatihan Produk Daur Ulang Sampah (PPSP)	Jumlah peserta kegiatan pelatihan PPSP	Kota Ma diun	100 orang	160.000.000	APBD Kota : 160.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan	100 orang	160.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5	Kegiatan Pelatihan dan Pameran Karya Perempuan di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan Pelatihan	Kota Ma diun	5 kegiatan	320.000.000	APBD Kota : 320.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan	5 kegiatan	320.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	6	Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Perempuan	Jumlah Kegiatan Pelatihan	Kota Ma diun	6 kali	650.000.000	APBD Kota : 650.000.000	Bidang Pem berdaya an Perem puan	6 kali	650.000.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	7	Kegiatan Pemanjapan Focal Point dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kegiatan Pemanjapan Focal Point	Kota Ma diun	1 paket	210.000.000	APBD Kota : 210.000.000	Bidang Pem berdaya an Perem puan	1	210.000.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	8	Kegiatan Monitoring Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)	Jumlah posyandu yang di monitoring	Kota Ma diun	6 kelompok	22.600.000	APBD Kota : 22.600.000	Bidang Pem berdaya an Perem puan	270 Pos yandu	22.600.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	9	Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan.	Jumlah Kegiatan pertemuan Fasilitasi	Kota Ma diun	35 kali	900.000.000	APBD Kota : 900.000.000		35 kali	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	10	Kegiatan Penguatan Lembaga Ekonomi Kelurahan Berbasis Komunitas	Jumlah kegiatan Penguatan lembaga	Kota Ma diun	30 lembaga	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Bidang Pem berdaya an Masya rakat dan Desa	30 lembaga	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	11	Kegiatan Pameran BBGRM dan HKG PKK TK. Provinsi Jawa Timur dan TK. Nasional	Jumlah Kegiatan Pameran	Kota Ma diun	2 kali	330.000.000	APBD Kota : 330.000.000	Bidang Pem berdaya an Masya rakat dan Desa	2 kali	390.000.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	12	Kegiatan Pencanaan BBGRM, HKG PKK dan Penilaian Gotong Royong Terbaik	Jumlah Pencanaan	Kota Ma diun	4 kelurahan	550.000.000	APBD Kota : 550.000.000	Bidang Pem berdaya an Masya rakat dan Desa	4 ke lurahan	550.000.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	13	Kegiatan Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Kegiatan lomba Karya Penanggula ngan Kemiskinan	Kota Ma diun	3 peserta	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	Bidang Pem berdaya an Masya rakat dan Desa	3 peserta	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				4.856.000.000					
2	8	1 2 2 2 0 1	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Rata Rata Jumlah Anak per Keluarga, Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I , Capaian Peserta KB Baru, rasio akseptor KB		1,95, 16, 3705, 11,6	4.856.000.000	APBD Kota : 4.856.000.000			
	1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, KB dan Ketahanan Keluarga	Jumlah dokumen kegiatan penyusunan Profil Kependudu kan	Kota Ma diun	1 Dokumen	175.000.000	APBD Kota : 175.000.000	Bidang Keluarga Be rencana dan Keluarga Sejahtera	1 Do kumen	175.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	Kegiatan Pelayanan KIE	Jumlah kegiatan Pelayanan KIE	Kota Ma diun	1 paket	224.000.000	APBD Kota : 224.000.000	Siaran Elektronik , Perbaikan Billboard, KIE Kelling	1	224.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	3	Kegiatan Perlindungan Hak Reproduksi	Jumlah Kegiatan Perlindungan Hak Reproduksi	Kota Ma diun	1 paket	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	Papsmeas 100, Komplikasi Berat= 4 Kasus, Kegagalan KB= 6 Kasus, 2 Per temuan	1 paket	80.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	4	Kegiatan Pembinaan KB	Jumlah Kegiatan Pembinaan KB	Kota Ma diun	2 Dokumen	130.000.000	APBD Kota : 130.000.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	10 kali	140.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	5	Evaluasi Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan	Jumlah Kelurahan yang di evaluasi	Kota Ma diun	1 kelurahan	490.000.000	APBD Kota : 490.000.000	1 Kelurahan Tingkat Provinsi dan Tingkat Fungsional	1 ke lurahan	500.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	6	Kegiatan Pemanjapan Pelayanan KB dalam Kegiatan Terpadu Guna Momentum Tingkat Kota	Jumlah Kegiatan Pemanjapan pelayanan KB	Kota Ma diun	2 kali	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2 kali	50.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	7	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PKB	Jumlah PKB yang dinilai	Kota Ma diun	26 orang	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	26 orang	50.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	8	Kegiatan Pelayanan KB MKJP dan Konseling	Jumlah Kegiatan Pelayanan KB MKJP	Kota Ma diun	1 paket	330.000.000	APBD Kota : 330.000.000	Tahunan	1 paket	330.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	9	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK)	Jumlah kegiatan Bantuan operasional KB	Kota Ma diun	3000 orang	300.000.000	APBD Kota : 300.000.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3000 orang	300.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	10	Kegiatan Fasilitasi Kelompok PIK Remaja	Jumlah kegiatan fasilitasi kelompok PIK Remaja	Kota Ma diun	25 kali	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	17 kali	260.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	11	Kegiatan Sosialisasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan KIE	Kota Ma diun	1 paket	70.000.000	APBD Kota : 70.000.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1 paket	70.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	12	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB	Kota Ma diun	2 Dokumen	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	27 kali	150.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1 3	Kegiatan Pembinaan Operasional PPKBK, Sub.PPKBK dan KKBS-RT	Jumlah Kegiatan Pembinaan Operasional	Kota Ma diun	4 kali	675.000.000	APBD Kota : 675.000.000	Tahunan	4 kali	675.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 4	Kegiatan Pembinaan dan Pameran Produk UPPKS	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pameran Produk	Kota Ma diun	2 kali	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	Tahunan	2 kali	250.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 5	Pemutakiran Data Keluarga dan Rakerda Koalisi Kependudukan	Jumlah kegiatan pendataan	Kota Ma diun	4 kali	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Baru	4 kali	150.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 6	Kegiatan Penyusunan Laporan SPM KB dan KS	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	45.000.000	APBD Kota : 45.000.000	Baru	1 Dokumen	45.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 7	Kegiatan Pembinaan dan Orientasi Bagi Pramuka Saka Kencana	Jumlah Kegiatan pembinaan dan Orientasi	Kota Ma diun	4 kali	90.000.000	APBD Kota : 90.000.000	Tahunan	4 kali	90.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 8	Kegiatan Lomba Kelompok Tribina, UPPKS dan IMP	Jumlah lomba	Kota Ma diun	5 Lomba	480.000.000	APBD Kota : 480.000.000	Tahunan	5 Lomba	480.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 9	Kegiatan Pembinaan dan Revitalisasi Kelompok Keluarga Sejahtera	Jumlah kegiatan pembinaan	Kota Ma diun	90 kk	425.000.000	APBD Kota : 425.000.000	Tahunan	90 kk	495.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 0	Kegiatan Orientasi dan Pembinaan PKBR	Jumlah peserta kegiatan Orientasi dan Pembinaan PKBR	Kota Ma diun	450 orang	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	450 orang	60.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 1	Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Tribina	Kota Ma diun	27 kali	432.000.000	APBD Kota : 432.000.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	27 kali	390.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	1 1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				3.092.000.000					
2	1 1 2 0 5 6 0 0 1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dari Keunggulan Kompetitif KUMKM	Cakupan Bina UKM		2,66%	2.107.000.000	APBD Kota : 2.107.000.000				
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM dalam rangka HARKOPNAS	Jumlah keikutsertaan Pameran	Kota Ma diun	1 kegiatan	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	1 kali	220.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	2	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah peserta pelatihan	Kota Ma diun	1 kali	97.000.000	APBD Kota : 97.000.000	Bidang Koperasi dan UMKM	1 kali	112.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	3	Kegiatan Pameran Produk Unggulan UMKM dalam Rangka HARKOP dan SMESCO	Jumlah Partisipasi dalam pameran	Kota Ma diun	2 kali	280.000.000	APBD Kota : 280.000.000	Bidang Koperasi dan UMKM	2 kali	300.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4	Kegiatan Pameran Produk UMKM di Tingkat Nasional	Jumlah keikutsertaan Pameran	Kota Madiun	3 kali	430.000.000	APBD Kota : 430.000.000	Bidang Koperasi dan UMKM	3 kali	490.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			5	Kegiatan Sosialisasi dukungan penyediaan permodalan bagi KUMKM	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Madiun	100 KUMKM	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	100 UMKM	70.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			6	Kegiatan Pengembangan Unit Pelayanan Klinik Bisnis untuk WUB	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan	Kota Madiun	260 WUB	126.000.000	APBD Kota : 126.000.000	Bidang Koperasi dan UMKM	260 WUB	151.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			7	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan KUMKM oleh Dekranasda	Jumlah Pameran yang diikuti	Kota Madiun	3 kali	340.000.000	APBD Kota : 340.000.000	Bidang Koperasi dan UMKM	3 kali	373.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			8	Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun	Jumlah Data dan Jenis Pemberdayaan yang dilaksanakan	Kota Madiun	3 kegiatan	156.000.000	APBD Kota : 156.000.000	Bidang Koperasi dan UMKM	3 kegiatan	187.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			9	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Kota Madiun	300 orang	238.000.000	APBD Kota : 238.000.000	Bidang Koperasi dan UMKM	300 orang	274.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			10	Kegiatan Temu Kerja dan Pendampingan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)	Jumlah Kegiatan Temu kerja	Kota Madiun	2 kegiatan	180.000.000	APBD Kota : 180.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 kegiatan	193.300.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	1	2	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif		303 unit	985.000.000	APBD Kota : 985.000.000				
			1	Kegiatan Peningkatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diikuti	Kota Madiun	25 Koperasi	130.000.000	APBD Kota : 130.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	25 Koperasi	160.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			2	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan koperasi berprestasi serta penilaian kesehatan koperasi	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Koperasi Berprestasi dan Kesehatan Koperasi	Kota Madiun	2 kali	160.000.000	APBD Kota : 160.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	2 kali	192.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan Pelatihan perkoperasian (Jambore Koperasi Sekolah)	Jumlah Jambora Kopsek yang di laksanakan	Kota Ma diun	3 kali	235.000.000	APBD Kota : 235.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	3 kali	280.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		4	Kegiatan Monev Penyelenggaraan KUMKM	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kota Ma diun	2 Dokumen	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	2 Dokumen	70.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		5	Kegiatan Pembinaan Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi	Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Pembinaan	Kota Ma diun	100 orang	95.000.000	APBD Kota : 95.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	100 orang	115.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		6	Kegiatan Pelatihan Manajemen Partisipasi Anggota Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti pembinaan	Kota Ma diun	100 Koperasi	85.000.000	APBD Kota : 85.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	100 Koperasi	100.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		7	Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian	Jumlah Peserta Pelatihan dan Sosialisasi	Kota Ma diun	100 orang	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	100 orang	95.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		8	Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD	Jumlah Pengelola Koperasi/ KUD yang mengikuti Pelatihan	Kota Ma diun	50 Koperasi	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	50 Koperasi	95.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		9	Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi Koperasi Wanita	Jumlah peserta pelatihan	Kota Ma diun	30 Koperasi	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	30 Koperasi	75.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	1	2	Penanaman Modal				605.000.000					
2	1	1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi		310 M	240.000.000	APBD Kota : 240.000.000				
		1	Promosi Investasi	Jumlah Pameran Investasi	Kota Ma diun	1 kali	160.000.000	APBD Kota : 160.000.000		1 kali	160.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		2	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi	Jumlah Dokumen Investasi	Kota Ma diun	1 Dokumen	45.000.000	APBD Kota : 45.000.000		1 Dokumen	45.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3	Business Gathering	Jumlah Peserta	Kota Ma diun	50 orang	35.000.000	APBD Kota : 35.000.000		50 orang	35.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	1	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rasio Izin yang Diterbitkan		94%	365.000.000	APBD Kota : 365.000.000				
				2	0	7	6						
			1	Surveyance ISO 9001 :2008	Jumlah sertifikat manajemen iso 9001 :2008	Kota Ma diun	1 Jenis	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000	Lanjutan	1 Jenis	25.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			2	Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Data Perizinan	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Ma diun	10 Dokumen	90.000.000	APBD Kota : 90.000.000	Lanjutan	10 Dokumen	100.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			3	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Perizinan	Jumlah baliho/ gambar yang dibuat	Kota Ma diun	45 buah	45.000.000	APBD Kota : 45.000.000	Lanjutan	45 buah	50.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			4	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme SDM Perizinan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, keterampilan dan profesionalisme SDM Perizinan	Kota Ma diun	24 orang	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000	Lanjutan	24 orang	140.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			5	Kegiatan Penataan Arsip	Jumlah yang dikelola	Kota Ma diun	1764 berkas	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000	Lanjutan	1764 berkas	60.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			6	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	35.000.000	APBD Kota : 35.000.000	Lanjutan	1 Dokumen	40.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	2			Pariwisata				1.752.055.000					
3	2	2	1	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Jumlah Event dan Promosi Pariwisata		6 kali	1.752.055.000	APBD Kota : 1.752.055.000				
				0	5								
				6	0	1							
			1	Kegiatan Pemberdayaan Generasi Muda Bidang Kepariwisataan	Jumlah Peserta Pemberdayaan Generasi Muda	Kota Ma diun	75 orang	397.289.000	APBD Kota : 397.289.000	Bidang Pariwisata	75 orang	412.500.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	2	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri (hari Jadi Propinsi)	Jumlah Partisipasi	Kota Ma diun	2 kegiatan	220.000.000	APBD Kota : 220.000.000	Bidang Pariwisata	2 kegiatan	242.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
	3	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Ma diun	1 kegiatan	195.000.000	APBD Kota : 195.000.000	Bidang Pariwisata	1 kegiatan	215.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
	4	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri (Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara)	Jumlah keikutsertaan Pameran	Kota Ma diun	1 kegiatan	215.000.000	APBD Kota : 215.000.000	Bidang Pariwisata	1 kegiatan	235.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
	5	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pariwisata	Jumlah dokumen monev yang dihasilkan	Kota Ma diun	2 Dokumen	84.766.000	APBD Kota : 84.766.000	Bidang Pariwisata	2 Dokumen	90.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
	6	Kegiatan Lomba Fotograpy	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	Kota Ma diun	100 orang	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	Bidang Pariwisata	1 kegiatan	82.500.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
	7	Kegiatan Gebyar Batik dan Fashion Show Batik 2016	Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar batik dan Fashion Show	Kota Ma diun	100 orang	210.000.000	APBD Kota : 210.000.000	Bidang Pariwisata	100 orang	231.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
	8	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas	Jumlah Babak/ festival yang diikuti	Kota Ma diun	2 babak	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Bidang Pariwisata	2 babak	220.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
	9	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kemitraan di Bidang Pariwisata	Jumlah Peserta mengikuti Temu usaha	Kota Ma diun	100 orang	155.000.000	APBD Kota : 155.000.000	Bidang Pariwisata	100 orang	175.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
3	6	Perdagangan				21.219.873.000									
3	6	2	1	0	5	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Ekspor per dagangan		15%	708.443.000	APBD Kota : 708.443.000				
		1				Kegiatan Pameran Dagang	Jumlah keikutsertaan Pameran	Kota Ma diun	3 kali	330.000.000	APBD Kota : 330.000.000	Bidang per dagangan	3 kali	363.000.000	Dinas Perdagangan
		2				Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk	Jumlah Partisipasi dalam pameran Pembangunan	Kota Ma diun	4 kali	320.000.000	APBD Kota : 320.000.000	Bidang Per dagangan	4 kali	340.000.000	Dinas Perdagangan
		4				Kegiatan Membangun Jejaring dengan Exportir	Jumlah Pelaksanaan Jejaring yang dilaksanakan	Kota Ma diun	2 kali	58.443.000	APBD Kota : 58.443.000	Bidang Per dagangan	2 kali	64.287.300	Dinas Perdagangan

1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	6	1 2 0 7 6	1 6	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/ Usaha Informal		75%	2.206.930.000	APBD Kota : 2.206.930.000				
			1	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan barang yang beredar dan ljin perdagangan	Jumlah pembinaan dan pengawasa n yang di laksanakan	Kota Ma diun	6 kali	245.630.000	APBD Kota : 245.630.000	Bidang per dagangan	6 kali	270.193.000	Dinas Perdagangan
			2	Kegiatan Sosialisasi Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah Konsumen yang mengikuti sosialisasi	Kota Ma diun	50 orang	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000		50 orang	100.000.000	Dinas Perdagangan
			3	Kegiatan pengawasa n terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah pengawasa n yang di laksanakan	Kota Ma diun	1 kali	65.000.000	APBD Kota : 65.000.000	Bidang Per dagangan	1 kali	70.000.000	Dinas Perdagangan
			4	Pengawasan Barang Dalam Keadaan Tebungkus (BDKT)	Jumlah Kegiatan pengawasa n yang di laksanakan	Kota Ma diun	6 kali	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	Bidang per dagangan	6 kali	60.000.000	Dinas Perdagangan
			5	Kegiatan Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang (UTTP)	Kota Ma diun	1 kali	1.700.000.000	APBD Kota : 1.700.000.000	Bidang Per dagangan	1 kali	1.700.000.000	Dinas Perdagangan
			6	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah pengumpul an informasi yang dilaksana kan	Kota Ma diun	4 kali	36.300.000	APBD Kota : 36.300.000	Bidang per dagangan	4 kali	39.930.000	Dinas Perdagangan
3	6	1 2 0 7 6	1 6	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Omset Pasar Tradisional		158.335. 860.000	17.828.000.000	APBD Kota : 17.828.000.000				
			1	Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/Modal di Pasar	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	70.000.000	APBD Kota : 70.000.000	Kegiatan Prioritas	1 Do kumen	70.000.000	Dinas Perdagangan
			2	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah pasar yang dikembang kan sarana dan prasarana pasarnya	Kota Ma diun	17 Pasar	800.000.000	APBD Kota : 800.000.000	Kegiatn prioritas	17 Pasar	800.000.000	Dinas Perdagangan
			3	Kegiatan Program Pasar Bersih (PROPASIH)	Jumlah pasar yang dibersihkan oleh unsur masyarakat	Kota Ma diun	17 Pasar	450.000.000	APBD Kota : 450.000.000	Kegiatan Prioritas	17 Pasar	450.000.000	Dinas Perdagangan
			4	Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar- Pasar di Kota Madiun	Jumlah Pasar yang di jaga petugas keamanan	Kota Ma diun	17 Pasar	648.000.000	APBD Kota : 648.000.000	Kegiatan Prioritas	17 Pasar	648.000.000	Dinas Perdagangan
			5	Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional	Jumlah Undian berhadiah dan cinder mata yang diberikan kepada wajib retribusi/ sewa pasar tradisional	Kota Ma diun	150 buah	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Kegiatan Prioritas	150 buah	150.000.000	Dinas Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	6	Kegiatan Gerakan Kembali Ke Pasar	Jumlah peserta yang dilibatkan dalam kegiatan gerakan kembali ke pasar	Kota Ma diun	500 peserta	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Kegiatan Prioritas	500 peserta	137.500.000	Dinas Perdagangan
	7	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pendukung Pasar-pasar	Jumlah Pasar yang ditingkatkan kebersihan, pemeliharaan bangunan, listrik dan fasilitas pendukung pasar-pasar	Kota Ma diun	17 Pasar	650.000.000	APBD Kota : 650.000.000	Kegiatan Prioritas	17 Pasar	690.000.000	Dinas Perdagangan
	8	Kegiatan Operasi Penertiban Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Angsuran dan Sewa Tempat Jual	jumlah pasar yang akan ditertibkan penagihan tunggakan nya	Kota Ma diun	17 Pasar	27.000.000	APBD Kota : 27.000.000	Kegiatan Prioritas	17 Pasar	27.000.000	Dinas Perdagangan
	9	Kegiatan Pendataan Pengunjung Pasar yang dikelola Dinas Pasar	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	83.000.000	APBD Kota : 83.000.000	Kegiatan Prioritas	1 Dokumen	83.000.000	Dinas Perdagangan
	10	Kegiatan Pembangunan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah Pasar yang dikembangkan	Kota Ma diun	3 Pasar	14.800.000.000	APBD Kota : 14.800.000.000	Kegiatan Prioritas	3 Pasar	15.000.000.000	Dinas Perdagangan
3	6	2	1								
	0	9			75%	476.500.000	APBD Kota : 476.500.000				
	6										
	0										
	1										
	1	Kegiatan Pembinaan PKL	Jumlah PKL yang dibina	Kota Ma diun	600 PKL	181.500.000	APBD Kota : 181.500.000	Bidang Perdagangan	600 PKL	199.650.000	Dinas Perdagangan
	2	Kegiatan Pengawasan Mutu dagangan PKL melalui pelatihan kuliner	Jumlah pkl yang mengikuti Pelatihan	Kota Ma diun	150 PKL	130.000.000	APBD Kota : 130.000.000	Bidang Perdagangan	150 PKL	135.000.000	Dinas Perdagangan
	3	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL Kota Madiun	Jumlah PKL yang tertata	Kota Ma diun	1 kali	165.000.000	APBD Kota : 165.000.000	Bidang perdagangan	1 kali	180.000.000	Dinas Perdagangan
3	7					1.503.708.000					
3	7	2	1								
	0	5			283 Unit	1.503.708.000	APBD Kota : 1.503.708.000				
	6										
	0										
	1										
	1	Kegiatan Fasilitas Pameran Industri Mikro, Kecil dan menengah tingkat nasional	Jumlah keikutsertaan peserta dalam Pameran	Kota Ma diun	1 kali	215.985.000	APBD Kota : 215.985.000	Dispe rindag koppar	1 kali	237.583.500	Dinas Tenaga Kerja
	2	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Bagi IKM/IRT melalui pelatihan makanan olahan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Kota Ma diun	20 orang	114.950.000	APBD Kota : 114.950.000	Bidang Per industri	20 orang	126.445.000	Dinas Tenaga Kerja
	3	Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan diversifikasi produk pangan serta fasilitasi ijin teknis	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Kota Ma diun	30 IKM	99.825.000	APBD Kota : 99.825.000	Bidang Per industri	30 IKM	109.807.500	Dinas Tenaga Kerja

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan Menengah tingkat regional di Surabaya (PPUD)	Jumlah Partisipasi dalam pameran	Kota Ma diun	1 kali	160.930.000	APBD Kota : 160.930.000	Bidang Per industri	1 kali	177.023.000	Dinas Tenaga Kerja
			5	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Tingkat Nasional (INACRAFT)	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Ma diun	1 kali	201.828.000	APBD Kota : 201.828.000	Bidang Per industri	1 kali	222.010.800	Dinas Tenaga Kerja
			6	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan bagi IKM/IRT melalui pelatihan peningkatan Produksi Souvenir	Jumlah IKM/IRT yang mengikuti Pelatihan	Kota Ma diun	10 orang	129.470.000	APBD Kota : 129.470.000	Bidang Per industri	10 orang	142.417.000	Dinas Tenaga Kerja
			7	Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Uji Nilai Gizi Produk Makanan Olahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Ma diun	20 orang	87.120.000	APBD Kota : 87.120.000	Bidang Per industri	20 orang	95.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			8	Kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan dan Ketrampilan Industri Kecil	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Kota Ma diun	1 kali	135.000.000	APBD Kota : 135.000.000	Bidang Per industri	25 kali	145.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			9	Kegiatan pelatihan peningkatan Ketrampilan Teknik Perbengkelan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Kota Ma diun	1 kali	165.000.000	APBD Kota : 165.000.000	Bidang Per industri	15 Org	175.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			10	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui good manufacturing practices DBH-CHT	frekuensi pemeriksaan kadar tar dan nikotin dalam satu tahun	Kota Ma diun	4 kali	99.825.000	APBD Kota : 99.825.000	Bidang Industri	4 kali	109.807.500	Dinas Tenaga Kerja
			11	Kegiatan Pengelolaan Energi Migas dan kegeologian	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kota Ma diun	1 Dokumen	93.775.000	APBD Kota : 93.775.000	Bidang ESDM	1 Dokumen	93.775.000	Dinas Tenaga Kerja
3	8			Transmigrasi				53.000.000					
3	8	1	1	Program Ketransmigrasian	Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja		1 pkt	53.000.000	APBD Kota : 53.000.000				
			1	Kegiatan Penyelenggaraan Ketransmigrasian	Jumlah sosialisasi ke transmigrasian	Kota Ma diun	3 lokasi	53.000.000	APBD Kota : 53.000.000	Pelaksanaan sosialisasi ketransmigrasian	3 lokasi	0	Dinas Tenaga Kerja
PAGU PRIORITAS PERTAMA PEMBANGUNAN DAERAH								41.631.036.000					

Tabel 5. 4
Prioritas 4 : Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1 6	Sosial				3.589.000.000					
1 6 1 1 5 4 0 1	Program Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penangan an Penyan dang Masalah Kesejahtera an Sosial		1600	3.589.000.000	APBD Kota : 3.589.000.000				
	1 Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Bimbingan motivasi kepada keluarga miskin	Kota Ma diun	150 orang	300.000.000	APBD Kota : 300.000.000	Bimbing an motivasi kepada keluarga miskin	150 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan PMKS	Bimbingan motovasi pelayanan dan bantuan sosial	Kota Ma diun	320 orang	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	Bimbing an motivasi pelaya nan dan bantuan sosial	320 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	3 Kegiatan Pembinaan Perintis Kemerdekaan atau Keluarganya, Pelestarian Nilai- Nilai Kepahlawanan	Jumlah sarasehan perintis kemerde kaan	Kota Ma diun	85 orang	47.000.000	APBD Kota : 47.000.000	sarasehan tentang kepah lawanan	85 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	4 Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial..	Berfungsi nya kompetensi sosial dan penangan an PMKS	Kota Ma diun	1117 orang	321.000.000	APBD Kota : 321.000.000		1117 orang	321.000.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	5 Kegiatan Pembinaan atau Pelatihan PSM	Jumlah pember dayaan kelembaga an masyarakat bidang sosial	Kota Ma diun	135 orang	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Pembina an dan pelatihan PSM	135 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	6 Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah kesiap siagaan penanga nan bencana	Kota Ma diun	23 orang	111.000.000	APBD Kota : 111.000.000	Kesiap siagaan TAGANA Kota Madiun	23 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	7 Kegiatan Pembinaan Pelatihan Karang Taruna	Bimbingan kewirausah aan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) karang taruna dan motivasi Usaha Kesejahtera an Sosial (UKS)	Kota Ma diun	27 kelurahan	125.000.000	APBD Kota : 125.000.000	Bimbing an kewirausa haan dan motivasi usaha bagi karang taruna	27 ke lurahan	0	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8	Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werda dan Kesejahteraan Lansia	Jumlah Kesejahteraan Lanjut Usia dan tertib administrasi Karang Werda dan lanjut usia	Kota Madiun	27 kelompok	836.000.000	APBD Kota : 836.000.000	pelaksanaan senam lansia dan pembinaan tertib administrasi KW	27 kelompok	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	9	Kegiatan Pembinaan WKSBM	Jumlah WKSBM yang peduli pada peranan PSKS	Kota Madiun	27 kelurahan	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Pembinaan WKSBM	27 kelurahan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	10	Kegiatan Lomba Karang Werda Tingkat Kota dan Provinsi	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial	Kota Madiun	27 kelurahan	134.000.000	APBD Kota : 134.000.000	lomba karang werda tingkat kota dan provinsi	27 kelurahan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	11	Kegiatan Pembinaan Pelatihan Panti Asuhan	Jumlah potensi panti asuhan	Kota Madiun	11 Unit	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	Pembinaan kepada 10 panti asuhan dan 1 rumah singgah	11 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	12	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS	Tersedianya data fakir miskin kota madiun	Kota Madiun	27 kelurahan	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Pendataan PMKS dan PSKS serta validasi verifikasi BPJS	27 kelurahan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	13	Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Lansia.	Tersedianya beragam OR Lansia	Kota Madiun	3000 Lansia	650.000.000	APBD Kota : 650.000.000	Tahunan	3000 Lansia	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	14	Kegiatan Sunat Masal	Jumlah Peserta Sunat Masal	Kota Madiun	200 anak	165.000.000	APBD Kota : 165.000.000		200 anak	165.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	15	Kegiatan Nikah Masal	Jumlah Peserta Nikah Masal	Kota Madiun	20 pasang	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000		20 pasang	120.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2	3	Pangan				11.585.000.000					
2	3	1 1 2 5 2 0 1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		90,25	11.585.000.000	APBD Kota : 11.585.000.000				
	1	Kegiatan Monev dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Rumah Pangan Lestari	Jumlah kegiatan monev dan optimalisasi	Kota Madiun	3 kelurahan	270.000.000	APBD Kota : 270.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	3 kelurahan	190.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	Kegiatan Lomba Cipta Menu	Jumlah kegiatan lomba cipta menu	Kota Ma diun	3 kelurahan	600.000.000	APBD Kota : 600.000.000	Bidang Ketahanan pangan	6 kelurahan	600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3	Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen yang dikoordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Kota Ma diun	1 Dokumen	110.000.000	APBD Kota : 110.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	1 Dokumen	110.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	4	Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Pembinaan Kelurahan Mandiri Pangan	Jumlah Kegiatan Pengembangan	Kota Ma diun	4 kelurahan	180.000.000	APBD Kota : 180.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	4 kelurahan	180.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	5	Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan	Jumlah Kegiatan sosialisasi	Kota Ma diun	180 peserta	175.000.000	APBD Kota : 175.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	180 peserta	175.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	6	Kegiatan Penanganan kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah dokumen penanganan kewaspadaan pangan dan gizi	Kota Ma diun	1 Dokumen	130.000.000	APBD Kota : 130.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	1 Dokumen	130.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	7	Kegiatan Penyusunan SPM Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen yang disusun SPM Ketahanan Pangan	Kota Ma diun	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	8	Kegiatan Pemantauan Distribusi dan Akses pangan	Jumlah dokumen laporan	Kota Ma diun	1 Dokumen	70.000.000	APBD Kota : 70.000.000	Baru	1 Dokumen	75.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	9	Kegiatan Subsidi Pangan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah	Jumlah RTS-PM	Kota Ma diun	5560 RTS	10.000.000.000	APBD Kota : 10.000.000.000	5560 Raskin dan 4.788 Raskinda	5560 RTS	10.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	1	Kelautan dan Perikanan				1.971.000.000					
3	1	2	1	0	5	Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya		211,68 ton	1.971.000.000	APBD Kota : 1.971.000.000
	1	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	jumlah pelatihan	Kota Ma diun	1 kali	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Rutin/tahunan (1 kali pelatihan petani pembudidaya perikanan , pelatihan aparatur & magang kerja (2 orang), 5 paket bantuan sarpras budidaya, dan dokumen move)	1 kali	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah petani budidaya ikan	Kota Ma diun	30 orang	421.000.000	APBD Kota : 421.000.000	Rutin/tahunan (2 kali bimtek kolam terpal dan paket bantuan (bibit lele, karamba ikan, kolam lele dan belut, pakan ikan bibit gurami dan bibit nila))	30 orang	421.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3	Kegiatan Pembenihan Ikan (DAK)	Jumlah benih ikan yang dihasilkan BBI	Kota Ma diun	185000 ekor	1.100.000.000	APBD Kota : 1.100.000.000	Baru (185.000 ekor benih ikan yang dihasilkan BBI), usulan DAK sebesar Rp.1.000.000.000,00 untuk Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Lokal	200000 ekor	120.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	4	Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan	Kota Ma diun	14,8 Kg/kap/th	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Baru (pemberdayaan FORIKAN)	15,1 Kg/kap/th	185.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	5	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan	Jumlah Sarpras rantai dingin	Kota Ma diun	4 paket	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Baru (sarpras rantai dingin guna peningkatan kualitas produk perikanan)	4 paket	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	6	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional	Jumlah Sarpras pengolahan	Kota Ma diun	2 paket	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Baru (sarpras pengolahan untuk peningkatan produksi olahan perikanan)	2 paket	175.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	3		Pertanian			8.533.614.500					
3	3	2 0 7 1 0 1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas tanaman pangan per satuan luas (ton/ha)	7,06	7.338.114.500	APBD Kota : 7.338.114.500				
	1	Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Lokasi Pembuatan Pupuk Organik	Kota Ma diun	3 lokasi	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000		3 lokasi	170.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (DAK)	Jumlah infrastruktur pendukung pertanian	Kota Ma diun	4 paket	4.350.000.000	APBD Kota : 4.350.000.000		4 paket	2.950.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian	Kota Ma diun	3 paket	1.600.000.000	APBD Kota : 1.600.000.000		2 paket	343.183.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	4 Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah Pameran/gelar olahan dan Potensi	Kota Ma diun	2 paket	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000	rutin (pameran gelar olahan dan gelar potensi hasil/olahan pertanian)	2 paket	130.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	5 Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Kelompok Petani pemanfaat teknologi pertanian	Kota Ma diun	3 kelompok	241.000.000	APBD Kota : 241.000.000	Rutin (penerapan teknologi pertanian guna peningkatan produktivitas lahan)	3 kelompok	265.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	6 Kegiatan Pengoptimalan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertanian	jumlah teknologi informasi	Kota Ma diun	1 Unit	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Baru (penyusunan database pertanian / tanaman pangan dan hortikultura)	1 Unit	110.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	7 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah GAPOKTAN penerima PUAP	Kota Ma diun	6 kelompok	89.108.000	APBD Kota : 89.108.000	Rutin (penyuluhan, pendampingan dan pengawasan terhadap GAPOKTAN penerima PUAP)	6 kelompok	97.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	8 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Lokasi percontohan SRI	Kota Ma diun	3 Unit.	106.929.000	APBD Kota : 106.929.000	Rutin (Percontohan tanam padi metode logi SRI (System Rice Intensification) di 3 kecamatan/ kelurahan)	3 Unit	117.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	jumlah demplot/ percontohan budidaya peternakan	Kota Ma diun	15 Unit	610.500.000	APBD Kota : 610.500.000		5 Unit	125.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	4	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah ternak yang mendapat pengobatan & pemeriksaan kesehatan	Kota Ma diun	765 ekor	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Rutin/ tahunan (meliputi pelayanan pemeriksaan, pencegahan dan pengobatan hewan ternak (yang belum dan yang sudah men dapat pelayanan (700 domba/ kambing; 65 sapi)& desinfeksi kandang ayam di 27 Kelurahan serta pemeriksaan hewan qurban, 1 kali seminar	905 ekor	125.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	5	Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan daging	Kota Ma diun	365 hari	65.000.000	APBD Kota : 65.000.000	rutin/ tahunan (pendataan dan pemeriksaan daging layak konsumsi di pasar dan pedagang serta pemasok daging, dan 1 kali pelatihan sertifikasi halal untuk pemotongan hewan)	365 hari	70.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	6	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan	Jumlah hewan peliharaan yang mendapat pengobatan & pemeriksaan kesehatan	Kota Ma diun	200 ekor	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000	Baru (pengobatan dan pemeriksaan terhadap 75 ekor anjing dan 125 kucing)	250 ekor	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PAGU PRIORITAS PERTAMA PEMBANGUNAN DAERAH						25.678.614.500					

Tabel 5. 5
Prioritas 5 : Peningkatan Pelayanan Publik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1 5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				8.468.250.000					
1 5 1 9 0 2	1 4 1 Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota		100%	130.000.000	APBD Kota : 130.000.000				
	1 Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Peyeleaian Pelanggaran Perda dan Perwal	Kota Ma diun	100%	130.000.000	APBD Kota : 130.000.000	-	100%	135.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 9 0 2	1 4 2 Program Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		3,6	599.000.000	APBD Kota : 599.000.000				
	1 Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP	Jumlah Peserta Diklat/ Bimtek Yang Diikuti	Kota Ma diun	46 orang	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	-	46 orang	40.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Kegiatan Pelatihan Outbond	Jumlah Peserta Pelatihan Outbond	Kota Ma diun	30 orang	35.000.000	APBD Kota : 35.000.000	-	30 orang	40.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	3 Kegiatan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	Jumlah Peserta HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	Kota Ma diun	6123 orang	400.000.000	APBD Kota : 400.000.000	-	6123 orang	450.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	4 Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	Jumlah Peserta Jambore Satpol PP	Kota Ma diun	24 orang	84.000.000	APBD Kota : 84.000.000	-	24 orang	85.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 9 0 2	1 4 3 Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Rasio Petugas Perlindung an Masyarakat (LInimas) di Kota		57	2.615.000.000	APBD Kota : 2.615.000.000				
	1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Masyarakat Yang Diberdayak an Dalam Peningkat an Keamanan dan Kenyama nan Lingkungan	Kota Ma diun	801 peserta	137.000.000	APBD Kota : 137.000.000	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pos Kamling	Kota Ma diun	815 Pos	170.000.000	APBD Kota : 170.000.000	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
	3	Kegiatan Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan Kapasitas anggota Satlinmas mendukung tugas-tugas perlindungan masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek Anggota Satlinmas	Kota Ma diun	1300 orang	2.245.000.000	APBD Kota : 2.245.000.000	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
	4	Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam Memperingati hari-hari Besar Nasional dan Lainnya	Jumlah Personil Satlinmas Yang Ikut Dalam Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Kota Ma diun	868 Org	63.000.000	APBD Kota : 63.000.000	Kota Madiun	240 orang	63.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	4	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Perhari	6 kali	1.052.750.000	APBD Kota : 1.052.750.000			
	1	Kegiatan Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Pelanggaran K3 Yang terselesaikan	Kota Ma diun	1290 orang	313.500.000	APBD Kota : 313.500.000	-	1290 orang	313.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	2	Kegiatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Pelanggar Perda di Daerah dan Persamaan Persepsi ke Luar Daerah	Kota Ma diun	1260 orang	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	1260 orang	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	3	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Kota Ma diun	650 orang	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000	-	650 orang	120.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	4	Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP	Jumlah Patroli per Hari	Kota Ma diun	2260 kali	314.250.000	APBD Kota : 314.250.000	-	2260 kali	314.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	5	Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Jumlah Giat Pemerintah Pengamanan	Kota Ma diun	240 kegiatan	155.000.000	APBD Kota : 155.000.000	-	240 kegiatan	155.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	5	Program peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	2.771.000.000	APBD Kota : 2.771.000.000			
	1	Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Peserta Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Kebakaran)	Kota Ma diun	150 orang	208.000.000	APBD Kota : 208.000.000	Kegiatan Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	150 orang	208.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	Kegiatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (DAMKAR), Rakornas dan Rakorda Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Peserta yang mengikuti Apel Siaga HUT Damkar, Rakornas, dan Rakorda Penanggulangan Bencana	Kota Ma diun	67 orang	258.000.000	APBD Kota : 258.000.000	Kegiatan Hari Ulang Tahun Damkar, Rakornas, Dan Rakorda Penanggulangan Bencana	67 orang	252.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	3	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Kebakaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana / korban bencana (Pengadaan Hydran)	Kota Ma diun	1 paket	2.305.000.000	APBD Kota : 2.305.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman Bencana / Korban Bencana	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
5	1 2 0 1 3	4 6	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam	Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		100%	1.300.500.000	APBD Kota : 1.300.500.000			
	1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	Kota Ma diun	1.095 shif	694.500.000	APBD Kota : 694.500.000	Kegiatan Pemantauan Informasi Potensi Bencana	1.095 shif	694.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2	Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana	Jumlah Peserta Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana	Kota Ma diun	450 orang	208.000.000	APBD Kota : 208.000.000	Kegiatan Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana	450 orang	208.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3	Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Peserta Penyuluhan tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	Kota Ma diun	300 orang	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	300 orang	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4	Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Korban Pasca Bencana	Kota Ma diun	1 Dokumen	40.000.000	APBD Kota : 40.000.000	Kegiatan Pendataan Korban Pasca Bencana	1 Dokumen	40.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5	Mitigasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Latihan SAR	Kota Ma diun	150 orang	208.000.000	APBD Kota : 208.000.000	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	150 orang	208.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
4		Pertanahan				160.000.000					
4	1 2 0 7 4	5	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan	Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah		8	160.000.000	APBD Kota : 160.000.000			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				1	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	jumlah fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kota Ma diun	4 kali	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	jumlah fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan	4 kali	30.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				2	Kegiatan Fasilitas Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	jumlah fasilitas ijin lokasi dan IPPT	Kota Ma diun	6 kali	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	jumlah fasilitas ijin lokasi dan IPPT	6 kali	30.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				3	Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Pertanahan	Jumlah Sosialisasi	Kota Ma diun	1 kali	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000		1 kali	150.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2	6				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.365.639.000						
2	6	1	1	1	5	Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	83,80%	1.144.862.000	APBD Kota : 1.144.862.000					
					2	Kegiatan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk	Kota Ma diun	3 Kecamatan	95.000.000	APBD Kota : 95.000.000	Pembuatan KK / KTP	3 Kecamatan	95.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					3	Kegiatan Pemantauan Kependudukan di wilayah Kota Ma diun	Jumlah Kelurahan yang dipantau	Kota Ma diun	27 kelurahan	135.000.000	APBD Kota : 135.000.000	-	27 kelurahan	148.830.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					4	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tertib Administrasi dan pencatatan sipil kel./kec.	Jumlah kelurahan dan kecamatan yang dilakukan evaluasi	Kota Ma diun	27 Kelurahan 3 Kecamatan	121.000.000	APBD Kota : 121.000.000	-	27 kelurahan	121.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					5	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil)	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	4 Dokumen	135.000.000	APBD Kota : 135.000.000		2 Dokumen	135.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					6	Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Ma diun	1.700 Orang.	406.987.000	APBD Kota : 406.987.000	Sosialisasi KTP elektronik untuk usia pemula dan KIA untuk Ketua RT	1.750 Org	415.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					7	Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparat kependudukan dan Petugas Pelayanan	Jumlah Aparat yang di bimtek	Kota Ma diun	66 orang	251.875.000	APBD Kota : 251.875.000	Bimtek 55 Aparat Kependudukan dan 10 Petugas Pelayanan	66 orang	251.875.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	1	1	0	0	1	Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	83,80%	886.232.000	APBD Kota : 886.232.000				
					1	Kegiatan Penataan dan Perawatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	jumlah dokumen yang ditata dan dirawat	Kota Ma diun	13 Jenis	212.920.000	APBD Kota : 212.920.000	13 jenis dan 750 dokumen	763 Dokumen	212.920.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				2	Kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Ma diun	607 Orang.	368.500.000	APBD Kota : 368.500.000	Sosialisasi Untuk Bidan, Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat, dan PKK	607 orang	368.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				3	Kegiatan Pengadaan Blanko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Jumlah Blanko security dan Blanko non security	Kota Ma diun	166 blanko	304.812.000	APBD Kota : 304.812.000	-	166	304.812.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	1	1		Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Ganda dalam Database pusat dengan data daerah		99%	1.334.545.000	APBD Kota : 1.334.545.000				
				1	Kegiatan Pengolahan data Penyusunan Laporan data Kependudukan	Jumlah pelaporan data Adminduk	Kota Ma diun	100 buku	68.775.000	APBD Kota : 68.775.000	-	100 buku	68.775.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) updating dan pemeliharaan	Jumlah Komputer dan server yang mendapat perawatan software dan hardware	Kota Ma diun	20 Unit.	209.280.000	APBD Kota : 209.280.000	18 unit dan 2 server	20 Unit	209.280.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				3	Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	1 dokumen	97.733.000	APBD Kota : 97.733.000	-	50 buku	97.733.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				4	Kegiatan Pemanjagan Teknis Pencetakan Administrasi Kependudukan	Jumlah tenaga	Kota Ma diun	20 Org	68.775.000	APBD Kota : 68.775.000	-	20 Org	70.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				5	Kegiatan Evaluasi dan Rapat Validasi data Kependudukan	Jumlah Petugas Kelurahan dan Kecamatan yang diundang dalam rapat koordinasi dan validasi data	Kota Ma diun	27 kelurahan dan 3 Kecamatan	260.782.000	APBD Kota : 260.782.000	3 kecamatan dan 27 kelurahan	3 Kecamatan	260.782.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				6	Kegiatan Penyebaran Informasi Adminduk melalui Media Elektronik	Jumlah penayangan informasi adminduk melalui media elektronik	Kota Ma diun	60 kali	629.200.000	APBD Kota : 629.200.000	24 kali APBD Anggaran Rp. 281.987.000,- dan 60 kali APBD Provinsi Anggaran Rp. 347.213.000,-	60 kali	629.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	0			Komunikasi dan Informatika				5.704.100.000					
1	1	1	1		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Jumlah Kegiatan Penyebaran Informasi		3.448 kali	4.610.000.000	APBD Kota : 4.610.000.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Suara Madiun	Jumlah jam siaran	Kota Ma diun	18 jam operasi	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	-	18 jam operasi	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Penyiaran Radio	Jumlah alat-alat penyiaran radio	Kota Ma diun	1 set	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	-	1 set	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3 Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah kegiatan kunjungan	Kota Ma diun	1 kali	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	-	1 kali	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4 Kegiatan Kemitraan Media	Jumlah siaran bersama	Kota Ma diun	12 kali	40.000.000	APBD Kota : 40.000.000	-	12 kali	40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	5 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta pembinaan	Kota Ma diun	150 orang	70.000.000	APBD Kota : 70.000.000	-	150 orang	70.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	6 Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah jenis pelatihan	Kota Ma diun	3 Jenis	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	-	3 Jenis	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	7 Kegiatan Penyebarluasan Informasi	Jumlah dokumentasi dan informasi berbagai kebijakan pemerintah	Kota Ma diun	400 kali	1.950.000.000	APBD Kota : 1.950.000.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	1.950.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	8 Pertemuan Forum Koordinasi Kehumasan	Jumlah pertemuan Forum Koordinasi Kehumasan	Kota Ma diun	12 kali	412.500.000	APBD Kota : 412.500.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	9 Kegiatan Jumpa Pers (Press Conference) secara periodik	Jumlah Kegiatan Jumpa pers	Kota Ma diun	12 kali	440.000.000	APBD Kota : 440.000.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	440.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	10 kegiatan Penerbitan Tabloid Program Pemerintah	Jumlah tabloit sebagai media masa	Kota Ma diun	13 kali	346.500.000	APBD Kota : 346.500.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	346.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	11 Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Pekan Kim dan Pembinaan KIM	Kota Ma diun	8 kali	440.000.000	APBD Kota : 440.000.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	440.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	12 Optimalisasi PPIID	Jumlah Optimalisasi PPIID	Kota Ma diun	888 kali	372.000.000	APBD Kota : 372.000.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	372.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	13 Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota	Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan pemerintah Kota	Kota Ma diun	528 kali	139.000.000	APBD Kota : 139.000.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
0813072	3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Kelompok User yang memanfaatkan teknologi informasi		3 (tiga)	1.094.100.000	APBD Kota : 1.094.100.000				
	1 Kegiatan Pemeliharaan Kualitas Jaringan Intranet dan Internet Kota Madiun	Jumlah client intranet dan titik CCTV yang dipelihara	Kota Ma diun	102 Client + 138 titik CCTV	524.100.000	APBD Kota : 524.100.000	-	102 Client + 138 titik CCTV	524.100.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Kegiatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintah Kota Madiun	Persentase uptime server dan koneksi jaringan LPSE	Kota Ma diun	98%	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	-	100%	60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	3	Kegiatan Penyusunan Dokumen Standart Kebijakan Layanan Transaksi Elektronik (LPSE)	Jumlah Dokumen penyusunan Standart Kebijakan Layanan Transaksi Elektronik (LPSE)	Kota Ma diun	1 Dokumen	110.000.000	APBD Kota : 110.000.000	Baru	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	4	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah kegiatan pengawas an	Kota Ma diun	12 kali	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	-	12 kali	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	5	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	Jumlah peserta pembinaan	Kota Ma diun	150 orang	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	-	150 orang	60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	6	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial Masyarakat	Jumlah lokasi kegiatan	Kota Ma diun	27 kelurahan	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	-	27 ke lurahan	220.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1		Kepemudaan dan Olah Raga			4.275.629.000						
2	1	1	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	5 prestasi	4.275.629.000	APBD Kota : 4.275.629.000					
	1		Lomba/Pertandingan dan Pembinaan Prestasi Olah Raga Antar Pelajar SD,SMP,SM Tingkat Kota	Jumlah Cabang Olah Raga	Kota Ma diun	14 Cabor	1.035.604.000	APBD Kota : 1.035.604.000	-	14 Cabor	810.338.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	2		Kegiatan Pekan Olahraga SD Tingkat Provinsi	Jumlah Cabang Olah Raga	Kota Ma diun	9 Cabor	450.000.000	APBD Kota : 450.000.000	-	9 Cabor	470.432.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	3		Liga Pendidikan Sepak Bola (Tingkat SMP dan SMA/SMK)	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	72 lembaga	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	-	72 lembaga	273.013.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	4		Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	72 lembaga	350.000.000	APBD Kota : 350.000.000	-	72 lembaga	223.485.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	5		Hari Olah Raga Nasional	Jumlah Orang	Kota Ma diun	500 orang	455.000.000	APBD Kota : 455.000.000	-	500 orang	603.242.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	6		Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Siswa	Kota Ma diun	810 Siswa	280.000.000	APBD Kota : 280.000.000	-	810 Siswa	289.406.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	7		Sarana Prasarana Olah Raga	Jumlah Paket	Kota Ma diun	34 paket	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	-	34 paket	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	8		Pembinaan Mental Spiritual Pemuda	Jumlah Peserta Pembinaan Mental Spiritual Pemuda	Kota Ma diun	200 orang	125.000.000	APBD Kota : 125.000.000	-	200 orang	125.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi	Jumlah Pelaksanan Kegiatan Olah Raga	Kota Ma diun	2 kali	430.000.000	APBD Kota : 430.000.000	Kecamatan Karto harjo	2 kali	435.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	10	Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga Kelurahan	Jumlah Pelaksanan Kegiatan Olah Raga	Kota Ma diun	18 kali	190.000.000	APBD Kota : 190.000.000	Kecamatan Karto harjo	18 kali	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	11	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan olahraga	Kota Ma diun	2 kali	284.900.000	APBD Kota : 284.900.000	Kecamatan mangu harjo	2 kali	295.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	12	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan olah raga	Kota Ma diun	2 kali	375.125.000	APBD Kota : 375.125.000	Kecamatan Taman	2 kali	375.125.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
214		Statistik				200.000.000					
2140601	1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dokumen Statistik Daerah yang Tersusun		2 dokumen	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000				
	1	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	2 buku	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Rutin	2 buku	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
215		Persandian				232.846.500					
210701	1	Program Pengembangan Tata Kelola Persandian	Jumlah SDM Persandian		2	232.846.500	APBD Kota : 232.846.500				
	1	Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Persandian	Jumlah Personil Persandian yang mengikuti pelatihan	Kota Ma diun	2 Orang	52.684.000	APBD Kota : 52.684.000	-	2 orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Kegiatan Sosialisasi Persandian	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Ma diun	34 PD dan 27 Kelurahan	180.162.500	APBD Kota : 180.162.500	-	34 PD dan 27 Kelurahan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
216		Kebudayaan				8.054.190.000					
21601	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan		5 paket	8.054.190.000	APBD Kota : 8.054.190.000				
	1	Grebeg Maulud dan Pameran Seni Budaya	Jumlah Paket	Kota Ma diun	1 paket	286.000.000	APBD Kota : 286.000.000	-	2 paket	289.406.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	2	Pentas Seni Secara Periodik, Car Free Day dan Car Free Night	Jumlah Paket	Kota Ma diun	3 paket	560.000.000	APBD Kota : 560.000.000	-	1	138.915.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	3	Pegelaran Wayang Kulit	Jumlah Paket	Kota Ma diun	2 paket	661.500.000	APBD Kota : 661.500.000	-	2 paket	694.575.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	4	Pelatihan Bahasa Jawa	Jumlah Peserta	Kota Ma diun	100 peserta	57.500.000	APBD Kota : 57.500.000	-	100 peserta	57.881.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	Festival Seni	Jumlah Paket	Kota Madiun	2 paket	85.500.000	APBD Kota : 85.500.000	-	2 paket	86.822.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	6	Festival Pedalangan Tingkat Provonsi	Jumlah Paket	Kota Madiun	2 paket	115.250.000	APBD Kota : 115.250.000	-	2 paket	115.763.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	7	Festival Seni Karawitan Anak Tingkat Kota dan Provinsi	Jumlah Paket	Kota Madiun	2 paket	86.680.000	APBD Kota : 86.680.000	-	2 paket	86.822.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	8	Lomba Dongeng Kesejarahan Bagi Guru	Jumlah Paket	Kota Madiun	1 paket	60.250.000	APBD Kota : 60.250.000	-	1 paket	57.881.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	9	Lomba Geguritan Pitutur Luhur	Jumlah Paket	Kota Madiun	1 paket	60.250.000	APBD Kota : 60.250.000	-	1 paket	57.881.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	10	Lomba Penulisan Naskah Macapat dan Tetembangan Tembang Macapat	Jumlah Paket	Kota Madiun	1 paket	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000	-	1 paket	57.881.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	11	Sarasehan Budaya	Jumlah Paket	Kota Madiun	1 paket	40.000.000	APBD Kota : 40.000.000	-	1 paket	34.729.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	12	Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya	Jumlah Paket	Kota Madiun	2 paket	195.000.000	APBD Kota : 195.000.000	-	1 paket	50.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	13	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	Jumlah peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Madiun yang dilaksanakan	Kota Madiun	18 Jenis	3.833.000.000	APBD Kota : 3.833.000.000	HBN, HJM, Pelestarian Budaya, Tahun Baru	18 Jenis	3.276.078.750	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	14	Lomba Vokal Keroncong dan Campur Sari	Jumlah Paket	Kota Madiun	2 paket	55.125.000	APBD Kota : 55.125.000	-	2 paket	57.881.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	15	Pekan Seni Pelajar Tingkat Propinsi Jawa Timur	Jumlah Paket	Kota Madiun	1 paket	450.000.000	APBD Kota : 450.000.000	-	1 paket	463.050.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	16	Festival Pedalangan dan Pembinaan Dalang Anak Tingkat Kota Madiun	Jumlah Paket	Kota Madiun	2 paket	148.180.000	APBD Kota : 148.180.000	-	2 paket	86.822.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	17	Pementasan Kesenian di TMII	Jumlah Pengunjung	Kota Madiun	200 orang	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	-	200 orang	250.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1 8	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Keragaman Budaya	Jumlah Kegiatan Pentas Seni	Kota Ma diun	6 kali	310.000.000	APBD Kota : 310.000.000	Kecamatan Karto harjo	6 kali	315.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	1 9	Kegiatan Fasilitas Pentas Seni Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pentas Seni	Kota Ma diun	9 kali	95.000.000	APBD Kota : 95.000.000	Kecamatan Karto harjo	9 kali	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	2 0	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Keragaman Budaya	Jumlah kegiatan pentas seni	Kota Ma diun	6 kegiatan	309.700.000	APBD Kota : 309.700.000	Kecamatan mangu harjo	6 kegiatan	320.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	2 1	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Keragaman Budaya	Jumlah kegiatan pentas seni	Kota Ma diun	3 kali	275.255.000	APBD Kota : 275.255.000	Kecamatan Taman	3 kali	275.255.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	1 8	Kearsipan				690.000.000					
2	1 8 0 8 1 0 2	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah berkas arsip yang dikelola		42.671 berkas	690.000.000	APBD Kota : 690.000.000				
	1	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Unit Kearsipan	Kota Ma diun	2 Unit	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar	2 Unit	120.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Jumlah Dokumen Yang Menjadi Duplikasi	Kota Ma diun	6 Dokumen	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Penduplikasian Buku Tanah Kelurahan	6 Dokumen	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Jumlah Frekwensi (Kali)	Kota Ma diun	2 kali	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000	Fumigasi secara berkala di Depo Arsip	2 kali	60.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	4	Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelola Kearsipan	Kota Ma diun	200 orang	175.000.000	APBD Kota : 175.000.000	SDM Pengelola Kearsipan Di Unit Kearsipan SKPD, Kelurahan, Kecamatan dan Sekolah	200 orang	180.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	5	Kegiatan Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan	Jumlah Paket	Kota Ma diun	1 paket	125.000.000	APBD Kota : 125.000.000	Pengembangan Software dan Peralatan SIM Arsip	0 paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	6	Kegiatan Sosialisasi Bimtek SDM Pengelola Kearsipan Ke Luar Daerah	Jumlah Pengelola Kearsipan yg Ditugaskan	Kota Ma diun	15 orang	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	SDM Pengelola Kearsipan Kantor Perpustakaan Umum dan Arda, SKPD, Kecamatan dan Kelurahan	15 orang	80.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	7	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan	Jumlah Unit Kearsipan	Kota Ma diun	31 Unit	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000	Unit Kearsipan Kelurahan, Kecamatan dan PKK	31 Unit	60.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0				FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN									
4	1			Perencanaan Pembangunan				5.125.353.000					
4	1	1	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Kota Madun		11 dokumen	2.455.353.000	APBD Kota : 2.455.353.000				
			1	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	2 Dokumen	360.400.000	APBD Kota : 360.400.000	Rutin	2 Dokumen	343.550.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2	Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang	Jumlah kegiatan	Kota Ma diun	2 kegiatan	400.000.000	APBD Kota : 400.000.000	Rutin	2 kegiatan	350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	2 Dokumen	236.816.000	APBD Kota : 236.816.000	Rutin	2 Dokumen	246.836.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			4	Kegiatan Bimtek/Workshop Fasilitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan	Kota Ma diun	1 paket	349.334.000	APBD Kota : 349.334.000		1 paket	350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5	Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi	Kota Ma diun	8 Dokumen	146.997.000	APBD Kota : 146.997.000	rutin	8 Dokumen	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			6	Verifikasi Pra RKA dan Pra RKPA	Jumlah dokumen yang diverifikasi	Kota Ma diun	34 SKPD	122.200.000	APBD Kota : 122.200.000	Rutin	34 SKPD	165.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			7	Penyusunan KUA-P dan PPAS-P	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	2 Dokumen	240.762.000	APBD Kota : 240.762.000	Rutin	2 Dokumen	275.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			8	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran	Jumlah kegiatan	Kota Ma diun	1 paket	187.634.000	APBD Kota : 187.634.000	Rutin	1 paket	190.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			9	Kegiatan Koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah	Kota Ma diun	42 kali	110.544.000	APBD Kota : 110.544.000	Rutin	42 kegiatan	130.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			10	Kegiatan Verifikasi Renja dan Renja Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen renja SKPD	Kota Ma diun	34 SKPD	125.666.000	APBD Kota : 125.666.000	Rutin	34 SKPD	195.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			11	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran (SIPP)	Pengembangan Sistem	Kota Ma diun	1 paket	175.000.000	APBD Kota : 175.000.000		1 paket	175.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	1	1	1	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah		2 dokumen	1.195.000.000	APBD Kota : 1.195.000.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	1	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Rutin	1 Dokumen	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah koordinasi	Kota Ma diun	1 paket	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000	Rutin	1 paket	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	175.000.000	APBD Kota : 175.000.000	Rutin	1 Dokumen	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	4	Kegiatan Pengembangan Daerah Percontohan Pengelolaan Sampah Pola 3R oleh masyarakat	Jumlah Lokasi	Kota Ma diun	1 Dokumen	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	regulasi	1 lokasi	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	5	Survey Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Rutin	1 Dokumen	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Rutin	1 Dokumen	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	7	Kegiatan Sosialisasi NSPK (Norma Standart Pedoman Kriteria) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan	Kota Ma diun	1 kegiatan	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Regulasi	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
4	1	1	1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 dokumen	500.000.000	APBD Kota : 500.000.000						
				1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah koordinasi	Kota Ma diun	1 Ormas	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Rutin	1 Dokumen	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2	Penyusunan Ekonomi Dalam Angka	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Rutin	1 Dokumen	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				3	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Corporate Sosial Responsibility	Jumlah koordinasi	Kota Ma diun	1 paket	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Rutin	1 paket	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				4	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SDGs (Sustainable Development Goals)	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Rutin	1 Dokumen	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	1	1	1	Program perencanaan Pembangunan Bidang Sosial budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	2 Dokumen	975.000.000	APBD Kota : 975.000.000						
				1	Kegiatan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah koordinasi TKPK	Kota Ma diun	3 kali	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Rutin	4 kegiatan	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	Kegiatan Penyelenggaraan Portal TKPK	Jumlah Portal	Kota Madiun	1 Unit	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Rutin	1 Unit	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	3	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Madiun	1 Dokumen	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Rutin	2 Dokumen	125.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Koordinasi dan Perjalan Dinas	Kota Madiun	1 paket	125.000.000	APBD Kota : 125.000.000	Rutin	4 kegiatan	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	Kegiatan Monev Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Madiun	1 Dokumen	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Rutin	1 Dokumen	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	6	Kegiatan Pengembangan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Madiun	1 Dokumen	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Rutin	1 Dokumen	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	7	Penyusunan Sosial Budaya dalam Angka	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Madiun	1 Dokumen	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	rutin	1 Dokumen	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
4	2	Keuangan				13.092.187.000							
4	2	1	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah	100%	5.935.432.000	APBD Kota : 5.935.432.000					
		1		Penghapusan Aset Daerah	Jumlah aset yang dihapus dari neraca	Kota Madiun	3 Jenis	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000		3 Jenis	200.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2		Pensertifikatan Tanah Milik Pemkot Madiun	Jumlah bidang tanah yang diajukan sertifikasi	Kota Madiun	30 bidang tanah	125.000.000	APBD Kota : 125.000.000		30 bidang tanah	125.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		3		Penyelenggaraan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	Kota Madiun	2 Jenis	3.945.432.000	APBD Kota : 3.945.432.000		2 Jenis	4.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		4		Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun	Jumlah pengamanan aset tetap tanah dan bangunan milik pemkot	Kota Madiun	3 Jenis	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000		3 Jenis	200.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5		Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	Laporan rekonsiliasi aset daerah dan belanja modal daerah	Kota Madiun	18 buku	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000		18 buku	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		6		Kegiatan Inventarisasi WR pemanfaatan aset milik daerah	Jumlah wajib retribusi kekayaan daerah	Kota Madiun	50 WR	90.000.000	APBD Kota : 90.000.000		100 WR	90.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		7		Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Jumlah kasus TPTGR	Kota Madiun	1 Kasus	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000		1 Kasus	20.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		8		Pemeliharaan Aset-aset Milik Daerah	Jumlah aset milik pemkot yang dipelihara	Kota Madiun	2 Jenis	175.000.000	APBD Kota : 175.000.000		2 Jenis	175.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9	Pemeliharaan aplikasi persediaan	Jumlah aplikasi	Kota Ma diun	1 buah	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000		1 buah	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			10	Kegiatan Pendampingan Penatausahaan aset daerah	Jumlah pengguna aplikasi SIM barang daerah yang didampingi	Kota Ma diun	34 SKPD	275.000.000	APBD Kota : 275.000.000		34 SKPD	275.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			11	Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang	Kota Ma diun	2 Jenis	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000		2 Jenis	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			12	Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah jenis dokumen kajian	Kota Ma diun	1 Dokumen	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000		1 Dokumen	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			13	Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG)	Jumlah database SIG	Kota Ma diun	1 paket	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000		1 paket	250.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			14	Bintek pengelolaan barang milik daerah	Jumlah peserta bintek	Kota Ma diun	183 orang	280.000.000	APBD Kota : 280.000.000		183 orang	250.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	2	1	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum		100%	548.000.000	APBD Kota : 548.000.000				
			15	Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D	Jumlah dokumen anggaran kas,SPD, SP2D	Kota Ma diun	3 Dokumen	130.000.000	APBD Kota : 130.000.000		3 Dokumen	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			16	Pengelolaan Administrasi Gaji	Jumlah dokumen administrasi gaji	Kota Ma diun	14 Dokumen	134.000.000	APBD Kota : 134.000.000		14 Dokumen	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			17	Kegiatan Rekonsiliasi Dana Hibah Pemkot Madiun	Jumlah laporan rekonsiliasi hibah pemkot madiun	Kota Ma diun	4 buku	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000		4 buku	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			18	Kegiatan Pengelolaan Arsip Perbendaharaan	Jumlah arsip yang dikelola	Kota Ma diun	3 Dokumen	84.000.000	APBD Kota : 84.000.000		3 Dokumen	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			19	Penyusunan Data-data Pemerintah Pusat	Jumlah data	Kota Ma diun	17 data	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000		17 data	175.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	2	1	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan landasan hukum		100%	4.819.641.000	APBD Kota : 4.819.641.000				
			20	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Kota Ma diun	1 Dokumen	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000		1 Dokumen	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Penyusunan DPA dan DPPA	jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran	Kota Ma diun	2 Dokumen	226.568.000	APBD Kota : 226.568.000	2 Dokumen	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	3	Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Jumlah produk hukum	Kota Ma diun	2 Produk Hukum	430.282.000	APBD Kota : 430.282.000	2 Produk Hukum	430.282.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	4	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah produk hukum	Kota Ma diun	2 Produk Hukum	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	2 Produk	250.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	Jumlah produk hukum	Kota Ma diun	2 Produk Hukum	452.652.000	APBD Kota : 452.652.000	2 Produk Hukum	452.652.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	6	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi	Kota Ma diun	1 buah	75.139.000	APBD Kota : 75.139.000	1 buah	75.139.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	7	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	Kota Ma diun	2 buku	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	2 buku	75.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	8	Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Jumlah laporan penerimaan daerah dari SKPD sesuai dengan laporan penerimaan dari kas umum daerah	Kota Ma diun	16 buku	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000	16 buku	120.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	9	Pendampingan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengguna aplikasi yang di dampingi	Kota Ma diun	34 SKPD	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	34 SKPD	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	10	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah peserta bintek	Kota Ma diun	350 orang	300.000.000	APBD Kota : 300.000.000	350 orang	300.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	11	Kegiatan Bimtek Pendapatan Daerah	Jumlah peserta bintek	Kota Ma diun	40 orang	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	40 orang	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	12	Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus	Jumlah dokumen tentang standar biaya umum dan khusus	Kota Ma diun	2 Dokumen	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	13	Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran	Jumlah ringkasan dan penjabaran realisasi SKPD per triwulan	Kota Ma diun	4 buku	110.000.000	APBD Kota : 110.000.000	4 buku	110.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	14	Penyusunan LKPD Kota Madiun	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	300.000.000	APBD Kota : 300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 5	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	Jumlah sistem dan prosedur (sisdur)	Kota Ma diun	3 Sisdur	230.000.000	APBD Kota : 230.000.000		3 Sisdur	230.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1 6	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Kota Ma diun	10 kali	1.500.000.000	APBD Kota : 1.500.000.000		10 kali	1.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1 7	Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan bulanan SKPD	Jumlah laporan keuangan	Kota Ma diun	12 buku	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000		12 buku	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1 8	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Jumlah produk hukum	Kota Ma diun	1 Produk Hukum	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000		1 Produk Hukum	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	2	1 2 0 1 2	1 5	Program Peningkatan Pendataan dan Potensi Pajak Daerah	Persentase Data Wajib Pajak yang Akurat		100%	190.000.000	APBD Kota : 190.000.000				
			1	Kegiatan Pemeliharaan Basis data PBB	Dokumen SPOP, LSPOP dan SISMIOP	Kota Ma diun	60.000 Wajib Pajak	53.000.000	APBD Kota : 53.000.000	Keakurasi an data wajib pajak PBB	0	0	Badan Pendapatan Daerah
			2	Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak Daerah	Data Wajib pajak yang akurat	Kota Ma diun	200 Wajib Pajak	62.000.000	APBD Kota : 62.000.000	Keakurasi an data wajib pajak daerah	0	0	Badan Pendapatan Daerah
			3	Kegiatan Pemeliharaan Frame Reklame	Tempat pemasangan reklame yang siap pakal	Kota Ma diun	22 Titik	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	Tempat pemasangan spanduk	0	0	Badan Pendapatan Daerah
4	2	1 2 0 1 2	1 5	Program Peningkatan Pelayanan dan Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah		1,96%	1.599.114.000	APBD Kota : 1.599.114.000				
			1	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Surat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak	Kota Ma diun	27 kelurahan	476.701.000	APBD Kota : 476.701.000	Pemberitahuan jatuh tempo kepada wajib pajak	0	0	Badan Pendapatan Daerah
			2	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB	Kota Ma diun	1 paket	283.449.000	APBD Kota : 283.449.000	Pemberian penghargaan kepada wajib pajak	0	0	Badan Pendapatan Daerah
			3	Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi	Pemberian Hadiah Gebyar undian pajak bumi dan bangunan	Kota Ma diun	1 paket	290.544.000	APBD Kota : 290.544.000	Pemberian hadiah kepada wajib pajak PBB di Kota Madlun	0	0	Badan Pendapatan Daerah
			4	Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT	Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak PBB	Kota Ma diun	60.000 SPPT Wajib Pajak	133.420.000	APBD Kota : 133.420.000	Dinas Pendapatan Daerah	0	0	Badan Pendapatan Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	5	Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	Penyelesaian permohonan keringanan bagi wajib pajak	Kota Ma diun	1500 berkas	205.000.000	APBD Kota : 205.000.000	Pemberian keringanan bagi wajib pajak yang mengajukan	0	0	Badan Pendapatan Daerah			
	6	Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Daerah	Penyebarluasan informasi perpajakan daerah	Kota Ma diun	1 paket	125.000.000	APBD Kota : 125.000.000	Pemberian sosialisasi kepada masyarakat melalui kelurahan	0	0	Badan Pendapatan Daerah			
	7	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Wajib pajak daerah yang tepat waktu pembayarannya	Kota Ma diun	2 LHP	85.000.000	APBD Kota : 85.000.000	Laporan Hasil Pemeriksaan	0	0	Badan Pendapatan Daerah			
4	3		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			4.364.000.000								
4	3	1	2	Program Penataan Aparatur	Persentase Realisasi Penataan Pegawai	100%	606.000.000	APBD Kota : 606.000.000						
		0	0	1	Kegiatan Penempatan Pegawai	Jumlah pegawai yang ditempatkan	Kota Ma diun	635 orang PNS	606.000.000	APBD Kota : 606.000.000	-	635 orang	650.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	3	1	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Realisasi Pengembangan dan Pembinaan Aparatur	100%	1.075.000.000	APBD Kota : 1.075.000.000						
		0	0	1	Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah peserta ujian CPNS	Kota Ma diun	5000 peserta	950.000.000	APBD Kota : 950.000.000	-	5000 peserta	1.000.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
				2	Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Jumlah permasalahan kepegawaian yang selesai ditangani	Kota Ma diun	50 kasus	70.000.000	APBD Kota : 70.000.000	-	4 Jenis	73.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
				3	Kegiatan Ujian Dinas	Jumlah Peserta ujian dinas	Kota Ma diun	30 orang PNS	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	-	30 peserta	30.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
				4	Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya	Kota Ma diun	200 orang PNS	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000	-	100 orang	25.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	3	1	2	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase Kelulusan Pendidikan Aparatur	100%	2.170.000.000	APBD Kota : 2.170.000.000						
		0	7	1	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III	Kota Ma diun	10 orang PNS	330.000.000	APBD Kota : 330.000.000	-	10 orang PNS	330.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
		4		2	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV	Kota Ma diun	10 orang PNS	290.000.000	APBD Kota : 290.000.000	BKD	10 orang PNS	290.000.000	Badan Kepegawaian Daerah

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			3	Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	Kota Ma diun	220 orang PNS	1.550.000.000	APBD Kota : 1.550.000.000	Pengiriman Peserta Diklat dan penyenggaraan 3 jenis diklat	230 orang PNS	1.550.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	3	1 2 0 1 0	2	Program Fasilitas Kesejahteraan PNS	Jumlah SK terkait Kesejahteraan PNS		3.250	270.000.000	APBD Kota : 270.000.000				
			1	Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis PNS	Jumlah dokumen SK kenaikan pangkat dan SK gaji berkala	Kota Ma diun	3900 Dokumen	160.000.000	APBD Kota : 160.000.000	-	3300 Dokumen	160.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
			2	Kegiatan Pemberhentian PNS yang Pensiun	Jumlah PNS yang menerima SK pensiun	Kota Ma diun	150 orang PNS	110.000.000	APBD Kota : 110.000.000	-	150 orang PNS	115.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	3	1 2 0 1 0	2	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan		100%	243.000.000	APBD Kota : 243.000.000				
			1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	Kota Ma diun	100%	220.000.000	APBD Kota : 220.000.000	-	100%	220.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
			2	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	Jumlah dokumen database kepegawaian	Kota Ma diun	1 Dokumen	23.000.000	APBD Kota : 23.000.000	-	1 Dokumen	25.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	4			Pengembangan dan Penelitian (LITBANG)				850.000.000					
4	4	1 6 0 1	2	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Dokumen pengembangan, penelitian dan data informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersedia		2 Dokumen	850.000.000	APBD Kota : 850.000.000				
			1	Kegiatan Penyusunan Kajian/ Penelitian Bidang Eksosbud dan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Rutin	1 Dokumen	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2	Kegiatan Penyusunan Kajian/ Penelitian Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Rutin	1 Dokumen	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3	Kegiatan Penyusunan Data dan Potensi Kota Madiun	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	2 Dokumen	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Rutin	2 Dokumen	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			4	Kegiatan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	1 Dokumen	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	rutin	1 Dokumen	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5	Kegiatan Koordinasi Bidang Kelitbangan	Jumlah Koordinasi dan Perjalan Dinas	Kota Ma diun	1 paket	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Rutin	1 paket	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5			Sekretariat Daerah				14.696.979.000					
4	5	1	3	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah dokumen pertanggungjawaban kinerja pemerintah		4 dokumen	3.685.000.000	APBD Kota : 3.685.000.000				
				1 Peringatan Hari Otonomi Daerah	upacara peringatan Hari Otonomi Daerah	Kota Madiun	1 kali	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	upacara peringatan Hari Otonomi Daerah	1 kali	60.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				2 Bintek Administrasi Kelurahan	Kegiatan bintek administrasi kelurahan	Kota Madiun	150 orang	185.000.000	APBD Kota : 185.000.000	Kegiatan bintek administrasi kelurahan	150 orang	185.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				3 Kegiatan Rencana Aksi Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Madiun	4 Dokumen	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Jumlah laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Dokumen	150.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				4 Kegiatan Koordinasi Penentuan Tapal Batas kelurahan	jumlah fasilitasi penentuan tapal batas	Kota Madiun	1 Dokumen	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	jumlah fasilitasi penentuan tapal batas	1 Dokumen	200.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				5 Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Jenis kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun	3 Jenis	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Kegiatan yang didanai APBD Rp. 50.000.000,- dan APBD Provinsi Rp. 50.000.000,-	3 Jenis	100.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				6 Kegiatan Pemekaran Kecamatan	Rencana Pemekaran Kecamatan	Kota Madiun	1 kali	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000				Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				7 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	jumlah rapat koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	8 kali	300.000.000	APBD Kota : 300.000.000	jumlah rapat koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	8 kali	300.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				8 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	jumlah kunjungan kerja Walikota ke Kelurahan	Kota Madiun	27 kelurahan	775.000.000	APBD Kota : 775.000.000	jumlah kunjungan kerja Walikota ke Kelurahan	27 kelurahan	775.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				9 Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil	jumlah evaluasi kelurahan berhasil	Kota Madiun	15 kali	800.000.000	APBD Kota : 800.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15 sekolah	800.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				10 Koordinasi Penyusunan LKPJ Walikota	buku LKPJ Walikota Madiun	Kota Madiun	1 Dokumen	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	buku LKPJ Walikota Madiun	1 Dokumen	150.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1 1	Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	buku LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	Kota Madiun	3 Dokumen	175.000.000	APBD Kota : 175.000.000	buku LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	3 Dokumen	175.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	1 2	Kegiatan Bimtek LPPD	Jumlah kegiatan pelaksanaan Bimtek	Kota Madiun	1 kali	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000		1 kali	175.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	1 3	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	300 orang	390.000.000	APBD Kota : 390.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300 orang	390.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
4	5	1 2 0 7 4	3 5	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah MoU		5 dokumen	1.175.000.000	APBD Kota : 1.175.000.000		
	1	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)	Rakernas Apeksi, Muskomwil Apeksi dan JKPI	Kota Madiun	3 kali	700.000.000	APBD Kota : 700.000.000	Rakernas Apeksi, Muskomwil Apeksi dan JKPI	3 kali	570.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)	PAWITAN DIROGO	Kota Madiun	1 kali	225.000.000	APBD Kota : 225.000.000	PAWITAN DIROGO	1 kali	225.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	3	Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU	Jumlah Koordinasi	Kota Madiun	5 kali	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000		5 kali	75.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	4	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri	jumlah penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun	Kota Madiun	20 kali	175.000.000	APBD Kota : 175.000.000	jumlah penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun	20 kali	175.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
4	5	1 2 0 7 2	1 7	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah		1.135.549.000	APBD Kota : 1.135.549.000				
	1	Kegiatan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	55 Dokumen	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	-		0	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	Jumlah aparatur yang dibina dan jumlah keikutsertaan gelar KBK Tingkat Provinsi	Kota Madiun	12 Orang dan 1 kali	370.000.000	APBD Kota : 370.000.000	-	12 Orang dan 1 kali	370.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	3	Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Penyusunan SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	34 SKPD	124.365.000	APBD Kota : 124.365.000		34 SKPD	175.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	4	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Madiun	5 Dokumen	266.184.000	APBD Kota : 266.184.000	Rutin	5 Dokumen	275.500.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5	Kegiatan Pengembangan E-SAKIP	Pengembangan Sistem	Kota Ma diun	1 buah	125.000.000	APBD Kota : 125.000.000		1 buah	125.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4	5	1 2 0 7 2	3 7	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah				858.100.000	APBD Kota : 858.100.000				
			1	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah laporan penerapan SPM yang disusun	Kota Ma diun	1 Laporan	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	-	1 Laporan	75.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			2	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survey	Kota Ma diun	10 Dokumen	185.000.000	APBD Kota : 185.000.000	-	10 Dokumen	250.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			3	Kegiatan Gelar Pameran Pelayanan Publik Tingkat Jawa Timur	Jumlah keikutsertaan gelar pameran pelayanan publik	Kota Ma diun	1 kali	180.000.000	APBD Kota : 180.000.000	-	0	0	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			4	Kegiatan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Peserta Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik	Kota Ma diun	128 orang	283.100.000	APBD Kota : 283.100.000	-	128 orang	283.100.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			5	Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan	Kota Ma diun	1 Dokumen	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	-	1 Dokumen	75.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			6	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi	Kota Ma diun	1 Laporan	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	-	1 Laporan	100.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4	5	1 2 0 7 1	4 0	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik		100%	2.158.270.000	APBD Kota : 2.158.270.000				
			1	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah raperda/ perda, dok. kompilasi dan sosialisasi	Kota Ma diun	3 Jenis	1.080.000.000	APBD Kota : 1.080.000.000	Kegiatan Tahunan	3 Jenis	1.080.000.000	Bagian Hukum sekretariat Daerah
			2	Legislasi Daerah (Prolegda)	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Kegiatan Tahunan	1 Dokumen	100.000.000	Bagian Hukum sekretariat Daerah
			3	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah himpunan lemb. daerah, jdih, lemb. lepas perda dan buku peraturan perundang-undangan	Kota Ma diun	4 Jenis	255.726.000	APBD Kota : 255.726.000	Kegiatan Tahunan	4 Jenis	255.726.000	Bagian Hukum sekretariat Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				4	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembinaan kadarkum, penyuluhan hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Kota Ma diun	3 Jenis	722.544.000	APBD Kota : 722.544.000	Kegiatan Tahunan	rtanahan	722.544.000	Bagian Hukum sekretariat Daerah
4	5	1	3		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		47 kali	556.750.000	APBD Kota : 556.750.000				
				1	Kegiatan Keprotokolan Peliputan Kegiatan Pemkot	Jumlah Kegiatan	Kota Ma diun	528 kali	286.750.000	APBD Kota : 286.750.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	286.750.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
				2	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Pemberian Penghargaan Atlet Berprestasi	Jumlah Olahraga Yang Dilaksanakan dan Jenis Penghargaan	Kota Ma diun	43 kali	270.000.000	APBD Kota : 270.000.000	43 kali kegiatan olahraga, 23 jenis penghargaan.	43 kali	270.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	5	1	3		Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa				1.558.310.000	APBD Kota : 1.558.310.000				
				1	Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	103.930.000	APBD Kota : 103.930.000	1 dokumen petunjuk operasional kegiatan	1 Dokumen	103.930.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
				2	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil SKPD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/ jasas	Kota Ma diun	150 orang	375.932.000	APBD Kota : 375.932.000	150 orang dari SKPD, BLU, Kelurahan , Sekolah	150 orang	375.932.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
				3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen/ Laporan	Kota Ma diun	24 Dokumen	318.248.000	APBD Kota : 318.248.000	24 dokumen laporan bulanan	24 Dokumen	318.248.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
				4	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standart Kegiatan Konstruksi	1 Dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	314.700.000	APBD Kota : 314.700.000	1 Dokumen Standar Harga dan Analisa Harga Satuan Kegiatan Konstruksi	1 Dokumen	314.700.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
				5	Kegiatan Operasional ULP	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilelang	Kota Ma diun	150 paket	445.500.000	APBD Kota : 445.500.000	150 paket lelang	150	445.500.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4	5	1	1		Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi			3.000.000.000	APBD Kota : 3.000.000.000				

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1	Seleksi dan Pengiriman Kafilah MTQ	Jumlah Peserta Yang Dikirim	Kota Ma diun	30 orang	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000		30 orang	200.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			2	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	Jumlah Peringatan Hari Besar Agama Islam	Kota Ma diun	7 PHBI	2.600.000.000	APBD Kota : 2.600.000.000		7 PHBI	2.600.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			3	Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah Jamaah Haji	Kota Ma diun	155 orang	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000		155 orang	200.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	5	1	1	Program Stabilitas Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Kota Madlun			570.000.000	APBD Kota : 570.000.000				
			1	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBH-CHT)	Jumlah Peserta	Kota Ma diun	370 orang	300.000.000	APBD Kota : 300.000.000		370 orang	300.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			2	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jenis Kegiatan TPID	Kota Ma diun	3 Jenis	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000		3 Jenis	60.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			3	Kegiatan Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD	Kota Ma diun	3 BUMD	160.000.000	APBD Kota : 160.000.000		3 BUMD	160.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			4	Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang LKM	Jumlah Peserta	Kota Ma diun	200 orang	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000		200 orang	50.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	6			Sekretariat DPRD				13.152.388.000					
4	6	1	2	Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu		100%	13.152.388.000	APBD Kota : 13.152.388.000				
			1	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan menjadi Perda	Kota Ma diun	11 Dokumen	2.253.778.000	APBD Kota : 2.253.778.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pembahasan Raperda yaitu biaya rapat, hr. tim ahli dan biaya perjalanan dinas keluar daerah	10 Dokumen	2.253.778.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah hearing/ rapat kerja/ dengan pendapat dengan Pemda, Tokoh Masyarakat dan tokoh agama	Kota Ma diun	50 kali	121.290.000	APBD Kota : 121.290.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk biaya lembur, biaya cetak dan biaya makan minum rapat	51 kali	121.290.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	3	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat komisi, rapat pimpinan, rapat gabungan komisi, rapat gabungan pimpinan, rapat badan musyarah, badan anggaran, badan kehormatan, badan legislasi dan panitia khusus	Kota Ma diun	54 kali	798.091.000	APBD Kota : 798.091.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk pengadavan ATK, tim ahli, cetak, sewa gedung, makan minum rapat dan biaya perjalanan dinas keluar daerah	55 kali	798.091.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna	Kota Ma diun	11 kali	327.734.000	APBD Kota : 327.734.000	Kegiatan dipergunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana rapat Paripurna yaitu biaya lembur, ATK, jasa tenaga upahan, cetak, sewa sarana prasarana dan biaya makan minum rapat	10 kali	327.734.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses	Kota Ma diun	3 kali	1.442.525.000	APBD Kota : 1.442.525.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan reses Anggota DPRD di Daerah Pemilihan nya masing-masing yaitu biaya panitia, nara sumber, cetak, sewa sarana prasarana , makan minum rapat dan bantuan transport.	3 kali	1.442.525.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	6 Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja dalam satu tahun	Kota Ma diun	11 kali	4.609.977.000	APBD Kota : 4.609.977.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kunker Anggota DPRD yaitu biaya cetak, makan minum rapat dan biaya perjalanan dinas keluar daerah	12 kali	4.609.977.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	7 Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah diklat, bintek dan Workshop dalam satu tahun	Kota Ma diun	8 kali	3.133.666.000	APBD Kota : 3.133.666.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat, bintek dan workshop ADEKSI	8 kali	3.133.666.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8 Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publik	Kota Ma diun	22 kali	420.435.000	APBD Kota : 420.435.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk biaya peliputan kegiatan DPRD, baik di media cetak/ koran maupun di media elektronik /televisi	24 kall	420.435.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	9 Kegiatan Fraksi	Jumlah Pemandangan Umum dan Pemandangan Akhir Fraksi	Kota Ma diun	11 kali	44.892.000	APBD Kota : 44.892.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk pengadaan ATK dan biaya cetak	10 kali	44.892.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	7	Inspektorat			2.668.038.000						
4	7	1 2 2 6 0 0 6 6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Entits yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja dengan Baik	82%	987.798.000	APBD Kota : 987.798.000				
	1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah entitas yang telah diperiksa	Kota Ma diun	74 Obrik	646.548.000	APBD Kota : 646.548.000	Tahunan	74 Obrik	646.548.000	Inspektorat
	2	Kegiatan Penanganan Pengaduan/tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase kasus pengaduan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan	Kota Ma diun	100%	147.000.000	APBD Kota : 147.000.000	Tahunan	100%	161.700.000	Inspektorat
	3	Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan hasil reviu	Kota Ma diun	7 Dokumen	111.750.000	APBD Kota : 111.750.000	Tahunan	7 Dokumen	111.750.000	Inspektorat
	4	Kegiatan Probiti Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan yang telah diprobity audit	Kota Ma diun	17 kegiatan	82.500.000	APBD Kota : 82.500.000	Tahunan	17 kegiatan	82.500.000	Inspektorat
4	7	1 2 2 7 0 0 6 6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparatur Pemerintah yang mengikuti bimtek dan bersertifikat	190 orang	606.840.000	APBD Kota : 606.840.000				
	1	Mengikuti Pelatihan Teknis Seminar, Workshop, Bimtek dan Raker	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat, dll	Kota Ma diun	30 orang/kali	355.840.000	APBD Kota : 355.840.000	Tahunan	30 orang/kali	385.000.000	Inspektorat
	2	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti bimtek	Kota Ma diun	50 orang/kali	176.000.000	APBD Kota : 176.000.000	Tahunan	50 orang/kali	176.000.000	Inspektorat

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3	Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti pembinaan	Kota Ma diun	100 orang	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	Tahunan	100 orang	75.000.000	Inspektorat
4	7	1 2 0 0 6	4 8	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang telah melakukan SAKIP		100%	565.600.000	APBD Kota : 565.600.000				
			1	Kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi Laporan Kerjanya	Kota Ma diun	34 SKPD	164.000.000	APBD Kota : 164.000.000	Tahunan	34 SKPD	164.000.000	Inspektorat
			2	Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kota Madiun	Jumlah dokumen laporan hasil reviu Laporan Kinerja Kota Madiun	Kota Ma diun	1 Dokumen	87.400.000	APBD Kota : 87.400.000	Tahunan	1 Dokumen	87.400.000	Inspektorat
			3	Kegiatan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Jumlah dokumen hasil penilaian PMPRB Kota Madiun	Kota Ma diun	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Tahunan	1 Dokumen	50.000.000	Inspektorat
			4	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	SKPD yang diusulkan sebagai WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	Kota Ma diun	1 SKPD	76.400.000	APBD Kota : 76.400.000	Tahunan	1 SKPD	76.400.000	Inspektorat
			5	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah dokumen Laporan Pengendalian Gratifikasi	Kota Ma diun	1 Dokumen	49.000.000	APBD Kota : 49.000.000	Tahunan	1 Dokumen	49.000.000	Inspektorat
			6	Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen laporan verifikasi	Kota Ma diun	2 Dokumen	65.000.000	APBD Kota : 65.000.000	Tahunan	2 Dokumen	65.000.000	Inspektorat
			7	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	Jumlah SKPD yang dimonitoring	Kota Ma diun	14 SKPD	73.800.000	APBD Kota : 73.800.000	Tahunan	14 SKPD	81.000.000	Inspektorat
4	7	1 2 0 0 6	5 1	Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase temuan yang telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi		88%	507.800.000	APBD Kota : 507.800.000				
			1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur pengawasan yang tersusun	Kota Ma diun	5 Dokumen	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	Baru	5 Dokumen	30.000.000	Inspektorat
			2	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	Persentase temuan pemeriksaan reguler yang telah ditindak lanjuti	Kota Ma diun	92%	187.000.000	APBD Kota : 187.000.000	Tahunan	93%	187.000.000	Inspektorat
			3	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen LHP Reguler dan Riksusdan	Kota Ma diun	110 Dokumen	83.800.000	APBD Kota : 83.800.000	Tahunan	140 Dokumen	83.800.000	Inspektorat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	4	Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Persentase temuan pemeriksaan eksternal (BPK Ri) yang telah ditindak lanjuti	Kota Ma diun	82%	66.000.000	APBD Kota : 66.000.000	Tahunan	83%	66.000.000	Inspektorat	
	5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Entitas yang telah dimonitor dan dievaluasi	Kota Ma diun	8 Dokumen	141.000.000	APBD Kota : 141.000.000	Tahunan	8 Dokumen	141.000.000	Inspektorat	
4	8		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			3.859.732.000						
4	8	1 1 9 0 1	1 5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	0	858.000.000	APBD Kota : 858.000.000				
	1		Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	Kota Ma diun	4270 orang	660.000.000	APBD Kota : 660.000.000	3 kegiatan	4270 orang	700.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2		Kegiatan Pemantapan Idiologi dan HAM	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Ma diun	600 orang	198.000.000	APBD Kota : 198.000.000	2 kegiatan	600 orang	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8	1 1 9 0 1	1 6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kemitraan dengan Elemen Masyarakat	9	1.543.732.000	APBD Kota : 1.543.732.000				
	1		Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah peserta pembinaan	Kota Ma diun	4289 orang	685.768.000	APBD Kota : 685.768.000	3 kegiatan	4289 orang	690.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2		Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta sarasehan	Kota Ma diun	175 orang	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	1 kegiatan	175 orang	90.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	3		Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah pertemuan FKUB	Kota Ma diun	9 kali	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	8 pertemuan FKUB, 1 forkom kon	9 kali	90.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	4		Kegiatan Pelestarian Budaya Bangsa	Jumlah peserta pembinaan	Kota Ma diun	200 orang	90.000.000	APBD Kota : 90.000.000	1 kegiatan	200 orang	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	5		Kegiatan Optimalisasi Pembinaan dan Fasilitasi Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan	Jumlah peserta workshop	Kota Ma diun	150 orang	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	1 kegiatan	150 orang	90.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	6		Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta sarasehan	Kota Ma diun	150 orang	130.768.000	APBD Kota : 130.768.000	1 kegiatan	150 orang	140.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	7		Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkuat NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	Jumlah peserta pembinaan	Kota Ma diun	150 orang	312.196.000	APBD Kota : 312.196.000	3 kegiatan	150 orang	350.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Jumlah peserta sarasehan	Kota Ma diun	150 orang	85.000.000	APBD Kota : 85.000.000	1 kegiatan	150 orang	95.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8	1	1	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Parpol dan orkesmas yang memaham regulasi		100%	562.000.000	APBD Kota : 562.000.000				
			1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Jumlah parpol penerima bantuan	Kota Ma diun	10 Parpol	54.000.000	APBD Kota : 54.000.000	bantuan parpol dan bintek	10 Parpol	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan	Kota Ma diun	1200 orang	350.000.000	APBD Kota : 350.000.000	1 kegiatan	jumlah peserta penyuluhan	350.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			3	Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/ LSM dan Pemuda	Jumlah pengurus LSM/ Orkemas yang diperoleh pembinaan	Kota Ma diun	100 orang	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	1 kegiatan	100 orang	85.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4	Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM	Jumlah peserta sarasehan	Kota Ma diun	600 orang	83.000.000	APBD Kota : 83.000.000	6 kegiatan	600 orang	90.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8	1	1	Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat		10%	896.000.000	APBD Kota : 896.000.000				
			1	Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah demo	Kota Ma diun	14 kali	78.000.000	APBD Kota : 78.000.000	kegiatan 1 tahun	14 kali	85.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi cegah dini dan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas	Jumlah peserta pembinaan	Kota Ma diun	910 orang	220.000.000	APBD Kota : 220.000.000	3 kegiatan	910 orang	250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey/ Penelitian	Jumlah ijin survey/pe nelitian yang dimonitor	Kota Ma diun	225 Ijin	46.000.000	APBD Kota : 46.000.000	kegiatan 1 tahun	225 Ijin	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4	Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	Jumlah Rakor Dengan Instansi Terkait	Kota Ma diun	12 kali	237.000.000	APBD Kota : 237.000.000		12 kali	250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait	Kota Ma diun	12 kali	315.000.000	APBD Kota : 315.000.000	Kegiatan 1 tahun kominda, 3 kegiatan pembinaan	12 kali	350.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	9			Kecamatan				6.911.797.000					
4	9	1	2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban		400 orang	368.375.000	APBD Kota : 368.375.000				

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase kehadiran peserta	Kota Ma diun	100%	125.175.000	APBD Kota : 125.175.000	-	100%	0	Kecamatan Taman
			1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase kehadiran peserta koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kota Ma diun	100%	123.200.000	APBD Kota : 123.200.000	Kelurahan Manguharjo	100%	130.000.000	Kecamatan Manguharjo
			1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase kehadiran peserta koordinasi peningkatan keamanan lingkungan	Kota Ma diun	100%	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000	Tahunan	100%	130.000.000	Kecamatan Kartoharjo
4	9	1	5	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesainya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan		100%	5.105.972.000	APBD Kota : 5.105.972.000				
			1	Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	Jumlah terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan Mojorejo	Kota Ma diun	3400 Dokumen	188.318.000	APBD Kota : 188.318.000	-	3400 Dokumen	166.818.000	Kecamatan Taman
			2	Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	Jumlah terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pandean	Kota Ma diun	3300 Dokumen	187.401.000	APBD Kota : 187.401.000	-	3300 Dokumen	165.901.000	Kecamatan Taman
			2	Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	Jumlah terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan Banjarejo	Kota Ma diun	2400 Dokumen	158.596.000	APBD Kota : 158.596.000	-	2400 Dokumen	137.096.000	Kecamatan Taman
			2	Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen	Jumlah terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kuncen	Kota Ma diun	580 Dokumen	122.890.000	APBD Kota : 122.890.000	-	580 Dokumen	101.390.000	Kecamatan Taman
			2	Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo	Jumlah terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan Manisrejo	Kota Ma diun	6000 Dokumen	186.335.000	APBD Kota : 186.335.000	-	6000 Dokumen	164.835.000	Kecamatan Taman

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	24	Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kejuron	Kota Madiun	3100 Dokumen	175.982.000	APBD Kota : 175.982.000	-	3100 Dokumen	154.482.000	Kecamatan Taman
	25	Penyelenggaraan Kelurahan Josenan	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Josenan	Kota Madiun	1860 Dokumen	152.868.000	APBD Kota : 152.868.000	-	1860 Dokumen	131.368.000	Kecamatan Taman
	26	Penyelenggaraan Kelurahan Demangan	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Demangan	Kota Madiun	2700 Dokumen	164.510.000	APBD Kota : 164.510.000	-	2700 Dokumen	143.010.000	Kecamatan Taman
	27	Penyelenggaraan Kelurahan Taman	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Taman	Kota Madiun	4300 Dokumen	184.932.000	APBD Kota : 184.932.000	-	4300 Dokumen	163.432.000	Kecamatan Taman
	10	Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Madiun Lor	Kota Madiun	3000 Dokumen	166.106.000	APBD Kota : 166.106.000	Kelurahan madiun Lor	3000 Dokumen	182.716.000	Kecamatan Manguharjo
	11	Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Nambangan Lor	Kota Madiun	5000 Dokumen	246.751.000	APBD Kota : 246.751.000	Kelurahan Nambangan Lor	5000 Dokumen	271.426.000	Kecamatan Manguharjo
	12	Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Nambangan Kidul	Kota Madiun	4500 Dokumen	293.627.000	APBD Kota : 293.627.000	Kelurahan Nambangan Kidul	4500 Dokumen	322.989.000	Kecamatan Manguharjo
	13	Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Sogaten	Kota Madiun	1500 Dokumen	188.879.000	APBD Kota : 188.879.000	Kelurahan Sogaten	1500 Dokumen	207.766.000	Kecamatan Manguharjo
	14	Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Patihan	Kota Madiun	2500 Dokumen	140.932.000	APBD Kota : 140.932.000	Kelurahan Patihan	2500 Dokumen	155.025.000	Kecamatan Manguharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 5 Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	Jumlah terselesai kannya permohonan rekomendasi dasi di Kelurahan Winongo	Kota Ma diun	4000 Dokumen	170.531.000	APBD Kota : 170.531.000	Kelurahan Winongo	4000 Do kumen	187.584.000	Kecamatan Manguharjo
	1 6 Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	Jumlah terselesai kannya permohonan rekomendasi dasi di Kelurahan Pangongangan	Kota Ma diun	2000 Dokumen	155.054.000	APBD Kota : 155.054.000	Kelurahan Pangongangan	2000 Do kumen	170.559.000	Kecamatan Manguharjo
	1 7 Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	Jumlah terselesai kannya permohonan rekomendasi dasi di Kelurahan Manguharjo	Kota Ma diun	3600 Dokumen	167.580.000	APBD Kota : 167.580.000	Kelurahan manguharjo	3600 Do kumen	184.338.000	Kecamatan Manguharjo
	1 8 Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	Jumlah terselesai kannya permohonan rekomendasi dasi di Kelurahan Ngegong	Kota Ma diun	2000 Dokumen	141.195.000	APBD Kota : 141.195.000	Kelurahan Ngegong	1500 Do kumen	155.314.500	Kecamatan Manguharjo
	1 Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	Jumlah terselesai kannya permohonan rekomendasi dasi di Kelurahan Kartoharjo	Kota Ma diun	850 Dokumen	205.309.000	APBD Kota : 205.309.000	Kelurahan Kartoharjo	850 Do kumen	205.309.000	Kecamatan Kartoharjo
	2 Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	Jumlah terselesai kannya permohonan rekomendasi dasi di Kelurahan Klegen	Kota Ma diun	2800 Dokumen	230.557.000	APBD Kota : 230.557.000	Kelurahan Klegen	2800 Do kumen	218.557.000	Kecamatan Kartoharjo
	3 Penyelenggaraan Kelurahan kanigoro	Jumlah terselesai kannya permohonan rekomendasi dasi di Kelurahan Kanigoro	Kota Ma diun	1900 Dokumen	256.520.000	APBD Kota : 256.520.000	Kelurahan Kanigoro	1900 Do kumen	256.520.000	Kecamatan Kartoharjo
	4 Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo	Jumlah terselesai kannya permohonan rekomendasi dasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo	Kota Ma diun	6250 Dokumen	236.401.000	APBD Kota : 236.401.000	Kelurahan Oro-Oro Ombo	6250 Do kumen	236.401.000	Kecamatan Kartoharjo
	5 Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	Jumlah terselesai kannya permohonan rekomendasi dasi di Kelurahan Rejomulyo	Kota Ma diun	2700 Dokumen	219.406.000	APBD Kota : 219.406.000	Kelurahan Rejomulyo	2700 Do kumen	219.406.000	Kecamatan Kartoharjo

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6	Penyelenggaraan Kelurahan Pilang Bango	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pilangbango	Kota Ma diun	1250 Dokumen	198.546.000	APBD Kota : 198.546.000	Kelurahan Pilang bango	1250 Dokumen	198.546.000	Kecamatan Kartoharjo
			7	Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Sukosari	Kota Ma diun	950 Dokumen	174.146.000	APBD Kota : 174.146.000	Kelurahan Sukosari	950 Dokumen	174.146.000	Kecamatan Kartoharjo
			8	Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kelun	Kota Ma diun	1100 Dokumen	206.444.000	APBD Kota : 206.444.000	Kelurahan Kelun	1100 Dokumen	206.444.000	Kecamatan Kartoharjo
			9	Penyelenggaraan Kelurahan Tawang Rejo	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo	Kota Ma diun	1700 Dokumen	186.156.000	APBD Kota : 186.156.000	Kelurahan Tawang rejo	1700 Dokumen	186.156.000	Kecamatan Kartoharjo
4	9	1	2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan		100%	735.000.000	APBD Kota : 735.500.000				
			1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	Kota Ma diun	10 kali	185.500.000	APBD Kota : 185.500.000	-	10 kali	190.000.000	Kecamatan Taman
			1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Kota Ma diun	10 kali	169.500.000	APBD Kota : 169.500.000	Kecamatan manguharjo	10 kali	175.000.000	Kecamatan Manguharjo
			1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan & Kecamatan	Kota Ma diun	10 kali	170.000.000	APBD Kota : 170.000.000	Kecamatan Kartoharjo dan 9 Kelurahan	10 kali	175.000.000	Kecamatan Kartoharjo
			2	BOP PMDPK Bina Lingkungan	Jumlah kelompok TPCK yang berpartisipasi dalam PMDPK	Kota Ma diun	9 kelompok	210.000.000	APBD Kota : 210.000.000	Kecamatan manguharjo	9 kelompok	220.000.000	Kecamatan Manguharjo
4	9	1	2	Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan		100%	702.450.000	APBD Kota : 702.450.000				
			1	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kota Ma diun	1 kali	236.950.000	APBD Kota : 236.950.000	-	1 kali	236.950.000	Kecamatan Taman

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan	Kota Ma diun	1 kali	165.500.000	APBD Kota : 165.500.000	Kecamatan manguharjo	1 kali	170.000.000	Kecamatan Manguharjo
			1	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan	Kota Ma diun	1 kali	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Kecamatan Kartoharjo	1 kali	220.000.000	Kecamatan Kartoharjo
			2	Sosialisasi Ahli Waris	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ahli waris	Kota Ma diun	1 kali	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Kecamatan Kartoharjo	1 kali	100.000.000	Kecamatan Kartoharjo
0	1			RUTIN				84.372.741.405					
0	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100%	49.180.009.600	APBD Kota : 49.180.009.600				
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	3.569.230.000	APBD Kota : 3.569.230.000	-	1 lembaga	2.452.243.000	Dinas Pendidikan
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa, peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kota Ma diun	13 Jenis	746.258.000	APBD Kota : 746.258.000		13 Jenis	935.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honorarium PNS dan non PNS yang disediakan	Kota Ma diun	53 orang	898.600.000	APBD Kota : 898.600.000	BLUD	55 orang	911.464.618	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (ATK, Alat Listrik, Perangkat, Materai, Surat Kabar, Foto copy dll)	Kota Ma diun	10 Jenis	1.331.997.000	APBD Kota : 1.331.997.000	-	10 Jenis	1.504.284.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	75 Jenis	260.435.000	APBD Kota : 260.435.000	Belanja barang dan jasa untuk keperluan kantor	75 Jenis	273.450.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/ Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kota Ma diun	7 Jenis	1.299.000.000	APBD Kota : 1.299.000.000	-	7 Jenis	1.300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Ma diun	11 Unit	386.350.000	APBD Kota : 386.350.000	Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit	429.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ma diun	10 paket	400.000.000	APBD Kota : 400.000.000	Rutin	10 paket	370.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan bahan penunjang ATK, alat listrik dan elektronik, benda pos, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, cetak dan penggandaan	Kota Ma diun	10 Jenis	287.627.000	APBD Kota : 287.627.000	Pembelian peralatan bahan penunjang	10 Jenis	0	Dinas Tenaga Kerja
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kota Ma diun	10 paket	325.000.000	APBD Kota : 325.000.000	Rutin/ tahunan, meliputi pelayanan (Hr Pengelola Keuangan dan Barang, Hr Tenaga Tidak Tetap, jasa petugas kebersihan, ATK, alat listrik, perangkat, alat dan bahan kebersihan, pulsa listrik, cetak dan penggandaan)	10 paket	345.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	9 Jenis	575.840.000	APBD Kota : 575.840.000	9 jenis (Honor Pelaksana, Upah Honorer, Lembur, ATK, Cetak, Penggandaan, Benda Pos, Peralatan Kebersihan, Mamin)	9 Jenis	575.840.000	Dinas Lingkungan Hidup
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan	Kota Ma diun	5 Jenis	461.906.000	APBD Kota : 461.906.000	-	5 Jenis	461.906.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	15 Jenis	1.323.864.000	APBD Kota : 1.323.864.000	-	15 Jenis	1.429.000.000	Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hr Lembur ATK, Alat Listrik, Material, Alat Kebersihan, Surat Kabar, cetak dan Penggandaan	Kota Ma diun	1 paket	732.500.000	APBD Kota : 732.500.000	Bagian Humas dan Protokol	12 bulan	232.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa operasional kantor	Kota Ma diun	14 Jenis	395.000.000	APBD Kota : 395.000.000	Lanjutan	14 Jenis	410.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kota Ma diun	2 paket	325.000.000	APBD Kota : 325.000.000	Rutin	2	350.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan	Kota Ma diun	1 paket	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Terpenuh inya Jasa dan Peralatan Kantor	1 paket	225.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ma diun	8 Jenis	309.225.000	APBD Kota : 309.225.000	Kegiatan Rutin tahun 2017	8 Jenis	340.150.000	Dinas Perdagangan
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan penunjang	Kota Ma diun	7 Jenis	866.090.000	APBD Kota : 866.090.000	-	7 Jenis	866.090.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	7 Jenis	730.000.000	APBD Kota : 730.000.000	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	670.848.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa kantor	Kota Ma diun	6 Paket	147.540.000	APBD Kota : 147.540.000	6 peket peralatan dan perlengkapan kantor	6 paket	147.540.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	1 paket	232.639.000	APBD Kota : 232.639.000	Rutin	1 paket	255.902.900	Bagian Hukum sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa kantor	Kota Ma diun	14 Jenis	1.881.137.000	APBD Kota : 1.881.137.000	3 BP 11 BJ	13 Jenis	1.739.860.153	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	7 paket	276.960.000	APBD Kota : 276.960.000		7 paket	276.960.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	9 paket	488.079.000	APBD Kota : 488.079.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang/ Jasa kebutuhan rutin	10 paket	488.079.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	8 Jenis	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Rutin	8 Jenis	165.000.000	Inspektorat
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis kegiatan	Kota Ma diun	9 Jenis	360.000.000	APBD Kota : 360.000.000	-	9 Jenis	380.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	1 paket	18.533.650.000	APBD Kota : 18.533.650.000		1 paket	18.533.650.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan penunjang	Kota Ma diun	10 macam	399.313.000	APBD Kota : 399.313.000	Belanja peralatan kantor	8 Jenis	0	Badan Pendapatan Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan ,barang dan jasa kantor	Kota Ma diun	72 buah	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Rutin	72 buah	167.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ma diun	1 paket	708.578.000	APBD Kota : 708.578.000	Kecamatan Karto harjo	1 paket	779.435.000	Kecamatan Karto harjo
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	1 paket	1.036.056.000	APBD Kota : 1.036.056.000	Kecamatan mangu harjo	1 paket	954.861.000	Kecamatan Manguharjo
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	1 paket	936.136.000	APBD Kota : 936.136.000	-	1 paket	936.136.000	Kecamatan Taman
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ma diun	6 Jenis	182.200.000	APBD Kota : 182.200.000	rutin	6 Jenis	182.200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kota Ma diun	99 kali	183.750.000	APBD Kota : 183.750.000	-	99 kali	160.781.000	Dinas Pendidikan
	2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Kota Ma diun	300 kali	274.536.000	APBD Kota : 274.536.000	-	300 kali	274.536.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Ma diun	40 kali	133.747.000	APBD Kota : 133.747.000	-	45 kali	160.496.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Ma diun	30 kali	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000	Biaya perjalanan dinas	35 kali	45.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Ma diun	45 kali	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	50 kali	175.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Ma diun	10 kali	179.550.000	APBD Kota : 179.550.000	Kegiatan Koor dinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10 kali	179.550.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Ma diun	108 kali	135.000.000	APBD Kota : 135.000.000	Rutin	108 kali	135.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Kota Ma diun	1 kegiatan	69.984.000	APBD Kota : 69.984.000	Perjalanan dinas luar daerah	1 kegiatan	0	Dinas Tenaga Kerja
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas keluar daerah	Kota Ma diun	67 kali	155.220.000	APBD Kota : 155.220.000	rutin	70 kali	170.060.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Ma diun	20 kali	45.000.000	APBD Kota : 45.000.000	20 kali perjalanan dinas	20 kali	45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah	Kota Ma diun	34 kali	120.475.000	APBD Kota : 120.475.000	-	34 kali	120.475.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Ma diun	38 kali	65.000.000	APBD Kota : 65.000.000	-	40 kali	70.000.000	Dinas Perhubungan
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kota Ma diun	28 kali	88.750.000	APBD Kota : 88.750.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	88.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Ma diun	30 kali	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	Lanjutan	30 kali	80.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kota Ma diun	58 kali	160.000.000	APBD Kota : 160.000.000	Rutin	68 kali	180.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi	Kota Ma diun	57 kali	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	Perjalanan Dinas	60 kali	65.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Ma diun	19 kali	52.475.000	APBD Kota : 52.475.000	Kegiatan Rutin tahun 2017	19 kali	57.800.000	Dinas Perdagangan
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Ma diun	36 kali	83.650.000	APBD Kota : 83.650.000	-	38 kali	80.538.400	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Ma diun	24 kali	62.526.000	APBD Kota : 62.526.000	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 kali	62.526.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Ma diun	1 Tahun	42.000.000	APBD Kota : 42.000.000	Koordinasi dan konsultasi 1 tahun	1 Tahun	42.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Ma diun	45 kali	60.500.000	APBD Kota : 60.500.000	Rutin	50 kali	66.550.000	Bagian Hukum sekretariat Daerah
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Ma diun	491 kali	1.885.445.000	APBD Kota : 1.885.445.000	Perjalanan dinas dan Akomodasi	491 kali	1.980.580.612	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Ma diun	46 kali	51.188.000	APBD Kota : 51.188.000		46 kali	51.188.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Ma diun	40 kali	2.769.392.000	APBD Kota : 2.769.392.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas keluar daerah	42 kali	2.769.392.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Kota Ma diun	46 orang/kali	91.700.000	APBD Kota : 91.700.000	Rutin	46 Org/bln	100.870.000	Inspektorat
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas	Kota Ma diun	35 kali	130.000.000	APBD Kota : 130.000.000	-	50 kali	150.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Kota Ma diun	40 kali	175.000.000	APBD Kota : 175.000.000		40 kali	175.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	Kota Ma diun	38 kali	88.465.000	APBD Kota : 88.465.000	Perjalanan dinas keluar daerah	38 kali	0	Badan Pendapatan Daerah
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah	Kota Ma diun	72 kali	225.000.000	APBD Kota : 225.000.000	Rutin	72 kali	23.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Ma diun	16 kali	85.106.000	APBD Kota : 85.106.000	Kecamatan Karto harjo	16 kali	93.616.600	Kecamatan Karto harjo
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Ma diun	1 paket	194.847.000	APBD Kota : 194.847.000	Kecamatan mangu harjo	1	339.898.000	Kecamatan Manguharjo
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Kota Ma diun	34 kali	165.468.000	APBD Kota : 165.468.000	-	34 kali	165.468.000	Kecamatan Taman
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Ma diun	54 kali	110.025.600	APBD Kota : 110.025.600	rutin	54 kali	121.028.160	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	1	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	13.846.377.805	APBD Kota : 13.846.377.805			
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	1 lembaga	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	1 lembaga	52.093.000	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah jenis pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan	Kota Ma diun	1 Jenis	7.500.000	APBD Kota : 7.500.000	-	1 Jenis	13.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Kota Ma diun	4 Gedung	726.451.000	APBD Kota : 726.451.000	-	4 Gedung	871.741.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Kota Ma diun	2 Gedung	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000	Pengecatan dan renovasi gedung KLH dan gedung laboratorium	2 Gedung	30.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	Kota Ma diun	1 Gedung	15.000.000	APBD Kota : 15.000.000	-	1 Gedung	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Kantor yang dipelihara	Kota Ma diun	1 paket	3.380.000	APBD Kota : 3.380.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Dan Bangunan	1 paket	4.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	Kota Ma diun	4 Unit	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000	Rutin	4 Unit	20.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan dan perawatan gedung/ lingkungan	Kota Ma diun	3 kegiatan	206.280.000	APBD Kota : 206.280.000	rehab kantor dinas tenaga kerja dan sosial serta eks PRW Anggraini	3 kegiatan	0	Dinas Tenaga Kerja
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah lokasi gedung/ bangunan	Kota Ma diun	3 Gedung	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000	rutin	3 Gedung	65.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung/ lokasi	Kota Ma diun	4 lokasi	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	4 lokasi (Gedung kantor Jl. Salak, Jl. Pandan, Kantor TPA Winongo, Kantor Makam Pace Keras)	4 lokasi	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	Kota Ma diun	1 Unit	24.000.000	APBD Kota : 24.000.000	-	1 Unit	24.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Kota Ma diun	1 Unit	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	-	1 Unit	50.000.000	Dinas Perhubungan
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Gedung kantoir	Kota Ma diun	1 Gedung	7.000.000	APBD Kota : 7.000.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	7.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan kantor yang bersih dan nyaman	Kota Ma diun	1 Unit	5.000.000	APBD Kota : 5.000.000	Lanjutan	1 Unit	6.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung yang Dipelihara	Kota Ma diun	1 Unit	35.000.000	APBD Kota : 35.000.000	Rutin	1 Unit	45.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Kota Ma diun	2 paket	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Perawatan 2 Paket Unit Bangunan	2 paket	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Kota Ma diun	1 Gedung	26.500.000	APBD Kota : 26.500.000	Dinas Pasar Kota Madiun	1 Gedung	29.150.000	Dinas Perdagangan
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Kota Ma diun	1 paket	2.000.000	APBD Kota : 2.000.000	-	1 paket	2.519.400	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung	Kota Ma diun	1 Unit	2.000.000	APBD Kota : 2.000.000	jumlah gedung	1 Unit	2.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	Kota Ma diun	1 Unit	2.000.000	APBD Kota : 2.000.000	1 unit gedung bagian administrasi pembangunan	1 Unit	2.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Kota Ma diun	1 Gedung	2.464.000	APBD Kota : 2.464.000	Rutin	1 Gedung	2.710.400	Bagian Hukum sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Kota Ma diun	2 Unit	224.992.000	APBD Kota : 224.992.000	Bagian Umum dan Quest House	2 Unit	242.684.449	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Kota Ma diun	1 Unit	2.000.000	APBD Kota : 2.000.000		1 Unit	2.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	Kota Ma diun	2 Unit	153.087.000	APBD Kota : 153.087.000	Kegiatan ini dipergunakan Belanja Jasa kebersihan dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2 Unit	153.087.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	Kota Ma diun	1 paket	2.000.000	APBD Kota : 2.000.000	Rutin	1 paket	5.000.000	Inspektorat
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung	Kota Ma diun	1 Gedung	12.500.000	APBD Kota : 12.500.000	-	1 Gedung	15.000.000	Badan Kepegawaian Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	Kota Ma diun	1 Gedung	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000		1 Gedung	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Perbaikan gedung kantor	Kota Ma diun	1 Unit	8.063.000	APBD Kota : 8.063.000	Perbaikan kantor	1 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Kota Ma diun	1 Gedung	13.000.000	APBD Kota : 13.000.000	Rutin	1 Gedung	13.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Kota Ma diun	1 Gedung	10.000.000	APBD Kota : 10.000.000	Kecamatan Kartoharjo	1 Gedung	11.000.000	Kecamatan Kartoharjo
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Kota Ma diun	1 Gedung	234.573.000	APBD Kota : 234.573.000	Kecamatan Manguharjo	1 Gedung	258.030.000	Kecamatan Manguharjo
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Kota Ma diun	1 Gedung	15.000.000	APBD Kota : 15.000.000	-	1 Gedung	15.000.000	Kecamatan Taman
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/ bangunan yang terpelihara	Kota Ma diun	1 Gedung	14.400.000	APBD Kota : 14.400.000	rutin	1 Gedung	15.840.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Unit	Kota Ma diun	162 Unit	83.230.000	APBD Kota : 83.230.000	9 unit mobil dan 153 sepeda motor	123 Unit	80.000.000	Dinas Pendidikan
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh biaya pemeliharaan	Kota Ma diun	129 Unit	189.240.000	APBD Kota : 189.240.000	24 unit kendaraan roda 4 dan 105 unit kendaraan roda 2	129 Unit	254.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Ma diun	43 Unit	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	-	43 Unit	215.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Ma diun	4 kendaraan dinas	53.350.000	APBD Kota : 53.350.000	4 kendaraan dinas (1 mobil dinas, 1 mobil laboratorium, 2 sepeda motor gerobak)	4 kendaraan dinas	58.685.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	Kota Ma diun	24 Unit	195.000.000	APBD Kota : 195.000.000	-	24 Unit	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kota Ma diun	10 Unit	519.500.000	APBD Kota : 519.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	13 Unit	675.250.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kota Ma diun	22 Unit	134.899.000	APBD Kota : 134.899.000	Rutin	22 Unit	134.899.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan operasional	Kota Ma diun	5 Jenis	81.657.000	APBD Kota : 81.657.000		5 Jenis	0	Dinas Tenaga Kerja
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah mobil dinas	Kota Ma diun	3 Unit	85.000.000	APBD Kota : 85.000.000	rutin	3 Unit	90.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Ma diun	55 Unit	2.415.330.000	APBD Kota : 2.415.330.000	55 unit (Service, S ucad, BBM ,Pelumas, STNK kendaraan dinas operasional)	62 Unit	2.685.330.000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Ma diun	24 Unit	120.836.000	APBD Kota : 120.836.000	- 2 Roda Empat dan 20 Roda 2	24 Unit	120.836.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Ma diun	8 Unit	105.000.000	APBD Kota : 105.000.000	-	8 Unit	105.000.000	Dinas Perhubungan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Pemeliharaan kendaraan dinas	Kota Ma diun	6 Kendaraan	51.200.000	APBD Kota : 51.200.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	51.200.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang aman dan nyaman	Kota Ma diun	8 Unit	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	Lanjutan	8 Unit	35.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	Kota Ma diun	27 Unit	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	Rutin	28 Unit	90.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan yg Dipelihara	Kota Ma diun	15 Unit	70.000.000	APBD Kota : 70.000.000	Pemeliharaan 4 Mobil dan 11 kendaraan Roda 2	15 Unit	70.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas dalam kondisi baik	Kota Ma diun	36 Unit	460.000.000	APBD Kota : 460.000.000	Kegiatan Rutin tahun 2017	36 Unit	506.000.000	Dinas Perdagangan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	Kota Ma diun	7 Unit	22.050.000	APBD Kota : 22.050.000	-	7 Unit	23.712.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas	Kota Ma diun	1 Unit	18.674.000	APBD Kota : 18.674.000	jumlah kendaraan dinas	1 Unit	18.674.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kota Ma diun	1 Unit	20.992.000	APBD Kota : 20.992.000	1 unti kendaraan dinas roda 4	1 Unit	20.992.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Ma diun	1 Unit	19.121.300	APBD Kota : 19.121.300	Rutin	1 Unit	21.033.400	Bagian Hukum sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Ma diun	34 Unit	1.439.675.505	APBD Kota : 1.439.675.505	Servis, Suku Cadang, Bahan Bakar/ Pelumas, Klir, STNK	34 Unit	1.538.374.085	Bagian Umum Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas	Kota Ma diun	1 buah	21.842.000	APBD Kota : 21.842.000	1 buah mobil, 3 kendaraan roda 2.	1 buah	21.842.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang dirawat	Kota Ma diun	20 Unit	331.572.000	APBD Kota : 331.572.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk belanja barang/jasa pemeliharaan kendaraan dinas	20 Unit	331.572.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kota Ma diun	27 Unit.	24.892.000	APBD Kota : 24.892.000	Rutin	27 Unit	27.500.000	Inspektorat
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan	Kota Ma diun	20 Unit	40.000.000	APBD Kota : 40.000.000	-	20 Unit	45.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kota Ma diun	38 kendaraan dinas	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000	-	38 kendaraan	55.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas yang diperbaiki	Kota Ma diun	41 Unit	55.625.000	APBD Kota : 55.625.000	2 Mobil 39 Sepeda motor	41 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Ma diun	28 Unit.	35.000.000	APBD Kota : 35.000.000	Rutin	28 Unit	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Ma diun	52 Unit	32.682.000	APBD Kota : 32.682.000	Kecamatan Karto harjo	52 Unit	32.682.000	Kecamatan Kartoharjo
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Ma diun	2 Unit	166.500.000	APBD Kota : 166.500.000	Kecamatan mangu harjo	2 Unit	166.500.000	Kecamatan Manguharjo
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Ma diun	51 Unit	58.304.000	APBD Kota : 58.304.000	-	51 Unit	58.304.000	Kecamatan Taman
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kota Ma diun	23 Unit	31.632.000	APBD Kota : 31.632.000	rutin	23 Unit	34.795.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Lembaga	Kota Ma diun	4 lembaga	168.900.000	APBD Kota : 168.900.000	1 Dinas dan 3 UPTD	4 lembaga	141.230.000	Dinas Pendidikan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang mendapatkan biaya pemeliharaan	Kota Ma diun	4 Jenis	69.700.000	APBD Kota : 69.700.000	30 unit AC, 17 buah mesin ketik, 47 unit komputer dan 55 buah printer	4 Jenis	89.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Ma diun	6 Unit	900.000.000	APBD Kota : 900.000.000	-	6 Unit	950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang rutin di maintain	Kota Ma diun	45 Unit	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000	Biaya perawatan sarana dan prasarana kantor	45 Unit	30.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Ma diun	6 Jenis	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000	-	6 Jenis	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor yang dipelihara	Kota Ma diun	7 Unit	20.800.000	APBD Kota : 20.800.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor	7 Unit	20.800.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Kota Ma diun	5 paket	82.050.000	APBD Kota : 82.050.000	Rutin	5 paket	82.050.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor	Kota Ma diun	1 kegiatan	27.108.000	APBD Kota : 27.108.000	Pemeliharaan AC, Komputer, Mesin Ketik, PABX	1 kegiatan	0	Dinas Tenaga Kerja
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor	Kota Ma diun	66 Unit	42.200.000	APBD Kota : 42.200.000	rutin	43 Unit	42.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Ma diun	70 Unit	270.500.000	APBD Kota : 270.500.000	70 unit (Pemeliharaan dan BBM Diesel Tangki Air, Mesin Potong Rumpuk dan Gergaji Chainsaw, Serta peralatan kerja)	76 Unit	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana	Kota Ma diun	5 Jenis	62.630.000	APBD Kota : 62.630.000	-	5 Jenis	62.630.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Ma diun	23 Unit	40.000.000	APBD Kota : 40.000.000	-	23 Unit	40.000.000	Dinas Perhubungan
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Pemeliharaan sapsras	Kota Ma diun	8 kali	10.000.000	APBD Kota : 10.000.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis sarana kantor yang memadai	Kota Ma diun	3 Jenis	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000	Lanjutan	3 Jenis	60.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	% Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik	Kota Ma diun	85%	45.000.000	APBD Kota : 45.000.000	Rutin	85%	60.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana yg dipelihara	Kota Ma diun	68 buah	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Layak Pakai	68 buah	32.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Kota Ma diun	44 Unit	51.000.000	APBD Kota : 51.000.000	Kegiatan Rutin	44 Unit.	56.100.000	Dinas Perdagangan
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Ma diun	6 Jenis	45.500.000	APBD Kota : 45.500.000	-	6 Jenis	51.774.200	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Ma diun	3 buah	8.300.000	APBD Kota : 8.300.000	jumlah sarana dan prasarana kantor	3 buah	8.300.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah/ jenis sarana prasarana kantor	Kota Ma diun	30 Unit	17.000.000	APBD Kota : 17.000.000	30 unit sarana dan prasarana kantor	30 Unit	17.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Ma diun	24 Unit	16.962.000	APBD Kota : 16.962.000	Rutin	24 Unit	18.658.200	Bagian Hukum sekretariat Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Ma diun	3 Jenis	80.700.000	APBD Kota : 80.700.000	Pemeliharaan alat Perkantoran, Mesin, PABX dan Sound System	3 Jenis	86.610.540	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Ma diun	2 buah	9.200.000	APBD Kota : 9.200.000	2 mesin ketik, 5 AC, 5 Komputer, 5 printer	2 buah	9.200.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Kota Ma diun	9 Jenis	151.610.000	APBD Kota : 151.610.000	Kegiatan dipergunakan untuk belanja barang/ jasa pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	10 Jenis	151.610.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Kota Ma diun	6 Jenis	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	Rutin	6 Jenis	35.000.000	Inspektorat
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	jenis barang	Kota Ma diun	10 Jenis	35.000.000	APBD Kota : 35.000.000	-	10 Jenis	35.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kota Ma diun	8 Jenis	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000		8 Jenis	55.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Perbaikan sarana prasarana kantor	Kota Ma diun	5 Macam	37.152.000	APBD Kota : 37.152.000	Mesin Ketik, Porporasi, Komputer, AC, Sound system	5 Jenis	0	Badan Pendapatan Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sapras kantor yang layak pakai	Kota Ma diun	1 paket	65.000.000	APBD Kota : 65.000.000	Rutin	1	65.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Ma diun	1 paket	31.840.000	APBD Kota : 31.840.000	Kecamatan Karto harjo	1 paket	35.024.000	Kecamatan Kartoharjo
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	Kota Ma diun	1 paket	45.300.000	APBD Kota : 45.300.000	Kecamatan mangu harjo	1 paket	49.830.000	Kecamatan Manguharjo
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Ma diun	1 paket	28.500.000	APBD Kota : 28.500.000	-	1 paket	28.500.000	Kecamatan Taman
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kota Ma diun	7 Jenis	32.280.000	APBD Kota : 32.280.000	Bakes bangpol	7 Jenis	35.508.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	4	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas	Kota Ma diun	4 paket	1.251.580.000	APBD Kota : 1.251.580.000	RD Walikota, RD Wakil Walikota, RD Sekda, wisma Surabaya	4	1.334.885.922	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	4	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dikelola	Kota Ma diun	1 Unit	368.572.000	APBD Kota : 368.572.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang/ jasa dalam rangka pengelolaan rumah dinas Ketua DPRD	1 Unit	368.572.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	5	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Diklat	jumlah gedung	Kota Ma diun	1 Gedung	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	-	1 Gedung	100.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	1	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	1.654.350.000	APBD Kota : 1.654.350.000			
	1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	8 Dokumen	115.000.000	APBD Kota : 115.000.000	-	8 Dokumen	121.551.000	Dinas Pendidikan
	1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	Kota Ma diun	11 Dokumen	255.722.000	APBD Kota : 255.722.000	-	11 Dokumen	255.722.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Kota Ma diun	12 Dokumen	40.225.000	APBD Kota : 40.225.000	-	12 Dokumen	44.247.500	Rumah Sakit Umum Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	10 Dokumen	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	Kota Madiun	10 Dokumen	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	Kota Madiun	10 Dokumen	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000	Laporan rutin triwulan dan tahunan : LKPJ, LPPD, ILPPD, EKPPD, LAKIP, RENJA, RKT, PK, RFK, dan LK	10 Dokumen	20.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pelaporan	Kota Madiun	5 Dokumen	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000	-	5 Dokumen	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan yang disusun	Kota Madiun	7 Dokumen	40.000.000	APBD Kota : 40.000.000	Kegiatan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Dokumen	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang harus dipenuhi	Kota Madiun	7 Dokumen	49.500.000	APBD Kota : 49.500.000	Rutin	5 paket	49.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Kota Madiun	6 Dokumen	60.960.000	APBD Kota : 60.960.000	Dokumen dan capaian kinerja	6 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	10 Dokumen	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	rutin	10 Dokumen	52.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen	Kota Madiun	8 Dokumen	39.304.000	APBD Kota : 39.304.000	Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8 Dokumen	39.304.000	Dinas Lingkungan Hidup
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Madiun	5 Dokumen	32.000.000	APBD Kota : 32.000.000	-	5 Dokumen	35.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Madiun	9 Dokumen	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	-	9 Dokumen	30.000.000	Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terbentuknya dokumen	Kota Ma diun	10 kali	16.500.000	APBD Kota : 16.500.000	bagian Humas dan Protokol	100%	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	Kota Ma diun	10 Dokumen	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	Lanjutan	10 Dokumen	36.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Ma diun	5 Dokumen	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Rutin	5 Dokumen	75.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	5 Dokumen	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000	Renja, RKT&PK, Sakip dan RKA&DPA	5 Dokumen	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Kegiatan Rutin tahun 2017	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Perdagangan
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	5 Dokumen	15.000.000	APBD Kota : 15.000.000	-	5 Dokumen	18.895.680	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen	Kota Ma diun	5 Dokumen	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000	jumlah dokumen	5 Dokumen	25.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	5 Dokumen	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000	5 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	5 Dokumen	25.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	5 Dokumen	17.250.000	APBD Kota : 17.250.000	Rutin	5 Dokumen	19.837.500	Bagian Hukum sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	5 Dokumen	18.125.000	APBD Kota : 18.125.000	Renja, RKT, PK, LKJ, RKA/DPA	5 Dokumen	18.895.680	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	5 Dokumen	15.000.000	APBD Kota : 15.000.000		5 Dokumen	15.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	Kota Ma diun	7 Dokumen	11.664.000	APBD Kota : 11.664.000		8 Dokumen	12.597.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Kota Ma diun	10 Dokumen	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000	Rutin	10 Dokumen	22.000.000	Inspektorat

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jenis dokumen	Kota Ma diun	7 Dokumen	27.500.000	APBD Kota : 27.500.000	-	7 Dokumen	27.500.000	Badan Kepegawaian Daerah
			1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	7 Dokumen	35.000.000	APBD Kota : 35.000.000		7 Dokumen	35.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan dokumen SKPD	Kota Ma diun	12 Dokumen	17.500.000	APBD Kota : 17.500.000	Dokumen SKPD	7 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah
			1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Ma diun	9 Dokumen	40.000.000	APBD Kota : 40.000.000	Rutin	1 Dokumen	40.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	5 Dokumen	32.500.000	APBD Kota : 32.500.000	Kecamatan Karto harjo	5 Dokumen	35.000.000	Kecamatan Kartoharjo
			1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	6 Dokumen	32.500.000	APBD Kota : 32.500.000	Kecamatan mangu harjo	6 Dokumen	35.000.000	Kecamatan Manguharjo
			1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	5 Dokumen	32.500.000	APBD Kota : 32.500.000	-	5 Dokumen	32.500.000	Kecamatan Taman
			1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	Kota Ma diun	5 Jenis	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000	Bakes bangpol	5 Jenis	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Penyusunan Buku Profil dan Monografi Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	2 Dokumen	70.000.000	APBD Kota : 70.000.000	Kecamatan Karto harjo	2 Dokumen	75.000.000	Kecamatan Kartoharjo
			2	Penyusunan Buku Profil dan Monografi Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	2 Dokumen	70.200.000	APBD Kota : 70.200.000	Kecamatan mangu harjo	2 Dokumen	75.000.000	Kecamatan Manguharjo
			2	Penyusunan Buku Profil dan Monografi Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	2 Dokumen	65.150.000	APBD Kota : 65.150.000	-	2 Dokumen	65.150.000	Kecamatan Taman
			3	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	Kecamatan Karto harjo	1 Dokumen	35.000.000	Kecamatan Kartoharjo
			3	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	30.100.000	APBD Kota : 30.100.000	Kecamatan mangu harjo	1 Dokumen	35.000.000	Kecamatan Manguharjo
			3	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	25.150.000	APBD Kota : 25.150.000	-	1 Dokumen	25.150.000	Kecamatan Taman
0	1	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Ma diun	100%	19.692.004.000	APBD Kota : 19.692.004.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Paket	Kota Ma diun	1 paket	911.400.000	APBD Kota : 911.400.000	anggaran 200 Jt masuk dinas kebudayaan	35 paket	1.111.400.000	Dinas Pendidikan
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan prasarana kantor yang diadakan	Kota Ma diun	1 paket	1.434.600.000	APBD Kota : 1.434.600.000	Pengadaan sarana prasarana di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Perbekalan Kesehatan	1 paket	1.434.600.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 Kegiatan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Ma diun	1 Paket	550.000.000	APBD Kota : 550.000.000	BLUD	1 Paket	605.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Alat Berat	Kota Ma diun	3 Unit	5.510.000.000	APBD Kota : 5.510.000.000	-	1 Unit	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor yang diadakan	Kota Ma diun	1 paket	87.500.000	APBD Kota : 87.500.000	Kegiatan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 paket	94.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Ma diun	1 paket	198.000.000	APBD Kota : 198.000.000		1 paket	198.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana prasarana kantor	Kota Ma diun	37 Unit	237.500.000	APBD Kota : 237.500.000	Rutin/ tahunan (4 laptop, 6 alat damkar, 5 filling cabinet 5 laci, 5 filling cabinet 4 laci, 2 lemari besi, 4 printer, 2 tivi, 4 lemari arsip kaca, 1 layar lcd otomatis, 1 kamera, 3 sepeda motor)	25 unit	75.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Ma diun	214 Unit	157.000.000	APBD Kota : 157.000.000	6 unit (komputer PC) dan 207 unit (Meja+ Kursi + Mimbar ruang rapat)	14 Unit	110.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana	Kota Ma diun	4 Jenis	1.250.000.000	APBD Kota : 1.250.000.000	-	4 Jenis	1.250.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Ma diun	17 Jenis	417.000.000	APBD Kota : 417.000.000	-	17 Jenis	138.000.000	Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan Prasarana	Kota Ma diun	1 paket	106.900.000	APBD Kota : 106.900.000	Bagian Humas dan Protokol	100%	106.900.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	Kota Ma diun	2 Jenis	97.000.000	APBD Kota : 97.000.000	Lanjutan	3 Jenis	180.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kota Ma diun	7 Jenis	300.000.000	APBD Kota : 100.000.000	tambahan untuk sarpras kesenian	7 Jenis	125.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Paket	Kota Ma diun	1 paket	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	1 paket	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana	Kota Ma diun	1 Jenis	25.575.000	APBD Kota : 25.575.000	-	1 paket	450.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah/ jenis sarana prasarana kantor	Kota Ma diun	217 Unit	30.000.000	APBD Kota : 30.000.000	217 unit peralatan dan perlengkapan kantor	217 Unit	30.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Ma diun	3 paket	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Modal Alat Angkutan, Modal Alat Kantor/ Rumah Tangga, Modal Komputer	1	50.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibeli	Kota Ma diun	9 Jenis	265.063.000	APBD Kota : 265.063.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10 Jenis	265.063.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana yang dipenuhi	Kota Ma diun	2 Jenis	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Rutin	2 Jenis	100.000.000	Inspektorat
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Kota Ma diun	3 Jenis	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000		3 Jenis	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	Kota Ma diun	1 paket	195.000.000	APBD Kota : 195.000.000		1 paket	0	Badan Pendapatan Daerah
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah paket peralatan	Kota Ma diun	1 paket	228.357.000	APBD Kota : 228.357.000	Rutin	1 paket	33.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Ma diun	2 paket	400.000.000	APBD Kota : 400.000.000	Kecamatan Kartoharjo	2 paket	400.000.000	Kecamatan Kartoharjo
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	Kota Ma diun	1 paket	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Kecamatan manguharjo	1 paket	200.000.000	Kecamatan Manguharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Ma diun	1 paket	207.500.000	APBD Kota : 207.500.000	-	1 paket	200.000.000	Kecamatan Taman
	2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakalan Dinas Beserta Kelengkapannya	Kota Ma diun	73 orang	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	120 orang	170.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah orang	Kota Ma diun	223 orang	82.600.000	APBD Kota : 82.600.000	223 orang (Pengadaan pakaian kerja lapangan/ wearpack /katelpak dan sepatu boot karet untuk petugas lapangan DKP + Projasih + Protasih)	223 orang	82.600.000	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Ma diun	600 buah	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	-	600 buah	80.000.000	Dinas Perhubungan
	2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Ma diun	110 orang	63.600.000	APBD Kota : 63.600.000	Kegiatan Rutin tahun 2017	110 orang	70.000.000	Dinas Perdagangan
	2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Ma diun	5850 karyawan	3.928.949.000	APBD Kota : 3.928.949.000	PDH, Batik Tradisional	5850 karyawan	3.582.577.332	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD	Kota Ma diun	4 Jenis	245.460.000	APBD Kota : 245.460.000	Kegiatan ini dipergunakan untuk pengadaan Pakaian dinas DPRD	4 Jenis	245.460.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4 Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Kota Ma diun	1 Gedung	450.000.000	APBD Kota : 450.000.000	Tahunan	1 Gedung	450.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4 Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Rehab sarana dan prasarana aparatur	Kota Ma diun	1 kegiatan	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	rehab gedung/ bangunan	1 kegiatan	0	Dinas Tenaga Kerja
	4 Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah lokasi gedung/bangunan	Kota Ma diun	2 lokasi	393.000.000	APBD Kota : 393.000.000	rutin	1 lokasi	190.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	4 Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Kota Ma diun	1 Unit	500.000.000	APBD Kota : 500.000.000	-	1 Unit	500.000.000	Dinas Perhubungan
	4 Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang layak huni	Kota Ma diun	1 Unit	190.000.000	APBD Kota : 190.000.000	Lanjutan	1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Kota Ma diun	1 paket	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000		1	200.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
PAGU PRIORITAS PERTAMA PEMBANGUNAN DAERAH								180.243.869.905					

Tabel 5. 6
Prioritas 6 : Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	URUSAN Pemerintahan WAJIB PELAYANAN DASAR														
1	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			332.529.827.000										
1	3	1	1	0	5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik	89,5	124.740.174.000	APBD Kota : 124.740.174.000					
		1				Kegiatan Pembangunan Jalan Inspeksi	Panjang jalan yang dibangun	Kota Ma diun	6 km	1.875.000.000	APBD Kota : 1.875.000.000	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2				Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen DED	Kota Ma diun	2 buah	1.150.000.000	APBD Kota : 1.150.000.000	-	2 buah	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3				Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang jalan yng dibangun	Kota Ma diun	6.674 km	31.302.000.000	APBD Kota : 31.302.000.000	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		4				Kegiatan Survey dan Pengukuran.	Tersedianya dokumen usulan kegiatan	Kota Ma diun	1 Dokumen	15.000.000	APBD Kota : 15.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5				Kegiatan Pembangunan Jalan.	Jumlah lokasi	Kota Ma diun	6 lokasi	2.745.573.000	APBD Kota : 2.745.573.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6				Kegiatan Pembangunan Jembatan.	Jumlah jembatan yang dikerjakan	Kota Ma diun	1 lokasi	46.087.500.000	APBD Kota : 46.087.500.000	Baru	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7				Kegiatan Peningkatan Jalan	Jumlah jalan yang dibangun	Kota Ma diun	5 lokasi	23.073.000.000	APBD Kota : 23.073.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8				Kegiatan Peningkatan Jembatan.	Jumlah jembatan	Kota Ma diun	8 lokasi	5.500.000.000	APBD Kota : 5.500.000.000	Baru	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9				Kegiatan Pembangunan Pedestrian Jalan.	Jumlah lokasi	Kota Ma diun	8 lokasi	4.477.101.000	APBD Kota : 4.477.101.000	Baru	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1				Kegiatan Pembangunan Pelengkap jalan.	Jumlah lokasi yang dibangun	Kota Ma diun	1 lokasi	8.145.000.000	APBD Kota : 8.145.000.000	Jalan Bogo wonto	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1				Kegiatan Monitoring Teknis	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	Kegiatan Inspeksi Jalan	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3	Kegiatan Inspeksi Jembatan	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	15.000.000	APBD Kota : 15.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4	Kegiatan Pemutakiran Data Jalan dan Jembatan	Jumlah sistem	Kota Ma diun	1 Unit	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Baru	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	70.000.000	APBD Kota : 70.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik		372.000 km	30.890.000.000	APBD Kota : 30.890.000.000				
		1	Kegiatan Survey dan Pengukuran	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	15.000.000	APBD Kota : 15.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I	Jumlah lokasi	Kota Ma diun	11 lokasi	8.100.000.000	APBD Kota : 8.100.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II	Jumlah lokasi	Kota Ma diun	25 lokasi	7.400.000.000	APBD Kota : 7.400.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III	Jumlah lokasi	Kota Ma diun	28 lokasi	6.500.000.000	APBD Kota : 6.500.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IV	Jumlah lokasi	Kota Ma diun	20 lokasi	7.500.000.000	APBD Kota : 7.500.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Taman	Jumlah lokasi	Kota Ma diun	1 lokasi	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Manguharjo	Jumlah lokasi	Kota Ma diun	1 lokasi	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kartoharjo	Jumlah lokasi	Kota Ma diun	1 lokasi	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9	Kegiatan Pemeliharaan jalan Ring Road.	Jumlah lokasi	Kota Ma diun	1 lokasi	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	Baru	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		10	Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan	Kota Ma diun	1 lokasi	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Baru	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		11	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah paket pekerjaan	Kota Ma diun	1 paket	65.000.000	APBD Kota : 65.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				1 2	Kegiatan Bimbingan Teknis Kebinamargaan	Jumlah bimtek	Kota Ma diun	1 kali	105.000.000	APBD Kota : 105.000.000	Baru	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				1 3	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2	0 3 0 1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal yang terlayani instalasi air limbah RT		30%	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000				
				1	Kegiatan BOP Pembangunan IPLT.	Tersedianya operasional pembangunan IPLT	Kota Ma diun	1 paket	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Baru	1	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2	0 3 0 1	Program Pembangunan Saluran/Drainase /Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat		73%	19.003.000.000	APBD Kota : 19.003.000.000				
				1	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah daerah bebas banjir	Kota Ma diun	13 paket	8.200.000.000	APBD Kota : 8.200.000.000	-	13	9.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Madiun	Jumlah daerah bebas banjir	Kota Ma diun	2 paket	10.000.000.000	APBD Kota : 10.000.000.000	-	19 lokasi	12.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Jumlah daerah bebas banjir	Kota Ma diun	3 Kecamatan	750.000.000	APBD Kota : 750.000.000	-	3 Kecamatan	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	53.000.000	APBD Kota : 53.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2	0 3 0 1	Program Pengendalian Banjir	Persentase Kawasan Bebas Banjir		100%	20.630.000.000	APBD Kota : 20.630.000.000				
				1	Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu Air	Persentase berfungsi nya mesin pompa pengendali banjir	Kota Ma diun	90%	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	90%	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2	Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	Jumlah infrastruktur pendukung pompa pengendali banjir	Kota Ma diun	1 Unit	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				3	Kegiatan DED Pembangunan Daerah Tangkapan Air Pengendali Banjir Sumber Umis	Dokumen DED	Kota Ma diun	1 Dokumen	195.000.000	APBD Kota : 195.000.000	Baru	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4	Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai.	Jumlah daerah bebas banjir	Kota Ma diun	5 paket	20.000.000.000	APBD Kota : 20.000.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1 3	Pembangunan Gedung Laundry Rumah Sakit	Jumlah gedung laundry rumah sakit yang dibangun	Kota Ma diun	1 Unit	2.470.150.000	APBD Kota : 2.470.150.000	BLUD	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1 4	Kegiatan Pembangunan Paviliun Rumah Sakit	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan paviliun rumah sakit yang disusun dan jumlah lahan pembangunan paviliun rumah sakit yang diurug dan dipadatkan	Kota Ma diun	1 dokumen dan 1,6 Hektar	5.487.243.000	APBD Kota : 5.487.243.000	DED (Dokumen Perencanaan Pembangunan Paviliun Rumah Sakit) serta Pengurugan dan Pematatan Lahan	1 Gedung	52.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1 5	Rehabilitasi Puskesmas Manguharjo	Jumlah paket rehab puskesmas yang di laksanakan	Kota Ma diun	1 paket	5.895.339.000	APBD Kota : 5.895.339.000		1 paket	5.895.339.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1 6	Kegiatan Pembangunan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (revitalisasi Pasar)	Jumlah Pasar yang dikembangkan	Kota Ma diun	3 Pasar	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	Kegiatan Prioritas	3 Pasar	15.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1 7	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Kebakaran (Garasi Damkar Satpol PP)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana / korban bencana	Kota Ma diun	1 paket	1.495.000.000	APBD Kota : 1.495.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman Bencana / Korban Bencana	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1 8	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kota Ma diun	1 Dokumen	580.072.000	APBD Kota : 580.072.000	DED (Dokumen Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan)	1 gedung	15.398.770.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1 2 0 3 0 1	2 6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW		100%	1.540.000.000	APBD Kota : 1.540.000.000			
		1	Kegiatan Pendataan IMB	Jumlah data bangunan yang belum ber IMB	Kota Ma diun	2 Kecamatan	700.000.000	APBD Kota : 700.000.000	-	2 Kecamatan	710.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Kegiatan Sosialisasi Konsolidasi Tanah	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsolidasi	Kota Ma diun	2 lokasi	90.000.000	APBD Kota : 90.000.000	-	2 lokasi	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW yg diperdakan	Kota Ma diun	100%	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	-	100%	210.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Persentase Surat Teguran yg diterbitkan	Kota Ma diun	100%	350.000.000	APBD Kota : 350.000.000	-	100%	360.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	5	Kegiatan Survey dan Pemetaan	Jumlah Dokumen SKRK	Kota Ma diun	50 Dokumen	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	Baru	50 Dokumen	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	6	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Ma diun	250 peserta	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			44.781.767.000						
1	4	1 0 3 0 1	1 6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio rumah layak huni	98,45%	4.785.000.000	APBD Kota : 4.785.000.000				
	1		Kegiatan Pematangan Lahan Rusunawa	Pengurusan lahan rusunawa	Kota Ma diun	1 paket	1.000.000.000	APBD Kota : 1.000.000.000	Kota Madiun	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2		Kegiatan BOP RTLH	Tersedianya dana Operasional RTLH	Kota Ma diun	1 paket	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000		1 paket	75.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3		Kegiatan BOP Sanitasi Lingkungan	Tersedianya BOP Sanitasi Lingkungan	Kota Ma diun	1 paket	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	-	1 paket	65.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4		Kegiatan Pembangunan IPAL Komunal (DAK)	Jumlah Paket Pekerjaan	Kota Ma diun	3 Unit	1.500.000.000	APBD Kota : 1.500.000.000		0 Unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	5		Kegiatan Sanitasi Lingkungan.	Terwujudnya perumahan yang sehat	Kota Ma diun	1 paket	2.000.000.000	APBD Kota : 2.000.000.000	Baru	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	6		Kegiatan Sosialisasi Pembangunan MCK dan Penyusunan PEDUM, JUKLAK PMDPK	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Ma diun	300 peserta	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300 peserta	150.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	5	1 0 8 0 1	1 7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luasan RTH yang dipelihara	14,5 ha	39.996.767.000	APBD Kota : 39.996.767.000				
	1		Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun	jumlah lokasi	Kota Ma diun	1 lokasi	105.000.000	APBD Kota : 105.000.000	Pengadaan bahan baku pengecatan, pengadaan tanaman hias untuk penyulaman	1 lokasi	125.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2		Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJU	jumlah titik	Kota Ma diun	335 Titik	2.226.000.000	APBD Kota : 2.226.000.000	Pemasangan jaringan PJU di 3 Kecamatan	100 Titik	660.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3		Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran	jumlah lokasi	Kota Ma diun	1 lokasi	105.000.000	APBD Kota : 105.000.000	Pengadaan bahan bangunan untuk pengecatan/rehabilitasi, pengadaan tanaman hias untuk penyulaman	1 lokasi	125.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi	jumlah lampu hemat energi	Kota Ma diun	66 buah	480.000.000	APBD Kota : 480.000.000	Pemasangan lampu hemat energi	66 buah	503.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	5 Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau	jumlah lokasi	Kota Ma diun	4 lokasi	175.000.000	APBD Kota : 175.000.000		4 lokasi	190.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	6 Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman	jumlah lokasi	Kota Ma diun	6 lokasi	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	6 lokasi lampu taman (Alun2, Bantaran, Gulun, Pilangban go, Winongo, Kanigoro)	6 lokasi	150.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	7 Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota	jumlah lokasi	Kota Ma diun	7 lokasi	23.654.992.000	APBD Kota : 23.654.992.000	1. Pembuatan taman perumahan Jl. Banda (1 lokasi) 2. Pembuatan RTH Jl. Lori (1 lokasi) 3. Pengadaan pot hias besar (220 buah) 4. Pembuatan RTH Kel. Mojorejo Bumi Mas II (1 lokasi) 5. Perbaikan taman Jl. Adi Suctpto (1 lokasi) 6. Pembuatan RTH	7 lokasi	24.243.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	8 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pertamanan dan PJU	jumlah kendaraan operasional	Kota Ma diun	1 Unit	193.775.000	APBD Kota : 193.775.000	1 unit kendaraan pertama (Pick Up L-300)	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	9 Kegiatan Penyusunan Raperda Pengelolaan RTH	Jumlah Dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000		1 Dokumen	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	10 Kegiatan Sosialisasi Pertamanan, PJU, Pemakaman	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	Kota Ma diun	3 Jenis	705.000.000	APBD Kota : 705.000.000		3 Jenis	705.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	11 Kegiatan Program Taman Bersih (Protasih).	Jumlah Pekerja	Kota Ma diun	55 orang	1.070.000.000	APBD Kota : 1.070.000.000		55 orang	1.070.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	12 Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau Jalan/Median Jalan..	Tanaman yang dirawat	Kota Ma diun	3 Jenis	229.000.000	APBD Kota : 229.000.000		3 Jenis	229.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	13 Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pemeliharaan lampu	Kota Ma diun	4017 Titik	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000		0 Titik	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	14 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	Pemeliharaan TMP	Kota Ma diun	1 kegiatan	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	pemeliharaan TMP	1 kegiatan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 5	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.	Jumlah Lokasi Pemakaman	Kota Madiun	8 lokasi	3.568.000.000	APBD Kota : 3.568.000.000		8 lokasi	3.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1 6	Kegiatan Pengadaan Tanah Makam.	Jumlah Lokasi Pemakaman	Kota Madiun	1 lokasi	1.400.000.000	APBD Kota : 1.400.000.000	Perluasan tanah makam Jl. Apotik Hidup, Kelurahan Ngegong	3 lokasi	600.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1 7	Kegiatan pemeliharaan makam Pace Keras	Jumlah Lokasi Pemakaman	Kota Madiun	1 lokasi	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000		1 lokasi	150.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1 8	Kegiatan Pemeliharaan Taman Hijau Bantaran Sungai Madiun	Jumlah lokasi pemeliharaan	Kota Madiun	1 lokasi	120.000.000	APBD Kota : 120.000.000	Pengadaan tanaman untuk penyulaman tanaman yang rusak /layu, pemeliharaan tanaman, pengecatan dan perbaikan fasilitas taman bantaran	1 lokasi	150.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1 9	Kegiatan Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota	luas areal kawasan hutan kota yang terpelihara	Kota Madiun	1,5 ha	200.000.000	APBD Kota : 200.000.000	rutin (perawatan dan pemeliharaan areal kawasan hutan kota)	2 ha	210.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2 0	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah pohon yang ditanam	Kota Madiun	800 batang	400.000.000	APBD Kota : 400.000.000	lanjutan (mendukung gerakan nasional 1 milyar pohon)	800 batang	440.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2 1	Kegiatan Pembangunan Kawasan Hutan Kota	Luas Kawasan Hutan Kota	Kota Madiun	1,5 ha	4.400.000.000	APBD Kota : 4.400.000.000	lanjutan (karena dalam pembangunan hutan kota tahun di 2016 ada beberapa hal yang belum bisa terlaksana karena ketersewaan yang ada ternyata belum mencukupi)	1 ha	4.840.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2 2	Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Perundangan Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan	Jumlah dokumen	Kota Ma diun	1 Dokumen	115.000.000	APBD Kota : 115.000.000	Baru (dokumen, dan diklat penatausahaan hasil hutan untuk 10 pelaku industri/ pejabat penatausahaan)	1 Dokumen	125.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	5	Lingkungan Hidup				9.617.850.000						
2	5	1 0 8 0 1	1 1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang ditangani	109.743 m ³	7.035.250.000	APBD Kota : 7.035.250.000				
		1	Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mematuhi aturan tentang pengelolaan limbah B3	Kota Ma diun	30 Perusahaan	38.000.000	APBD Kota : 38.000.000	Pendukung laporan LKPJ	35 Perusahaan	45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kota Ma diun	1 kali	70.000.000	APBD Kota : 70.000.000		0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Kegiatan Pemanfaatan Gas Methan di TPA Winongo	jumlah zona	Kota Ma diun	1 Zona	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Pengadaan bahan baku instalasi gas methan	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		4	Kegiatan Projasih	jumlah tenaga	Kota Ma diun	45 orang	918.000.000	APBD Kota : 918.000.000	tenaga pemeliharaan kebersihan jalan	45 orang	918.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		5	Kegiatan Peningkatan TPS	jumlah TPS yang direhab / dibangun	Kota Ma diun	11 lokasi	250.000.000	APBD Kota : 250.000.000	Rehabilitasi TPS	9 lokasi	186.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		6	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah	jumlah mesin pengolah sampah yang beroperasi	Kota Ma diun	9 Unit	125.650.000	APBD Kota : 125.650.000	BBM dan biaya pemeliharaan mesin pengolah sampah	9 Unit	125.650.000	Dinas Lingkungan Hidup
		7	Kegiatan Pemeliharaan Kontainer	jumlah container	Kota Ma diun	5 Unit	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	perbaikan 5 unit kontainer sampah	10 Unit	176.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		8	Kegiatan Controlled LandFill TPA Winongo	jumlah lokasi	Kota Ma diun	1 lokasi	1.550.000.000	APBD Kota : 1.550.000.000	BBM,dan biaya pemeliharaan excavator (dinas) untuk pengelolaan sampah TPA	1 lokasi	1.600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9	Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan	Kota Ma diun	1 paket	580.000.000	APBD Kota : 580.000.000	48 Unit (Kon tainer 8 Unit, Tempat Sampah Terpilah 40 Unit)	7 Unit	360.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			10	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan	Jumlah kendaraan operasional persampahan	Kota Ma diun	5 Unit	1.600.000.000	APBD Kota : 1.600.000.000	Pengada an pick up dump (3 unit), dan truk arm roll (2 unit)	2 Unit	1.112.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
			11	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Pengolahan Sampah	Jumlah peralatan kebersihan dan pengolahan sampah	Kota Ma diun	9 Jenis	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Pengad aan sapu, cikrak, garuk, dan alat kebersihan lainnya	9 Jenis	170.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			12	Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo	Jumlah lokasi	Kota Ma diun	1 lokasi	750.000.000	APBD Kota : 750.000.000	pembang unan garasi truk sampah	1 lokasi	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			13	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia dan layak pakai	Kota Ma diun	1 paket	230.000.000	APBD Kota : 230.000.000	Pengada an 53 unit tempat pemilah sampah sederhana	1 paket	690.305.000	Dinas Lingkungan Hidup
			14	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	Kota Ma diun	1 paket	648.600.000	APBD Kota : 648.600.000	Pengada an 150 unit gerobak sampah dan 50 unit kom poster	1 paket	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	5	1	1	0801	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian memenuhi passing grade yang ditetapkan Tim Penilai Adipura dan Persentase Pengendall an Pencemar an dan Perusakan Lingkungan		ya, 100%	530.000.000	APBD Kota : 530.000.000			
			15	Kegiatan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak dan Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa	Jumlah titik pengambilan sampling air, tanah dan udara	Kota Ma diun	45 Titik	80.000.000	APBD Kota : 80.000.000	Pendu kung laporan SPM dan LKPJ	45 Titik	85.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			16	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru	Jumlah kendaraan yang lulus uji emisi	Kota Ma diun	500 Kendaraan	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000	Pendu kung Program Wahana Tata Nugraha	500 Kendaraan	60.500.000	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		3	Kegiatan Peningkatan Hari Lingkungan Hidup	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peringatan hari lingkungan hidup	Kota Ma diun	100 orang	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	Lomba kebersihan lingkungan sekolah, penanaman pohon pelindung dan tanaman produktif	150 orang	82.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Laboratorium (DAK)	Jumlah peralatan dan bahan-bahan kimia laboratorium yang tersedia dan layak pakai	Kota Ma diun	45 Unit	320.000.000	APBD Kota : 320.000.000	Renovasi gedung lab. dan pengadaan peralatan lab.	55 Unit	165.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	5	1 0 8 0 2	1 8 0 2	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan	100%	1.222.600.000	APBD Kota : 1.222.600.000					
			1	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata	Kota Ma diun	10 sekolah	417.600.000	APBD Kota : 417.600.000	Dasar hukum : Permen LH Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata	10 sekolah	460.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			2	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah trophy	Kota Ma diun	1 Lomba	330.000.000	APBD Kota : 330.000.000	persiapan lapangan lomba Adipura	1 Lomba	378.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			3	Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat yang tertangani	Kota Ma diun	5 orang	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000	Pendukung laporan LKPJ	5 orang	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan penghargaan Kelurahan Berseri	Kota Ma diun	3 kelurahan	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Tindak lanjut surat dari Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 660/9579/207.4/2011 perihal Desa/Ke lurahan Bersih dan Lestari (Program Berseri)	3 ke lurahan	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			5	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Mengenai Izin Lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin lingkungan	Kota Ma diun	150 Perusahaan	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Dasar hukum : PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	150 Perusahaan	165.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	6	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang tersusun	Kota Madiun	2 Dokumen	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	Syarat administrasi legalitas instansi pemerintah dalam kepemilikan dokumen lingkungan hidup	2 Dokumen	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup							
	7	Kegiatan PROPER (Program Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan)	Jumlah perusahaan yang lulus proper	Kota Madiun	3 Perusahaan	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000	lomba kebersihan lingkungan sekolah, penanaman pohon pelindung dan tanaman produktif	3 Perusahaan	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup							
	8	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan saka kalpataru	Kota Madiun	150 orang	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	Kesepakatan bersama antara Menteri LH dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	150 orang	66.000.000	Dinas Lingkungan Hidup							
	9	Kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Kota Madiun	100 orang	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000	Terwujudnya warga masyarakat kota madiun yang peduli dan berwawasan lingkungan	100 orang	60.500.000	Dinas Lingkungan Hidup							
2	5	1	1	0	9	8	0	2	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Persentase Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber-sumber air yang berfungsi dengan layak dan baik		100%	830.000.000	APBD Kota : 830.000.000				
	1	Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Kota Madiun	1 paket	315.000.000	APBD Kota : 315.000.000	Pengadaan 1000 batang pohon pelindung tertanam, 320 unit penutup lubang biopori dan 20 unit alat bor biopori	1 paket	223.850.000	Dinas Lingkungan Hidup							
	2	Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan	Kota Madiun	112 Titik	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	Pendukung laporan DAK bidang lingkungan hidup	112 Titik	155.000.000	Dinas Lingkungan Hidup							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		3	Pembuatan Sumur Resapan (DAK)	Jumlah sumur yang tersedia dan layak pakai	Kota Ma diun	25 Unit	365.000.000	APBD Kota : 365.000.000	Pembangunan 25 unit sumur resapan	30 Unit	370.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	9		Perhubungan				6.688.228.000						
2	9	1 0 7 0 1	1 5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Sarana Fasilitas LLAJ yang Berfungsi Baik	78	640.000.000	APBD Kota : 640.000.000					
			1	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal, Sub Terminal dan Halte	Jumlah arus penumpang	Kota Ma diun	6776500 Penumpang	296.000.000	APBD Kota : 296.000.000	Pemeliharaan Terminal, Sub Terminal dan Halte	6868100 Penumpang	296.000.000	Dinas Perhubungan
			2	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Barang	Jumlah angkutan barang keluar masuk	Kota Ma diun	23188 Kendaraan	239.000.000	APBD Kota : 239.000.000	Pemeliharaan Terminal Angkutan Barang untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat	23212 Kendaraan	109.000.000	Dinas Perhubungan
			3	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan	Kota Ma diun	316 Unit	85.000.000	APBD Kota : 85.000.000	-	325 Unit	85.000.000	Dinas Perhubungan
			4	Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan SIM LLAJ	Jumlah CCTV dan SIM LLAJ	Kota Ma diun	9 Titik	20.000.000	APBD Kota : 20.000.000	-	9 Titik	20.000.000	Dinas Perhubungan
2	9	1 0 7 0 1	1 6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		80	1.224.000.000	APBD Kota : 1.224.000.000				
			1	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah Personil	Kota Ma diun	15 kegiatan	400.000.000	APBD Kota : 400.000.000	-	7 kegiatan	400.000.000	Dinas Perhubungan
			2	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudl/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah awak kendaraan umum yang diberi penghargaan	Kota Ma diun	7 peserta	60.000.000	APBD Kota : 60.000.000	-	7 peserta	60.000.000	Dinas Perhubungan
			3	Kegiatan Pembinaan Keselamatan LLAJ	Jumlah pelajar yang diberi penghargaan	Kota Ma diun	42 orang	185.000.000	APBD Kota : 185.000.000	-	42 orang	120.000.000	Dinas Perhubungan
			4	Kegiatan Penyelenggaraan Balik Gratis Angkutan Lebaran	Jumlah penumpang	Kota Ma diun	427 orang	50.000.000	APBD Kota : 50.000.000	-	350 orang	40.000.000	Dinas Perhubungan
			5	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Pemuda Pelopor	Jumlah peserta yang terpilih	Kota Ma diun	5 peserta	45.000.000	APBD Kota : 45.000.000	-	5 peserta	45.000.000	Dinas Perhubungan
			6	Kegiatan Pengamanan Insidentil Terpadu	Jumlah pos pengamanan	Kota Ma diun	4 Pos	91.000.000	APBD Kota : 91.000.000	-	5 Pos	91.000.000	Dinas Perhubungan
			7	Kegiatan Pelatihan/Pembinaan SDM Perhubungan	Jumlah kegiatan	Kota Ma diun	2 kali	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	-	2 kali	75.000.000	Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8	Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha (WTN)	Jumlah Penilaian	Kota Ma diun	2 kali	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000	-	2 kali	150.000.000	Dinas Perhubungan
	9	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan	Jumlah angkutan/ta hun	Kota Ma diun	9000000 Kendaraan	68.000.000	APBD Kota : 68.000.000	-	7500 Kendaraan	50.000.000	Dinas Perhubungan
	10	Kegiatan Sosialisasi Perda Andalin	Jumlah Peserta	Kota Ma diun	450 orang	100.000.000	APBD Kota : 100.000.000	Baru	0	0	Dinas Perhubungan
291107001		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan Tingkat Keselamatan		70	4.824.228.000	APBD Kota : 4.824.228.000				
	1	Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu lalu lintas	Kota Ma diun	283 buah	243.062.500	APBD Kota : 243.062.500	-	250 buah	210.000.000	Dinas Perhubungan
	2	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Jumlah marka jalan	Kota Ma diun	4600 m2	641.600.000	APBD Kota : 641.600.000	-	1450 m2	200.000.000	Dinas Perhubungan
	3	Kegiatan Pengadaan Paku Marka Jalan	Jumlah paku jalan	Kota Ma diun	600 buah	198.000.000	APBD Kota : 198.000.000	-	400 buah	198.000.000	Dinas Perhubungan
	4	Kegiatan Pengadaan Papan Nama Jalan	Jumlah papan nama jalan	Kota Ma diun	339 buah	266.085.000	APBD Kota : 266.085.000	-	150 buah	140.000.000	Dinas Perhubungan
	5	Kegiatan Pengadaan Delinator	Jumlah delinator	Kota Ma diun	100 buah	55.000.000	APBD Kota : 55.000.000	-	100 buah	55.000.000	Dinas Perhubungan
	6	Kegiatan Pengadaan Guardrail	Jumlah Guardrail	Kota Ma diun	2 buah	700.000.000	APBD Kota : 700.000.000	-	1 buah	725.000.000	Dinas Perhubungan
	7	Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Lalu Lintas (DAK)	Jumlah Peralatan Perlengkapan Lalu lintas	Kota Ma diun	3 paket	308.925.000	APBD Kota : 308.925.000	-	1 paket	308.925.000	Dinas Perhubungan
	8	Kegiatan Pengadaan Traffic Light.	Jumlah Traffic Light	Kota Ma diun	6 Unit	1.540.000.000	APBD Kota : 1.540.000.000	Tahunan	0	0	Dinas Perhubungan
	9	Kegiatan Pengadaan Cermin Tikungan.	Jumlah cermin tikungan	Kota Ma diun	51 buah	219.555.500	APBD Kota : 219.555.500	Lanjutan	10 buah	50.000.000	Dinas Perhubungan
	10	Kegiatan Pengadaan Warning Light (Flasing/Lampu Peringatan).	Jumlah warning light	Kota Ma diun	13 buah	552.000.000	APBD Kota : 552.000.000	Tahunan	3 buah	135.000.000	Dinas Perhubungan
	11	Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Jalan.	Jumlah data	Kota Ma diun	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000	-	1 Dokumen	25.000.000	Dinas Perhubungan
	12	Kegiatan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat	Kota Ma diun	7 Unit	75.000.000	APBD Kota : 75.000.000	-	7 Unit	75.000.000	Dinas Perhubungan
PAGU PRIORITAS PERTAMA PEMBANGUNAN DAERAH						393.617.672.000					

BAB VI PENUTUP

Perubahan kedua RKP Kota Madiun Tahun 2017 merupakan perubahan dari penjabaran rencana kerja dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019. RKP dan perubahannya memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, RKP dan perubahannya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. RKP dan perubahannya kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Perubahan kedua RKP Kota Madiun Tahun 2017 ini disusun memperhatikan kepada:

1. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019;
2. Substansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Perubahan kedua RKP Kota Madiun Tahun 2017 mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Demikian Perubahan kedua RKP Kota Madiun Tahun 2017 yang akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, yang disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.